

**TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)
STUDI KESESUAIAN
RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG (RPJP) DENGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA MALANG**



**Disusun Oleh:
ADI FITRA FIRMANSYAH
NIM. 06.24.046**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
(TEKNIK PLANOLOGI)
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2015**

1972

ИИИИИИ. ДЕККОРООИ МУНИОНУТ МУУУУО
БУККИГЛАС ДЕККИК ИЛИГ ДУИ БЕВЕИСУМУУ
СЕККИК БУУИОРОО
БНОСИВН БЛОДИ БЕВЕИСУМУУУУ МАНУАВЕ ДУИ КОЛУ

МИИТ ОУУУУУ
УДИ ИИИИУ МОНУУУУУУ
ДЕККО ОУУУ



КОЛУ МУУУУО
ИИИГЕНЕМЛУГИ БНОСИВН БЕВЕИСУМУУ
БКИСУМУ БУУУ БЛУУО МАНУАУН (БКИА) ДУИ
БКИСУМУ БНОСИВН ТУНСКУ БУИУИС (БЫЕ) БЕИСУИ
БЛОДИ КЕДЕДУУУ
(БКЫТЪСИ)
ЛЛОУС УККИК

PERSETUJUAN SKRIPSI

Studi Kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Implementasi Program Pembangunan
Kota Malang

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Planologi S-1
Institut Teknologi Nasional Malang

Disusun oleh:
Adi Fitra Firmansyah
06.24.046

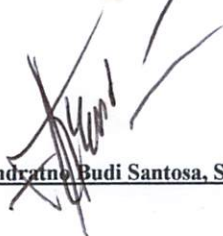
Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT.

Pembimbing II,



Endratno Budi Santosa, ST. MT



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang

Ida Soewarni, ST. MT

LEMBAR PENGESAHAN

Studi Kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Implementasi Program Pembangunan
Kota Malang

Skripsi dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Sidang Skripsi
Jenjang Strata Satu (S-1)

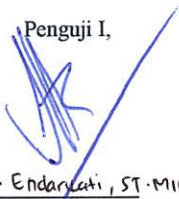
Pada hari : Rabu
Tanggal : 25 Februari

Diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh:
Adi Fitra Firmansyah
06.24.046

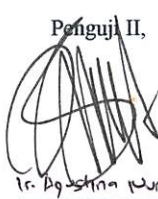
Disahkan oleh:

Penguji I,



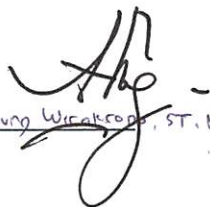
Maria G. Endaryati, ST-MIUEM

Penguji II,



Ir. Dg. Shm Nurul H. MTP

Penguji III,



Agung Wiraksono, ST. MTP

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang



Ida Soewarni, ST., MT

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adi Fitra Firmansyah
Nim : 06.24.046
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
(Teknik Planologi)
Judul Skripsi : Studi Kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Implementasi Program Pembangunan Kota Malang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Malang, Februari 2015
ang membuat pernyataan,

Adi Fitra Firmansyah

06.24.046



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Jalan Bendungan Sigurgura No. 2 Malang Telp. (0341) 567154

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang diadakan pada :

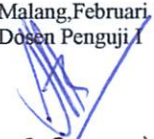
Nama : Adi Fitra Firmansyah
Nim : 06.24.046
Hari / Tanggal Seminar :
Judul : Studi Kecsuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Implementasi Program Pembangunan Kota Malang

Terdapat kekurangan yang meliputi:

1. Tata tulis
2. Kriteria kesesuaian RPJP dan RTW ?
3. Metode analisis yang digunakan ?
4. Kesimpulan : Jawaban dari Judul \rightarrow Hasil ?
5. RPJP (Pendekatan ekonomi) & RTW (Spasial) \rightarrow Perbandingan ?

Malang, Februari 2015

Dosen Penguji 1


Maria C. Endarwati, ST. MINEM



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Jalan Bendungan Sigurgura No. 2 Malang Telp. (0341) 567154

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Jurusan Teknik
Perencanaan Wilayah dan Kota yang diadakan pada:

Nama : Adi Fitra Firmansyah

Nim : 06.24.046

Hari / Tanggal Seminar :

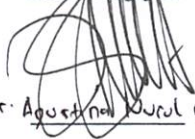
Judul : Studi Kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP) dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Implementasi Program Pembangunan
Kota Malang

Terdapat kekurangan yang meliputi:

1. Program / keterkaitan saran 1 dan 2 → Program ada di RTW tidak di bahas
2. Analisis yang digunakan masih dapat dipertajam dengan SWIT
3. Penilaian kesesuaian perlu di pergelas
4. Kesimpulan dan rekomendasi bisa lebih di perkuat sesuai hasil analisis

Malang, Februari 2015

Dosen Penguji II


Ir. Agung Nugul H. MTP



LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang diadakan pada:

Nama : Adi Fitra Firmansyah

Nim : 06.24.046

Hari / Tanggal Seminar :

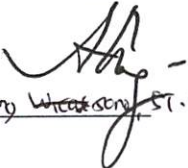
Judul : Studi Kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Implementasi Program Pembangunan Kota Malang

Terdapat kekurangan yang meliputi:

1. Tata tulis
2. Landasan penulisan
3. Kesetaraan muatan yang dibandingkan?
4. Analisis yang digunakan: kualifikasi penentuan kualifikasi (lemah, kuat)
5. Indikasi program (PTRW) tidak dibandingkan dengan program RPJP

Malang, Februari 2015

Dosen Penguji III


Agus Wicaksono, ST. MTP

STUDI KESESUAIAN RPJP-RTRW DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MALANG

ABSTRAKSI

Perencanaan pembangunan yang ada saat ini yaitu RPJP yang berfungsi sebagai pedoman penganggaran daerah dan RTRW yang berfungsi sebagai pedoman perijinan dan alokasi ruang masih banyak permasalahan yang terjadi, yakni belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, tumpang tindih, ketidakseimbangan serta ketidaksesuaian dari kedua produk tersebut. Dan tidak kalah penting perlu juga untuk diketahui bentuk implementasi program pembangunan dalam bentuk penganggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari RPJP-RTRW dan implementasi program pembangunan. Masing-masing menggunakan analisa *content analysis* untuk RPJP-RTRW dan deskriptif komparatif untuk analisa implementasi program pembangunan dengan anggaran (APBD).

Hasil Analisa kesesuaian RPJP-RTRW yaitu Visi-Tujuan, Misi-Kebijakan, dan Program-Strategi menunjukkan bahwa sebagian besar muatan masing-masing produk perencanaan tersebut tidak sesuai. Dari ketiga muatan masing-masing produk yang dikaitkan yaitu Visi (RPJP)-Tujuan (RTRW) dimana 62,50 % tidak ada keterkaitan, 25,50 % hubungan lemah, dan 12,50 % hubungan kuat. Misi (RPJP)-Kebijakan (RTRW) dimana 89,06 % hubungan lemah, dan 10,94 % tidak ada keterkaitan. Program (RPJP)-strategi (RTRW) dimana dari 10 program tersebut hanya program ke-4 yaitu "Pembangunan Wilayah & Infrastruktur Berkelanjutan" yang memiliki keterkaitan paling tinggi 53,13 % keterkaitan lemah, 40,63 % keterkaitan kuat, dan 6,25 % tidak ada keterkaitan. Sedangkan untuk hasil implementasi program pembangunan dengan APBD dari tahun 2012-2014, dimana anggaran tahun 2012 untuk alokasi anggaran terbesar pada program pendidikan dengan 40,66% dari jumlah anggaran belanja dan kesesuaian implementasi program pembangunan sebesar 48,82 % sesuai dan 51,58 % tidak sesuai. Anggaran tahun 2013 alokasi terbesar untuk pendidikan dengan 38,84% dan implementasi program pembangunan 55,12 % sesuai dan program yang tidak sesuai dengan 44,88 %. Dan untuk anggaran tahun 2014 alokasi terbesar untuk pendidikan dengan 36,70% dan implementasi program pembangunan dengan 48,82 % sesuai dan yang tidak terealisasi adalah 51,18 %. Rekomendasi kedepannya adalah perlu evaluasi terhadap program pembangunan, baik RPJP dan RTRW serta implementasi program pembangunan (APBD) agar mampu bersinergi untuk mewujudkan Visi Kota Malang yaitu "Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera", demi tercapainya pembangunan yang adil dan merata serta masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: Kesesuaian, RPJP-RTRW, Implementasi pembangunan.

— tanya
alinea!

SUITABILITY STUDY OF RPJP-RTRW AND IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT PROGRAMS IN MALANG

ABSTRACT

Development plans that exist today are RPJP which serves as a budgeting guidelines and RTRW (Spatial Planning) serves as a guide to licensing and allocation of space which is still many problems occurred, which is not yet completely become a reference of development, overlapping, imbalances and mismatches of both products. And it is also important to known that the implementation of development programs in the form of budgeting.

This study aims to determine the suitability of RPJP-RTRW (Spatial Planning) and implementation of development programs. Each of it uses *content analysis* for RPJP-RTRW (Spatial Planning) and *descriptive comparative analysis* for the implementation of development programs with budgeting (APBD).

Results of analysis suitability of RPJP-RTRW (Spatial Planning) are vision-purpose, mission-policy, and program-strategy shows that most of the charge of each planning product is not suitable. From the third charges of each product that is associated is vision (RPJP) - purpose (RTRW) where 62.50% is not related, 25.50% has weak relation and 12.50% has stronger relation. Mission (RPJP) - policy (RTRW) has weak relation about 89.06% and 10.94% is not related. Program (RPJP) - strategy (RTRW) which only the fourth program of ten courses, named "Sustainable Regional Development and Infrastructure " which has the highest relevance, 53.13% has weak relation, 40.63% stronger relation, and 6, 25% no relation. While for results of the implementation of development programs with budgeting from 2012-2014, where the budget of 2012 is the biggest budget allocation, on an education program has 40.66% of the amount of budget and the implementation of development programs is 48.82% appropriate and 51.58% inappropriate. The biggest budget allocation is for education about 38.84% and 55.12% of development programs implementation are appropriate and 44.88% for inappropriate programs. And the biggest budget allocation of 2014 is for education with 36.70% and 48.82% of development programs implementation are appropriate and 51, 18% for not realized programs.

Recommendations in the future is necessary to do evaluation of development programs, both RPJP and RTRW (Spatial Planning) and implementation of development programs (budgeting) to be able to cooperate for realize the vision of Malang "The Realization of Malang For Quality Education City, Cultured, Environmental, Leading to Prosperous Society" for the achievement of a fair and equitable development and a prosperous society.

Keyword : suitability, RPJP-RTRW, implementation of development

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Swt atas Rahmat dan Hidayah-Nya dengan terselesaikannya laporan skripsi dengan judul *"Studi Kesesuaian RPJP-RTRW dan Implementasi Program Pembangunan Kota Malang"*. Laporan ini merupakan laporan final atau hasil penelitian dan lebih lanjut ini merupakan prasyarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan (program studi) S-1 Jurusan Teknik Planologi-PWK, di salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Kota Malang yaitu Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang kita ketahui ada 2, yaitu sistem perencanaan pembangunan dan sistem perencanaan tata ruang. Kedua sistem ini mempunyai proses dan produknya masing-masing. Kekhawatiran yang kemudian muncul adalah bagaimana ada kepastian sebagai sebuah standard dalam perencanaan pembangunan daerah, bahwa kedua dokumen perencanaan ini benar benar menjadi acuan secara menyeluruh. Pada kenyataannya banyak ditemukan persoalan bahwa tidak mudah untuk mengacu kepada keduanya secara bersamaan meskipun terdapat peraturan perundangan yang secara hukum mengamankan integrasi keduanya. Kenyataan kedua, terdapat kekhawatiran terjadinya tumpang tindih, ketidakseimbangan serta ketidaksesuaian antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Berdasarkan hal ini, maka perlu dilakukan integrasi antara dokumen-dokumen tersebut. Setelah diketahui keterkaitan dari kedua produk tersebut, penting juga untuk diketahui bagaimana implementasi dari program pembangunan tersebut. Dalam penulisan ini berisikan mengenai fakta, analisis mengenai kesesuaian RPJP-RTRW dan Implementasi program pembangunan.

Dalam penyusunan laporan ini penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya laporan ini :

1. Ibu Ida Soewarni, ST. MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi ITN Malang.
2. Bapak DR. Ir. Ibnu Sasongko, MT. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarah dan bimbingan dalam penyusunan laporan skripsi ini.
3. Bapak Endratno Budi Santosa, ST. MT. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarah dan bimbingan dalam penyusunan laporan skripsi ini.
4. Ibu Ir. Titick Poerwati, MT. Selaku Dosen Mata kuliah Skripsi yang telah memberikan pengarah dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar laporan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis selalu menerima saran dan masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam laporan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Malang, 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
LEMBAR PERBAIKAN.....	iv
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR PETA	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Sasaran	4
1.4 Lingkup Penelitian.....	5
1.4.1 Lingkup Materi	5
1.4.2 Lingkup Lokasi	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Kegunaan Praktis	6
1.5.2 Kegunaan Akademis	6
1.6 Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Definisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP).....	9
2.2 Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota	20
2.3 Keterkaitan RPJP-RTRW.....	24
2.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	27
2.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2 Metode Analisa Data.....	35
3.2.1 Analisis kesesuaian RPJP dengan RTRW menggunakan Content Analysis (Analisis Isi).....	35
3.2.2 Analisis wujud implementasi rencana program pembangunan dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan Analisa Deskriptif Komparatif.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM KESESUAIAN RPJP-RTRW DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN	41
4.1 Gambaran Umum RPJP-RTRW Kota Malang.....	41
4.1.1 Rencana Program Jangka Panjang (RPJP)	41
4.1.2 Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW).....	70
4.2 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).....	83
4.2.1 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 2012	83
4.2.2 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 2013	84
4.2.3 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 2014	86
BAB V ANALISA KESESUAIAN RPJP-RTRW DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN	88
5.1 Analisis kesesuaian RPJP dengan RTRW menggunakan Content Analysis (Analisis Isi).....	88

5.2 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) dengan Menggunakan analisis deskriptif komparatif.....	112
5.2.1 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) Tahun 2012	112
5.2.2 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) Tahun 2013	129
5.2.3 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) Tahun 2014	144
BAB VI PENUTUP	157
6.1 Kesimpulan	157
6.1.1 Kesesuaian RPJP-RTRW	157
6.1.2 Implementasi pembangunan program RPJP dengan APBD	158
6.2 Rekomendasi	158
6.2.1 Penelitian Selanjutnya	159
6.2.2 Rekomendasi Judul Penelitian Selanjutnya	159
6.2.3 Kepada Pemerintah Dan Instansi Terkait	160

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ruang Lingkup Kesesuaiannya RPJP dengan RTRW	29
Tabel 3.1	Operasional Analisis Isi/Content Dalam Penelitian.....	38
Tabel 3.2	Kualifikasi keterkaitan RPJP-RTRW.....	38
Tabel 3.3	Contoh Tabel Alokasi Anggaran dan Pelaksanaan Program.....	40
Tabel 4.1	Alokasi Penganggaran Tahun 2012	83
Tabel 4.2	Alokasi Penganggaran Tahun 2013	85
Tabel 4.3	Alokasi Penganggaran Tahun 2014	86
Tabel 5.1	Kualifikasi keterkaitan RPJP-RTRW.....	88
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi dengan Tujuan	89
Tabel 5.3	Matriks kesesuaian Visi (RPJP) - Tujuan (RTRW)	90
Tabel 5.4	Keterkaitan Misi dengan Kebijakan.....	91
Tabel 5.5	Matriks Keterkaitan Misi (RPJP) - Kebijakan (RTRW)	92
Tabel 5.6	Keterkaitan Program (Pendidikan berorientasi global dengan kearifan local) dengan Strategi	93
Tabel 5.7	Keterkaitan Program (Terwujudnya SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbudaya) dengan Strategi....	94
Tabel 5.8	Keterkaitan Program (Lingkungan Kota Pendidikan Yang Kondusif) dengan Strategi.....	95
Tabel 5.9	Matriks keterkaitan Program Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan (RPJP) dengan Strategi (RTRW).....	96
Tabel 5.10	Keterkaitan Program (Pembangunan Wilayah & Infrastruktur Berkelanjutan) dengan Strategi.....	98
Tabel 5.11	Matriks kesesuaian Program Pembangunan Wilayah & Infrastruktur (RPJP)-Strategi (RTRW)	100
Tabel 5.12	Keterkaitan Program (Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan) dengan Strategi.....	102
Tabel 5.13	Matriks Keterkaitan Program Pertumbuhan Ekonomi (RPJP) dengan Strategi (RTRW).....	104

Tabel 5.14 Keterkaitan Program (Mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum) dengan Strategi.....	105
Tabel 5.15 Keterkaitan Program (Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional) dengan Strategi.....	105
Tabel 5.16 Keterkaitan Program (Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradap, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dengan Strategi.....	106
Tabel 5.17 Keterkaitan Program (Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan) dengan Strategi.....	107
Tabel 5.18 Matriks keterkaitan Program Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan RPJP) dengan Strategi (RTRW)	108
Tabel 5.19 Keterkaitan Program (Mewujudkan Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera) dengan Strategi.....	109
Tabel 5.20 Sinkronisasi RPJP Jatim (Tahun 2005-2025) dengan RTRWP Jatim 2009-2029.....	110
Tabel 5.21 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2012.....	112
Tabel 5.22 Implementasi pembangunan dengan APBD Tahun 2012	115
Tabel 5.23 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2013.....	129
Tabel 5.24 Implementasi pembangunan dengan APBD Tahun 2013	132
Tabel 5.25 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2014.....	143
Tabel 5.26 Implementasi pembangunan dengan APBD Tahun 2014	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Contoh operasional Analisis Isi/Content Analysis.....	38
Gambar 5.1 Muatan kesesuaian RPJP dengan RTRW.....	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Hubungan keterkaitan Visi-Tujuan	90
Grafik 5.2 Hubungan keterkaitan Misi-Kebijakan.....	92
Grafik 5.3 Hubungan keterkaitan Program RPJP(Lingkungan Kota Pendidikan Kondusif)-Strategi RTRW.....	96
Grafik 5.4 Hubungan keterkaitan Program RPJP(Pengembangan wilayah & Infrastruktur)-Strategi RTRW.....	100
Grafik 5.5 Hubungan keterkaitan Program RPJP (Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi)-Strategi RTRW.....	104
Grafik 5.6 Hubungan keterkaitan Program RPJP (Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan)-Strategi RTRW.....	108
Grafik 5.7 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2012.....	113
Grafik 5.8 Implementasi program RPJP dalam APBD	129
Grafik 5.9 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2013.....	131
Grafik 5.10 Implementasi program RPJP dalam APBD	143
Grafik 5.11 Alokasi Anggaran belanja tahun 2014	145
Grafik 5.12 Implementasi program RPJP dalam APBD	156

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Hierarki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	11
Bagan 2.2	Skematis, Substansi Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	18
Bagan 2.3	Kedudukan Rtrw Kota Dalam Sistem Penataan Ruang Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	21
Bagan 2.4	Skema Keterkaitan Rencana Pembangunan	26
Bagan 2.5	Kerangka Pikir.....	32
Bagan 2.6	Kerangka Kerja.....	33
Bagan 3.1	Analisis Isi (Klaus Krippendorff,1991:29).....	37

DAFTAR PETA

Peta 1.1 Peta Lingkup Lokasi	7
------------------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah mengikuti dua sistem perencanaan yang menjadi panutan bagi pemerintah daerah, yaitu sistem perencanaan pembangunan dan sistem perencanaan tata ruang¹. Kedua sistem ini mempunyai proses dan produknya masing-masing. Kekhawatiran yang kemudian muncul adalah bagaimana ada kepastian sebagai sebuah standard dalam perencanaan pembangunan daerah, bahwa kedua dokumen perencanaan ini benar benar menjadi acuan secara menyeluruh. Pada kenyataannya banyak ditemukan persoalan bahwa tidak mudah untuk mengacu kepada keduanya secara bersamaan meskipun terdapat peraturan perundangan yang secara hukum mengamanatkan integrasi keduanya. Kenyataan kedua, terdapat kekhawatiran terjadinya tumpang tindih, ketidakseimbangan serta ketidaksesuaian antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Berdasarkan hal ini, maka perlu dilakukan integrasi antara dokumen-dokumen tersebut.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, telah dan akan terus berkembang pesat sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial-budaya ekonomi dan politiknya. Dalam proses perkembangannya diperlukan suatu "perangkat" pengendali yang mampu memberikan arah, dan panduan kebijakan bagi semua pengambil keputusan serta seluruh stakeholders di kota Malang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang sesuai dengan kewenangan pemerintah kota. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

¹ Institution Building for the Integration of National-Regional Development and Spatial Planning, h.1 "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)" Tahun 2010.

→ penulisan referensi ?

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan penyusunan pembangunan tahunan kota. Keberadaan rencana pembangunan kota Malang tidak dapat dipungkiri harus menjadi bagian dari kehidupan kota Malang itu sendiri². Namun dalam pelaksanaan pembangunannya, kontra masih terjadi di Kota Malang. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern baik yang berskala besar maupun kecil semakin menjamur, dan seolah tidak terkendali dan sedikit demi sedikit menyingkirkan pasar-pasar tradisional sebagai pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dari uraian di atas perlu diketahui apakah telah sesuai dengan rencana tata ruang sebagai salah satu acuan pembangunan. Dokumen rencana tata ruang wilayah pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah³. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Bagi wilayah kota, kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan fisik, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTRK, RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, permukiman, serta fasilitas umum dan sosial. Dalam operasionalisasinya, rencana tata ruang harus memiliki kekuatan hukum berupa peraturan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk meningkatkan kualitas dari pemanfaatan ruang itu sendiri. Dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang.

RPJP dan RTRW adalah produk yang sama-sama menjadi obyek pembangunan daerah. RPJP yang merupakan pedoman penganggaran pemerintah

²<http://dinasagalih.wordpress.com/kota-malang/rencana-pembangunan-jangka-panjang/>. 23-08-2013

³Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030, h.2

dalam mengimplementasikan programnya, memuat program pembangunan daerah baik fisik dan non fisik sedangkan RTRW dengan fungsinya sebagai acuan perijinan alokasi peruntukkan ruang yang memuat program pembangunan spasial seharusnya mampu mengakomodir kepentingan karena sama-sama merupakan pedoman pembangunan jangka panjang selama 20 tahun kedepan yang bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak ketidaksesuaian dari kedua produk pembanguna tersebut, karena baik buruknya pembangunan suatu daerah salah satunya dapat diketahui dari kesesuaian produk rencana pembangunan dengan realisasi pembangunannya.

Berdasarkan uraian diatas tentang kebijakan pembangunan daerah dan rencana tata ruangnya, di Kota Malang sendiri perlu melakukan studi kesesuaian Rencana Program Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dan didukung dengan analisa wujud implementasi rencana program (RPJP) melalui "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Dengan penelitian ini diharapkan untuk mengetahui kesesuaian program dan implementasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melihat apakah rencana umum pembangunan daerah dengan rencana keruangan tersebut terintegrasi dengan baik, maka dapat diketahui dengan melihat kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan *Content Analysis* (analisis isi). Dalam analisis isi ini terdapat analisis kesesuaian dari RPJP dengan RTRW dan analisis pakar sebagai penunjang untuk mendapatkan sumber lainnya. Kesimpulan yang akan didapatkan dari *Content Analysis* ini adalah sektor atau bidang-bidang mana saja yang terjadi tumpang tindih, ketidakseimbangan, kesesuaian serta ketidaksesuaian dari kedua produk perencanaan tersebut.

Sebagai hasil integrasi dari rencana pembangunan dan rencana tata ruang tadi selanjutnya akan diketahui apakah rencana pembangunan tersebut telah menjadi acuan dalam realisasi pembangunan suatu daerah. Pembangunan suatu daerah yang baik dapat diketahui dari rencana pembangunan dengan realisasi

pembangunannya yang sejalan, maka untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui dari isi rencana pembangunan (RPJP) dengan hasil-hasil alokasi pembangunan yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan "*Studi Kesesuaian RPJP-RTRW Kota Malang*" adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian isi RPJP 2005-2025 dengan RTRW Kota Malang 2010-2030?
2. Bagaimana wujud implementasi dalam rencana program pembangunan di Kota Malang?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam sub bab ini akan menjelaskan maksud penulisan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang akan dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian isi dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta melihat implementasi pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Malang.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, maka perlu adanya sasaran sebagai tahapan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Adapun sasaran dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian RPJP dengan RTRW Kota Malang.
2. Mengidentifikasi wujud implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) di Kota Malang.

1.4 Lingkup Penelitian

Pada lingkup penelitian akan dibahas mengenai batasan-batasan yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini. Dimana lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup materi dan lingkup lokasi yang bertujuan untuk memberikan batasan secara jelas mengenai materi yang dibahas dan lokasi yang menjadi fokus penelitian.

1.4.1 Lingkup Materi

Berbagai evaluasi dapat dilakukan untuk menilai keberhasilan sebuah pembangunan suatu daerah. Salah satunya yaitu penilaian tentang baik buruknya, ataupun sudah terarah dengan baik atau tidak kebijakan suatu daerah. Yang tentunya hal ini akan berdampak pada kemajuan suatu daerah. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat diketahui dari kesesuaiannya isi dalam penjabaran RPJP Tahun 2005-2025 dengan RTRW Tahun 2010-2030 dan bagaimana wujud implementasi program dalam RPJP dengan APBD, hal ini dapat menjadi rekomendasi pemerintah Kota Malang untuk mendapatkan arahan pembangunan yang lebih baik. Dan untuk implementasi rencana program dapat diketahui melalui "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD)". Dimana data-data yang dibutuhkan dalam RPJP yaitu visi, misi, dan program. Sedangkan data-data dari RTRW yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan penataan ruang. Serta data-data APBD yaitu program, anggaran, dan realisasi program dalam beberapa tahun terakhir untuk mengetahui progress pembangunan di Kota Malang.

1.4.2 Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi kajian dalam penelitian ini adalah Kota Malang dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso, Kab. Malang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji, Kab. Malang
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis, dan Tumpang, Kab. Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau, Kab. Malang

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang manfaat apa yang ingin dicapai oleh penulis setelah terselesaikannya penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menuliskan kegunaan penelitian kedalam dua kelompok kegunaan yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini diperuntukkan bagi pihak pemerintah di Kota Malang khususnya instansi terkait. Adapun kegunaan praktisnya, adalah:

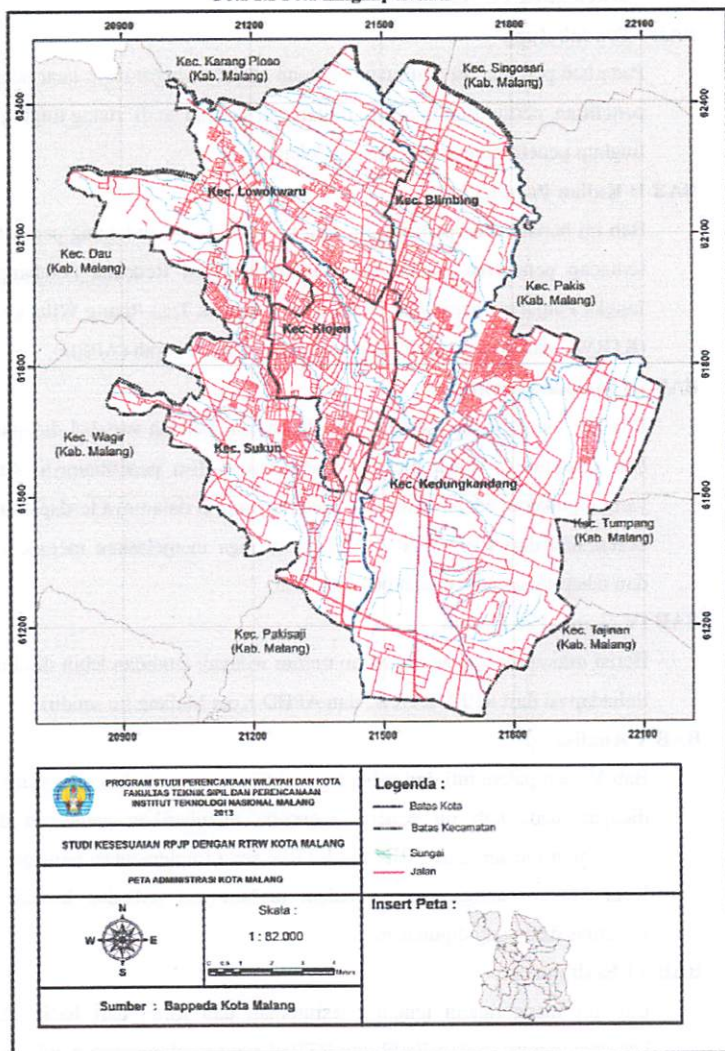
1. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap kesesuaian RPJP-RTRW dan wujud implementasinya.
2. Memberikan wawasan bagi masyarakat terkait kesesuaian RPJP-RTRW dan wujud implementasinya Kota Malang.
3. Setelah memahami manfaat dari kesesuaian RPJP-RTRW dan wujud implementasinya, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk mendukung program pemerintah baik dalam rencana program RPJP dan rencana tata ruang RTRW yang telah ditetapkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis menjelaskan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian yang diperuntukkan untuk pihak akademis yang membutuhkan khususnya pihak yang sedang melakukan penelitian. Adapun kegunaan akademis baik terhadap penulis maupun terhadap pihak lain antara lain :

1. Mengasah kemampuan peneliti dalam menganalisa kesesuaian RPJP-RTRW dan mengidentifikasi wujud implementasi program pembangunan.
2. Memperluas wawasan peneliti dalam bidang kebijakan publik dan tata ruang.
3. Sebagai referensi terkait intergrasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang kodcpan.

Peta 1.1 Peta Lingkup Lokasi



1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini yaitu pendahuluan adalah menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup baik lingkup penelitian maupun lingkup lokasi studi.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi beberapa tinjauan serta konsep yang mendukung pembahasan terhadap penelitian, antara lain tentang definisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), definisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan, setelah variabel didapat dari bab sebelumnya maka dicari metode dan analisa penelitiannya. Analisa yang digunakan adalah Analisis Content yang di dalamnya terdapat analisa kesesuaian dari RPJP-RTRW. Selain itu juga menjelaskan metode survei dan tahap-tahap pengerjaan penelitian ini.

BAB IV Gambaran Umum

Berisi uraian mengenai gambaran umum wilayah studian lebih difokuskan terhadap isi dari RPJP, RTRW, dan APBD Kota Malang itu sendiri.

BAB V Analisa

Bab V merupakan inti dari sebuah penelitian berupa analisa data yang telah didapat, pada bab ini peneliti mencoba memberikan gambaran dalam kesesuaian muatan dari RPJP dan RTRW serta implementasi pembangunan Kota Malang dengan menggunakan perhitungan terhadap kualitas dan kuantitas data yang digunakan.

BAB VI Kesimpulan

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisa, kesesuaian muatan dari RPJP dan RTRW serta implementasi pembangunan Kota Malang sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam yang lebih baik kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Merupakan kajian secara luas pada penulisan studi ini yang kemudian dituangkan dalam landasan penelitian, dimana isi dari tinjauan pustaka ini adalah teori-teori dan definisi-definisi beserta sumbernya yang dipakai sebagai dasar dalam penulisan studi ini. Semua referensi ini berhubungan dengan tema studi. Dalam subbab ini akan dijelaskan mengenai definisi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kota, keterkaitan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.1 Definisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia⁴. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

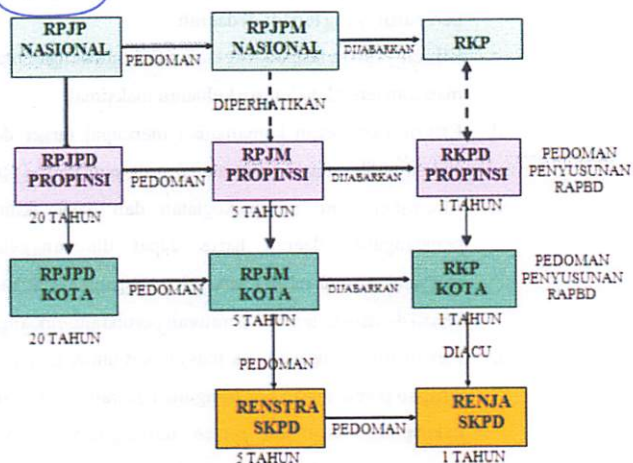
⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Maksud penyusunan RPJPD adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang kota 20 tahun ke depan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini memuat tentang kondisi umum, visi, misi serta arah pembangunan kota dalam kurun waktu 20 tahun. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota adalah sebagai berikut:

- a. Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal di masa depan;
- b. Mempekirakan pengaruh rencana pembangunan terhadap pengembangan daerah masa depan;
- c. Memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi;
- d. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan mengatasi kendala dan ketidakpastian seefektif mungkin;
- e. Menjaga kesinambungan pembangunan kota yang dilaksanakan dalam periode lima tahunan.

Bagan 2.1 Hierarki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)



Sumber : RPJP Kota Malang 2005-2030

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam rumusan perencanaan pembangunan. huruf f, dilaksanakan dengan melibatkan

semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan

- relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

c. Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Muatan RPJP KOTA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah⁵, muatan RPJP sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah).

2. Maksud dan Tujuan

(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota).

3. Landasan Hukum

(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).

4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

(Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau).

5. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini).

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

1. Kondisi Dan Analisis

a. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup,

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Input:

Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):

- permasalahan
- capaian/keberhasilan

Analisis:

- proyeksi peluang
- proyeksi ancaman
- proyeksi permasalahan
- proyeksi keberhasilan

Output

Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

b. Demografi

Input:

Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):

- permasalahan
- capaian/keberhasilan

Analisis:

- proyeksi peluang
- proyeksi ancaman
- proyeksi permasalahan
- proyeksi keberhasilan

Output

Prediksi Kondisi Demografi

c. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input:

Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):

- permasalahan
- capaian/keberhasilan

Analisis:

- proyeksi peluang
- proyeksi ancaman

- proyeksi permasalahan

- proyeksi keberhasilan

Output

Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- Sosial Budaya dan Politik

.....

- Prasarana dan sarana

.....

- Pemerintahan

.....

- Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.

.....

2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

(Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).

BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

3. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi:

a. Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan

dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.

- b. Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV. ARAH KEBLIJAKAN

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN 20 (dua puluh) tahun. Pentahapan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah.

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati;
- b. Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan
- c. Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Secara skematis, substansi arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Bagan 2.2 Skematis, substansi arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah



Sumber : Permen No.54-2010

BAB V. KAJIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

Isu-isu strategis kebijakan pembangunan di Kota Malang :

1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di kota Malang harus memiliki kualitas tinggi dan akan menjadi rujukan baik ditingkat nasional maupun global,
2. Bahwa outcomes penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK dan seni, serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur),

3. Bahwa kebijakan publik pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, yang meliputi; (1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai pengemban fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM dan institusional (tata kelola); (3) membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/ tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).
4. Bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan kota Malang dalam mencapai visi harus tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat kota Malang (kearifan lokal) melalui pengembangan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan kota Malang menuju kota Metropolitan. Pemahaman berbudaya, lebih dititik beratkan kepada suatu pencapaian kondisi kecerdasan emosional (*emotional quation*), keserdasan spiritual (*spiritual quation*), dan kecerdasan intelektual. Hal ini berarti bahwa pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan selalu mengedepankan keimanan dan ketaqwaan, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas secara utuh, sebagai wujud pembangunan manusia seutuhnya.
5. Bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman kota Malang. Makna wawasan lingkungan (sosial, budaya, alamiah) dalam pembangunan akan memberikan nilai orientasi pembangunan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan perekonomian (pertumbuhan dan pemerataan ekonomi), tetapi juga orientasi pada konservasi (*conservation orientations*), dan berorientasi pada masyarakat (*community orientations*).
6. Bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

kota, baik secara materiil maupun spirituil. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijaksanaan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

2.2 Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Rencana Tata Ruang merupakan Kesepakatan bersama semua stakeholders dengan kebijakan politik, dan merupakan upaya pengelolaan sumberdaya alam di darat, di laut, dan di udara dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis. RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan arah kebijakan Pemerintah daerah dalam menterpadukan kegiatan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota yang telah ditetapkan dalam RTRW di atasnya yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota (penataan kota) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kota yang diharapkan.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota :

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota :

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota.

c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

4. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan dan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota.

Isu-isu strategi penyelenggaraan Penataan ruang di Kota Malang :

1. Tidak terealisasi beberapa proyek pembangunan fisik sarana prasarana yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW 2001-2011;
2. Kurang koordinasi dan sinkronisasi antara rencana tata ruang Kota Malang dan Kota Malang pada wilayah-wilayah perbatasan, sehingga terjadi dualisme pembangunan atau bahkan tidak ada pengembangan sama sekali;
3. Beberapa studi yang dilaksanakan setelah penyusunan RTRW Kota Malang ternyata ada yang tidak mengacu pada dokumen tersebut;

Selama 5 (lima) tahun terakhir, ternyata kondisi pasar bereaksi lain terhadap rencana tata ruang sehingga perkembangan kota yang dititikberatkan ke arah timur dan utara tidak dapat sepenuhnya berjalan. Kecenderungan perkembangan kota adalah ke arah barat sehingga spill over sampai ke wilayah Kota Malang.

2.3 Keterkaitan RPJP-RTRW

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan secara nasional⁷. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana pembangunan memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait hal ini, daerah akan menyusun RPJPD dan RPJMD yang mengacu pada RPJP dan RPJM Nasional serta membuat program pembangunan dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh Kementerian/Lembaga. Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan.

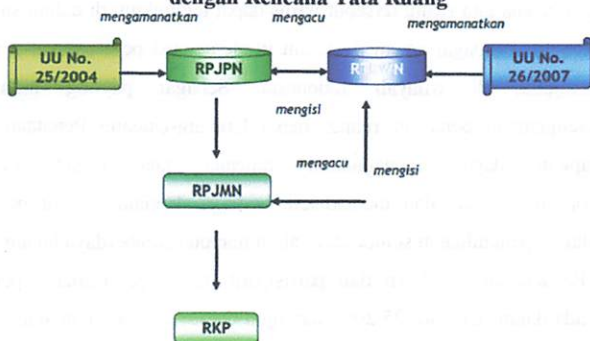
Pendekatan top-down dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan yang ada dalam UU No. 25/2004 terwujud dalam bentuk rangkaian musyawarah

⁷Doddy Koespramoodyo, MSo. Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas.

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat kabupaten/kota sampai dengan nasional. Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Secara *top down*, Pemerintah telah menetapkan rencana kerja pemerintah berikut alokasi anggaran yang ditetapkan dan akan digunakan dalam membiayai kegiatan pembangunan secara nasional. Secara partisipatif, proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder di pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan.

Pengalokasian sumberdaya, usaha pencapaian tujuan dan tindakan-tindakan di masa depan. Segala bentuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya harus diatur di dalam rencana tata ruang seperti yang tercantum di dalam UU No. 26/2007, bahwa penataan ruang terbagi atas kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang sangat penting dalam rangka optimalisasi sumberdaya alam dan buatan yang terbatas dan mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia.

Bagan 2.4 Skema Keterkaitan Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang



Sumber : Koespramoedyo, Deddy MSc. Keterkaitan rencana pembangunan nasional dengan penataan ruang

Hubungan antara penataan ruang dan perencanaan pembangunan nasional serta tujuan akhir penyelenggaraan pembangunan, yaitu mensejahterakan rakyat. Diatur oleh UU 25/2004, pembangunan diselenggarakan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek) dan bersinergi dengan rencana pembangunan yang disusun pemerintah daerah.

Penyusunan rencana pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) oleh pemerintah daerah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengacu kepada rencana tata ruang. Dengan demikian, hubungan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang tidak terpisahkan satu sama lain.

Ada beberapa aspek penataan ruang yang bernilai strategis bagi pembangunan daerah, yakni filosofis, politis, ekonomis, sosiologis dan kultural, dan yuridis. Secara filosofis, Indonesia memiliki ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai kedaulatan merencanakan, memanfaatkan, mengelola, dan mengendalikan sumberdayanya, baik daratan, lautan, udara, maupun angkasa. Pelanggaran oleh negara lain diartikan sebagai pelanggaran kedaulatan itu.

Secara politis, sejak pemberlakuan UU 32/2004, penataan ruang merupakan urusan yang kewenangannya diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat bertindak sebagai fasilitator yang membuat standar RTRW nasional. Tapi, desentralisasi kerap memosisikan daerah terjebak egois dan egoistis, padahal diperlukan sinergi antara pusat dan daerah dalam kerangka kerja yang menguntungkan.

2.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah

adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD⁸.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Kebijakan Penyusunan APBD

1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Belanja Daerah

- a. Belanja Tidak Langsung
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi
 - Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - Belanja Bagi Hasil Pajak
 - Belanja Bantuan Keuangan
 - Belanja Tidak Terduga
- b. Belanja Langsung

⁸Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

b. Belanja Langsung

- Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
- Surplus/Defisit APBD.

c. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan
- Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

2.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian, merupakan pedoman untuk memudahkan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penentuan tipologi tingkat kemajuan desa. Faktor-faktor penting dalam Kajian Kesesuaian RPJP dengan RTRW dan Implementasi Program Pembangunan dapat dilihat dari berbagai kriteria yang menonjol.

Berdasarkan rumusan konseptual yang terkait sehingga diperoleh ruang lingkup yang sesuai dengan data yang dibutuhkan yang mendukung judul penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada di bawah ini.

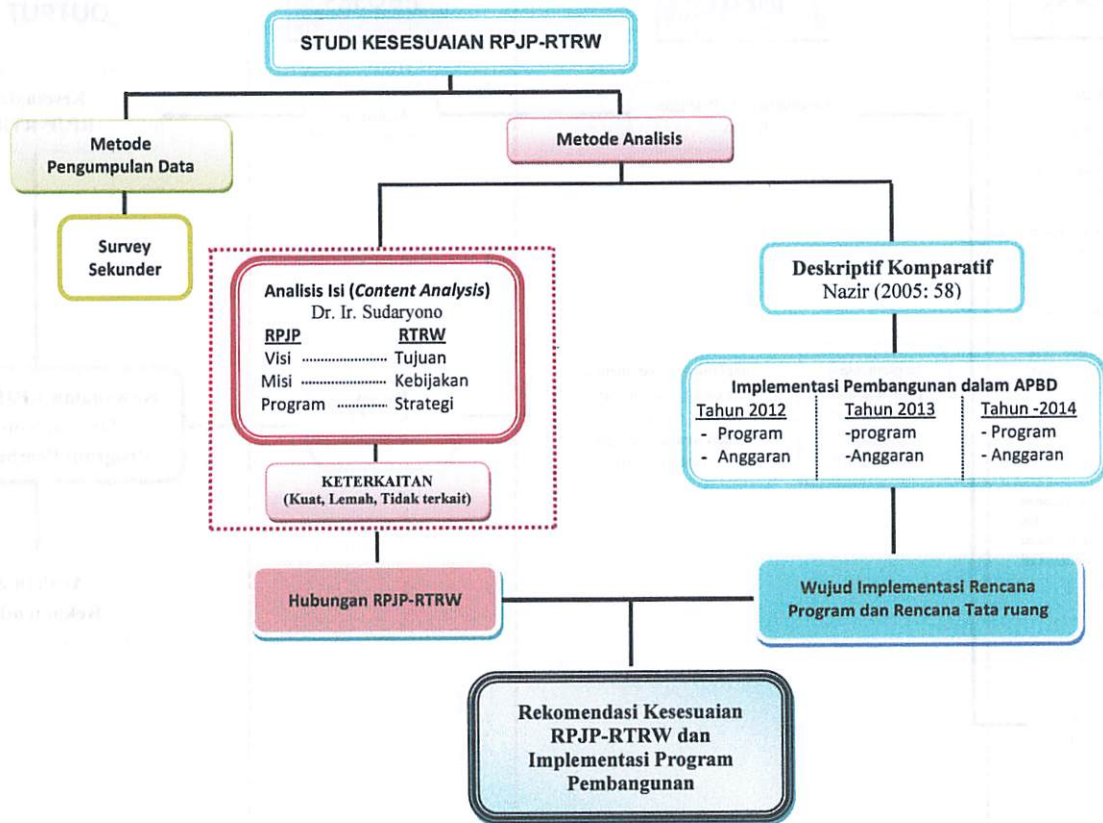
Tabel 2.1 Ruang Lingkup Kesesuaiannya RPJP dengan RTRW dan Wujud Implementasinya

No	Sasaran	Teori	Sumber	Ruang Lingkup
1.	Mengetahui kesesuaian isi RPJP dengan RTRW Kota Malang	Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJP propinsi, Yang berisi muatan : - Pendahuluan	Peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan	RPJP : - Visi - Misi - Program (Arah Kebijakan)

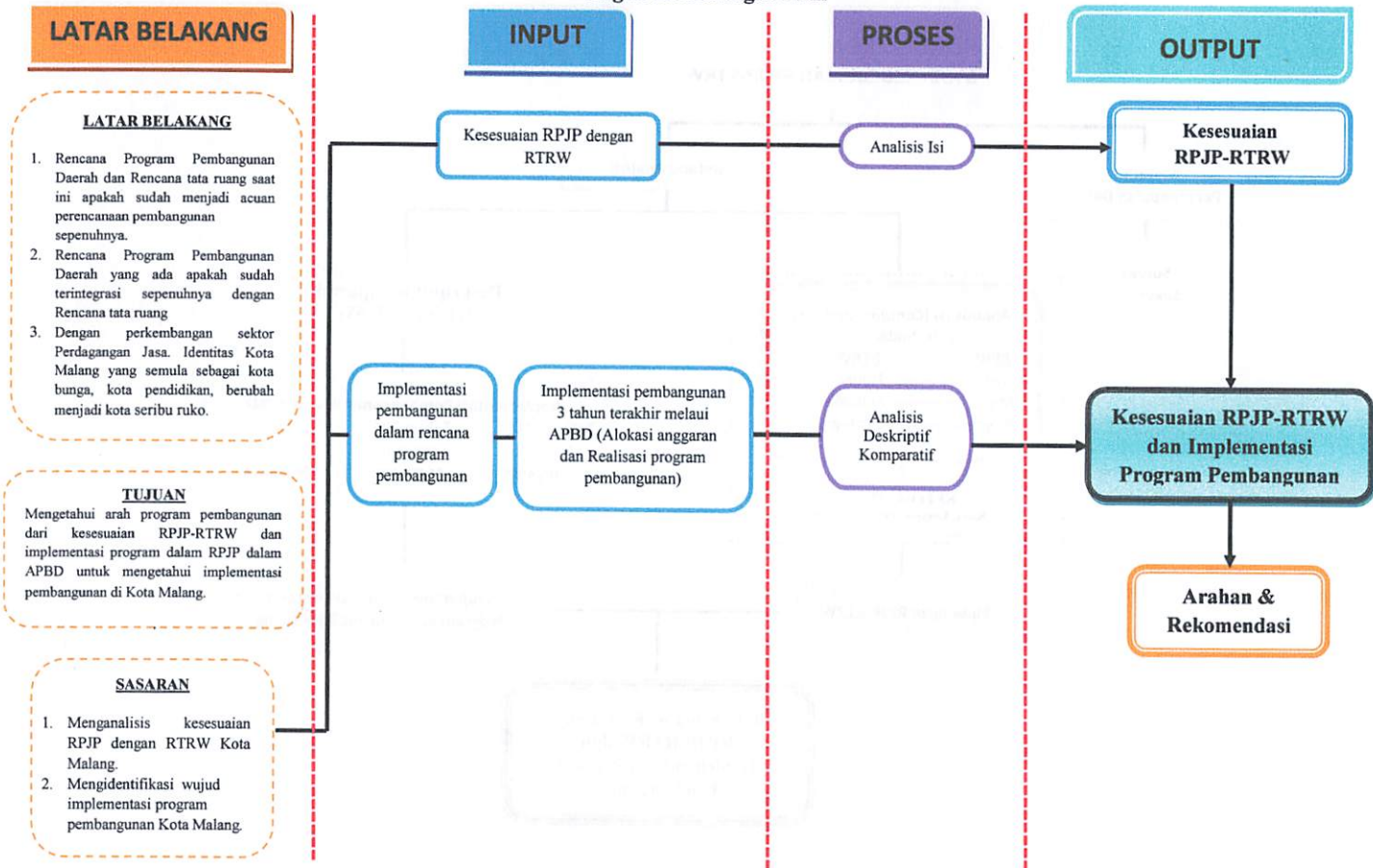
No	Sasaran	Teori	Sumber	Rising Linkup
		<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum daerah - Analisis isu-isu strategis; - visi dan misi daerah - Arah kebijakan; dan - Kaidah pelaksanaan. <p>Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan - Kebijakan - Strategi penataan ruang wilayah kota - Rencana struktur ruang wilayah kota - Rencana pola ruang wilayah kota - Penetapan kawasan strategis kota - Arah pemanfaatan ruang wilayah kota, dan - Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 	<p>evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.</p> <p>Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor : 17 tahun 2009 Tentang Pedoman penyusunan Rencana tata ruang wilayah kota.</p>	<p>RTRW :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan - Kebijakan - Strategi penataan ruang wilayah kota
2.	Mengidentifikasi wujud implementasi rencana program dan rencana tata ruang di Kota Malang	<p>Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana Perimbangan c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 2. Belanja Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung c. Pembiayaan Daerah 	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014</p>	<p>APBD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran - Realisasi program

Sumber : *Kajian Teori*

Bagan 2.6 Kerangka Kerja



Bagan 2.5 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah langkah - langkah yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Pada metodologi penelitian ini akan diuraikan segala hal yang berkenaan dengan cara dan metode yang digunakan pada penyusunan laporan penelitian, diantaranya metode pengumpulan data dan metode analisa. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait tema penelitian, sedangkan metode analisa yaitu teknik atau pendekatan berupa alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data dan informasi.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dengan survey sekunder. Metode pengumpulan data terkait dengan berbagai sumber data dan informasi dari instansi terkait yang ada di wilayah studi. Data-data yang dibutuhkan disesuaikan dengan variabel penelitian, berikut daftar metodologi pengumpulan data.

Pengumpulan data ini merupakan usaha pencarian informasi-informasi mengenai wilayah penulisan yang akan di teliti dengan mencari data melalui studii kepustakaan dan survey instansi pemerintah. Adapun penjelasan dari kegiatan survei sekunder yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yang dimaksudkan adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur dan informasi dari berbagai media yang berhubungan erat dengan studi yang dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisa dan membahas permasalahan yang ada di lokasi studi.

2. Survey Instansi

Pengumpulan data-data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya :

ncanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang untuk
oleh data RPJP dan RTRW di wilayah studi.

antor Bagian Keuangan Kota Malang untuk memperoleh data APBD di
wilayah studi.

3.2 Metode Analisa Data

3.2.1 Analisis kesesuaian RPJP dengan RTRW menggunakan *Content Analysis* (Analisis Isi)

Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Budd, 1967:2). Sementara menurut Berelson (1952), yang kemudian diikuti oleh Kerlinger (1986), analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick 2000:135)¹⁷.

Ada beberapa manfaat dalam menggunakan analisis isi, menurut Wimmer & Dominick 2000:136-138 setidaknya beberapa kegunaan yang dapat dilakukan dalam penelitian analisis isi antara lain :

- Menggambarkan isi komunikasi (*describing communication content*)
- Membandingkan isi media dengan dunia nyata (*comparing media content to the 'real world'*)
- Memperkirakan gambaran kelompok tertentu di masyarakat (*assessing the image of particular groups in society*)
- Mendukung studi efek media massa.

Penggunaan analisis isi dapat digunakan pada dua pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Awal mula harus ada fenomena komunikasi yang diamati adalah arti peneliti terlebih dahulu merumuskan apa yang ingin diteliti dan semua tindakan didasarkan pada tujuan tersebut. Berikutnya adalah memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis. Apabila objek berhubungan dengan data verbal Maka perlu disebutkan tempat, tanggal dan alat komunikasi yang bersangkutan. Namun kalau objek penelitian berhubungan

¹⁷ Andre Yuris, September 2009, Analisis Isi/Content Analysis.
<http://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/#more-320/>. 29-06-2013

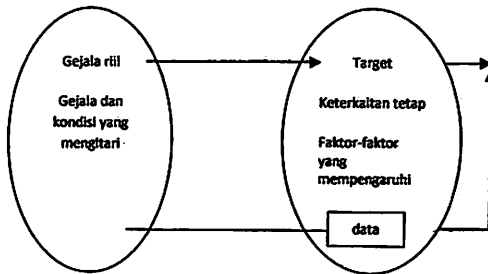
dengan pesan-pesan dalam suatu media, perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media penghantar pesan itu.

Ada beberapa klasifikasi dalam analisis isi. Jenis menjelaskan klasifikasi (Krippendorff, 1991:35-37) sebagai berikut:

- a. Analisis isi pragmatis, dimana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya yang mungkin terjadi.
- b. Analisis isi semantik, dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. Analisis ini terdiri dari 3 jenis berikut:
 - Analisis penunjukan (*designation*), menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (*orang, benda, kelompok atau konsep*) dirujuk.
 - Analisis penyifatan (*attributions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering karakterisasi tertentu dirujuk. Misalnya referensi ketidakjujuran, kenakalan, penipuan dan sebagainya
 - Analisis pernyataan (*assertions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikan secara khusus. Secara kasar disebut analisis tematik misalnya referensi terhadap perilaku penangkapan ikan oleh masyarakat pesisir.
- c. Analisis sarana tanda, dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda.

Disadari bahwa makna simbol dan interaksi amat majemuk sehingga penafsiran ganda terhadap objek simbol tunggal umumnya menjadi fenomena umum dalam penelitian sosial. Oleh karena itu, analisis isi menjadi tantangan yang sangat besar bagi peneliti sendiri sehingga pemahaman dasar terhadap kultur dimana komunikasi itu terjadi amat penting. Kultur ini menjadi muara yang luas terhadap berbagai macam bentuk komunikasi di masyarakat. Berikut ini dibuatkan diagram analisis isi seperti di bawah ini:

Bagan 3.1 Analisis isi (Klaus Krippendorff, 1991:29)



Dua bagian terbesar adalah konteks riil dari data dan konteks yang dibuat oleh analis. Konteks riil data merupakan gejala riil serta kondisi yang mengitarinya. Sementara itu, konteks yang dibuat sendiri oleh peneliti merupakan bagian yang dibangun oleh peneliti berdasarkan target analisis, berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kedua konteks ini akan mempengaruhi analisis isi yang nantinya akan tergambar dalam bangunan analisis yang akan dibuatnya.

Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu (1) merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, (2) melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih, (3) pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis, (4) pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, (5) pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan (6) interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh. Sedangkan menurut Dr. Ir. Sudaryono dalam workshop penyusunan skripsi di bidang PWK langkah-langkah dalam analisis isi yaitu (1) penentuan unit of analysis, (2) pengelompokan atau kategorisasi dari unit analisis (kategori serumpun), (3) pemaknaan unit yang pro dan kontra dari unit-unit yang serumpun berdasarkan karakteristiknya, (4) pemaknaan melalui dialog dengan teks-teks lain atau sumber-sumber teori lain, (5) konseptualisasi/teorisasi hasil dialog.

Gambar 3.1 Contoh operasional Analisis Isi/Content Analysis



Sumber : Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, *Content Analysis* Dalam identifikasi Karakteristik Ekonomi Masyarakat Pesisir Brondong, Kabupaten Lamongan.

Tabel 3.1 Operasional Analisis Isi/Content Dalam Penelitian

INPUT	PROSEDUR KERJA	MANFAAT	KELUARAN
Kesesuaian RPJP-RTRW Kota Malang	(1) penentuan unit of analysis, (2) pengelompokan atau kategorisasi dari unit analisis (kategori serumpun), (3) pemakaian unit yang pro dan kontra dari unit-unit yang serumpun berdasarkan karakteristiknya, (4) pemakaian melalui dialog dengan teks-teks lain atau sumber-sumber teori lain, (5) konseptualisasi/teorisasi hasil dialog.	Mengetahui sinergitas dan ketimpangan masing-masing muatan dalam RPJP-RTRW	Kesesuaian dan ketidakesuaian RPJP-RTRW

Sebelum mengetahui kesesuaian dari materi akan dianalisis terlebih dahulu keterkaitan dari masing-masing muatan produk dengan 3 (tiga) kualifikasi yaitu hubungan kuat, lemah, dan tidak sesuai dengan menggunakan matriks dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kualifikasi keterkaitan RPJP-RTRW

KUALIFIKASI HUBUNGAN	INDIKATOR
Kuat (K)	Jika sebagian besar hubungan dari isi kedua produk sama-sama mencakup kandungan isi, muatan, nama, tempat yang sama
Lemah (L)	Jika hubungan dari kedua produk tersebut hanya sebagian kecil yang mencakup kandungan isi, muatan, nama, tempat dari masing-masing produk
Tidak ada keterkaitan (kosong)	Jika kedua isi atau muatan dari kedua produk tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali

Sumber : Hasil analisa.

Setelah hasil diketahui, akan dicari persentase kesesuaian dan ketidaksesuaian dari RPJP dengan RTRW dengan rumus (Riduan, 2004:71-95) yang dihitung dengan :

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

DP = Deskriptif Persentase (%)

n = Skor yang akan dicari

N = Jumlah data

3.2.2 Analisis wujud implementasi rencana program pembangunan dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan Analisa Deskriptif Komparatif

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program-program pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Malang. Dan ditunjang dengan menggunakan metode analisis tumpang susun maka akan diketahui seberapa besar (persentase) perubahan lahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Semua data yang dianalisis sebagian besar berupa data spasial dalam bentuk peta tematik. Data-data yang dibutuhkan yaitu Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Malang beberapa tahun terakhir dan peta penggunaan lahan eksisting beberapa tahun terakhir.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objeksesuai dengan apa adanya (Best,1982 : 119)¹⁸. Penelitian Deskriptif ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan penelitian metode deskriptif, memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar variabel, mengujihipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (west, 1982). Di samping itu, penelitian deskriptif Juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek

¹⁸<http://www.scribd.com/doc/82508324/Pengertian-Penelitian-Deskriptif.14-06-2013>

yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan¹⁹. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Data-data yang akan dianalisis dalam metode deskriptif komparatif ini berupa program-program pemerintah, anggaran, dan realisasi pembangunan. Gambaran analisisnya sebagai berikut :

Tabel 3.3 Contoh Tabel Alokasi Anggaran dan Pelaksanaan Program

NO	PROJEK/PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM		ORGANISASI	FAKUSIDIKATIF		LOKASI
			Hasil	Isu/tema		Hasil	Jumlah (Rp)	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pada Anak Usia Dini terdapat 100% dengan jumlah anak usia dini sebesar 1 - 5				200.000.000	
		Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (RS)		5. Luas lantai Gedung Sekolah Baru (RS) dengan standar? berapa orang yang akan dibangun			750.000.000	APBN
		Program Peningkatan Rasio Pendidikan 0%	Perbaikan pendidikan 0% atau 100%				100.000.000	APBN
		Peningkatan Biaya Operasional Sekolah		Biaya Operasional Sekolah			100.000.000	APBN

Sumber : Alokasi Anggaran Dan Pelaksanaan Program (MAP UGM)

¹⁹ bk2009.files.wordpress.com/2012/04/makalah.docx. 14-06-2013

BAB IV

GAMBARAN UMUM KESESUAIAN RPJP-RTRW DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1. Gambaran Umum RPJP-RTRW Kota Malang

Berikut adalah muatan, isi dari produk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang menjadi dasar untuk mengetahui kesesuaian dari kedua produk rencana tersebut.

4.1.1. Rencana Program Jangka Panjang (RPJP)

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan dari muatan isi dari RPJP yaitu visi, misi, dan program. Berikut adalah isi dari muatan Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 :

A. Visi :

“Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera”.

1. Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa pembangunan kota Malang ditekankan pada pengembangan bidang pendidikan dalam arti yang sangat luas, selain bidang lainnya.
2. Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan kota Malang dalam mencapai visi harus tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang (kearifan lokal) melalui pengembangan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju kota Metropolitan.
3. Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang. Makna wawasan lingkungan (sosial, budaya, alamiah) dalam pembangunan akan memberikan nilai orientasi pembangunan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan perekonomian (pertumbuhan dan pemerataan ekonomi), tetapi juga

orientasi pada konservasi (conservation orientations), dan berorientasi pada masyarakat (community orientations).

4. Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spirituil. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

B. Misi :

1. Menjadikan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya
3. Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas
4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional
6. Mewujudkan Kota Malang yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan
8. Mewujudkan Kota Malang yang sejahtera.

C. Program

1. Menuju kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal.
 - a. Dalam mewujudkan kota Malang sebagai kota pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal, pembangunan bidang

pendidikan diarahkan untuk dapat tercapai dengan terpenuhinya kondisi sebagai berikut :

- ❖ Terpenuhinya jumlah tenaga kependidikan yang berkualitas (sertifikasi sesuai UU guru dan Dosen) yang memadai di semua level/jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi). Dalam hal ini pemerintah memberikan arahan yang jelas akan ketercapaian kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
 - ❖ Kebijakan politik pemerintah kota yang secara konsisten dan berkelanjutan berorientasi pada kepentingan peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
 - ❖ Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan pendidikan. Hal ini ditandai oleh kenaikan APK (angka partisipasi kasar) dan APM (angka partisipasi murni), berkurangnya angka buta huruf;
 - ❖ Peningkatan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi kelompok masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu secara ekonomi;
 - ❖ Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang unggul, dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh;
 - ❖ Terjangkaunya akses informasi yang mudah melalui kesiapan dan daya dukung masyarakat terhadap laju perkembangan dunia pendidikan berbasis teknologi, melalui JARDIKNAS dan JIS (Jaringan Informasi Sekolah).
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang mampu menjadi rujukan nasional dan global, diarahkan untuk :
- ❖ Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang unggul direalisasikan dengan cara :
 - Pengembangan dan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai dengan standar kompetensi yang diharapkan;

- Terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif dan nyaman;
 - Tersedianya kelengkapan dan peralatan penunjang kegiatan pendidikan yang memadai;
 - Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan;
 - Terbangunnya fasilitas-fasilitas pendidikan untuk masyarakat penyandang cacat.
- ❖ Meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh dengan cara :
- Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
 - Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pengajar yang berorientasi pada standar nasional dan internasional;
 - Pola penjarangan dan penerimaan pelajar/mahasiswa yang obyektif;
 - Penerapan manajemen pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;
 - Penerapan metode pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisien;
 - Menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas dalam berkarya guna menyokong dan memotivasi dunia pendidikan.
- ❖ Akses informasi yang mudah dan terjangkau dengan cara :
- Terbangunnya sistem informasi yang memuat segala aspek terkait dengan dunia pendidikan melalui jaringan informasi sekolah (JIS);
 - Kemudahan akses dan pencapaian informasi skala nasional dan internasional, melalui koneksi jaringan pendidikan kota Malang dengan Jardiknas;
 - Penggunaan teknologi tepat guna dalam penyaluran informasi agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau sasaran dengan baik;

- Promosi nasional dan internasional tentang dunia pendidikan kota Malang;
- Terjalinnya kerjasama yang harmonis antara *stakeholders* yang terkait dan institusi pendidikan di dalam dan luar negeri sebagai konsekwensi pasar bebas dalam kerangka WTO.
- ❖ Kebijakan politik yang berorientasi pada pendidikan diarahkan untuk memberikan kebijakan-kebijakan publik sebagai berikut :
 - Pengambilan kebijakan yang terfokus dan memihak pada kemajuan serta perkembangan pendidikan secara menyeluruh;
 - Pengembangan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan fungsi kawasan;
 - Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu secara ekonomi untuk dapat meningkatkan pendidikannya dengan biaya gratis dan/atau terjangkau;
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas semua *stakeholder* dalam memajukan pendidikan kota Malang;
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah kota melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
 - Peningkatan pengawasan terhadap keberlanjutan program-program pembangunan yang telah disusun;
- ❖ Kesiapan dan daya dukung masyarakat terhadap laju perkembangan dunia pendidikan dengan cara :
 - Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif;
 - Peningkatan kesadaran masyarakat kota Malang tentang arah pembangunan kota Malang terkait visi dan misi tentang pendidikan;
 - Terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan Kota Malang;

- Terjalinnnya simbiosis mutualisme antara 3 (tiga) elemen terkait yaitu pemerintah, dunia pendidikan dan masyarakat.
2. Terwujudnya SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbudaya.
- a. Terwujudnya visi kota Malang dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada nilai agama, etika dan sosial budaya secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani.
 - b. Terwujudnya masyarakat Kota Malang yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, makmur, serta berakhlak mulia. Terwujudnya tujuan kota Malang dalam pembangunan bidang sumber daya manusia dan Iptek dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - ❖ Kualitas SDM yang kompeten dan berdaya saing dalam pembangunan Iptek;
 - ❖ Terciptanya pemahaman masyarakat kota Malang akan pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kota;
 - ❖ Terwujudnya partisipasi konkrit masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Arah pembangunan sumber daya manusia dan Iptek diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial, dasar peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat kota Malang menuju persaingan nasional dan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat kota Malang di segala bidang. Ada 4 (empat) aspek yang penting dalam membangun SDM berkualitas untuk konsep perencanaan pembangunan kota Malang yaitu :
 - ❖ Kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing global ditingkatkan dengan cara:

- Perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh sektor industri dan jasa;
 - Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global;
 - Tersedianya lembaga pelatihan dan keahlian dalam mencetak tenaga terampil;
 - Penguasaan teknologi dan informasi dalam percaturan global;
 - Penyaluran tenaga kerja dengan satu sistem koordinasi yang kompeten.
- ◆ Partisipasi masyarakat di segala bidang ditingkatkan dengan cara:
- Peningkatan kualitas media informasi yang mencakup pembangunan dan pengembangan di segala bidang;
 - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat kota Malang sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman;
 - Pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis (*learning and critical society*);
 - Terciptanya media cetak dan elektronik sebagai wadah dalam pencapaian informasi terkini;
 - Terciptanya pemahaman masyarakat akan pentingnya aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan kota.
- d. Keberhasilan dalam membangun SDM berkualitas, diarahkan untuk:
- ◆ Peningkatan IPM atau indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*);
 - ◆ Peningkatan indeks daya saing sumber daya manusia;
 - ◆ Peningkatan pengguna media informasi baik informasi cetak maupun elektronik;

- ❖ Peningkatkan jumlah tenaga kerja yang handal dan terampil dalam skala regional, nasional dan global;
 - ❖ Terciptanya kesejahteraan yang merata dalam masyarakat kota Malang.
3. Terwujudnya lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan cara :
- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang unggul dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan di kota Malang ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di semua level pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi.
 - b. Dalam rangka menciptakan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan, maka pemerintah kota Malang diarahkan untuk membuat kebijakan-kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya dan aktifitas yang kondusif bagi proses pendidikan di kota Malang.
 - c. Pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan dalam bentuk pusat-pusat penelitian dan pengembangan, pusat sumber (*resource centers*), museum dan tinggalan-tinggalan sejarah kota (*heritage building conservation*) sebagai sumber belajar.
 - d. Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan kota pada masa kolonial merupakan asset yang dapat menjadi sumber-sumber kajian bidang arsitektur dan planologi, sebagai “museum” kota. Pemerintah kota diarahkan untuk memberikan kebijakan pelestarian bangunan melalui perda yang dapat disepakati dan dijalankan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kerangka membangun sumber-sumber ilmu dari lingkungan (alam maupun buatan).
 - e. Fasilitas penunjang kegiatan pendidikan seperti *convention hall*, *community hall* yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan event berskala nasional di bidang ilmiah dan ekspose hasil-hasil penelitian

ilmiah dari satuan pendidikan secara berkala. Fasilitas ini juga ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisata pendidikan di kota Malang.

- f. Pemanfaatan ICT dalam pengembangan pendidikan dalam rangka memperluas akses informasi teknologi, melalui pengembangan fasilitas *wifi* untuk kemudahan akses informasi berbasis internet Jardiknas dan JIS diarahkan untuk menuju “*silicon valley*” yang berbudaya dengan kearifan lokal.
 - g. Kebijakan pengembangan pendidikan oleh pemerintah dilakukan dengan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).
4. Pengembangan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
- a. Mewujudkan Kota Malang hijau lestari, sejuk melalui pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dilakukan dengan mendorong pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota agar mampu mendukung dan memfasilitasi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - b. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, maka pemanfaatan ruang kota harus mengakomodir seluas-luasnya kepentingan masyarakat, serta mendukung keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 %, secara proporsional. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro lingkungan kota. Dalam mewujudkan tujuan kota Malang dalam pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan diarahkan untuk dapat tercapainya hal-hal sebagai berikut :
 - ❖ Sistem perencanaan pembangunan kota Malang yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas sosialisasi dan informasi

substansi perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan;

- ❖ Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah. Perlu disadari kembali esensi pemanfaatan ruang kota adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat seperti diamanahkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional;
- ❖ Upaya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dilakukan untuk lebih pemeratakan perkembangan dan pertumbuhan fisik kota kearah wilayah dan bagian wilayah kota di segenap pelosok-pelosok kota. Sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan kota yang serasi, seimbang dan terpadu secara keseluruhan;
- ❖ Kebijakan pemanfaatan ruang oleh pemerintah didorong untuk mewujudkan penyediaan ruang terbuka (publik maupun privat) sebesar 30 % secara berkelanjutan. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro lingkungan kota.
- ❖ Partisipasi seluruh *stakeholders* yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan warga kota Malang pemerintah dan swasta dapat menjamin keberlanjutan pembangunan kota Malang;
- ❖ Sinergi dan kerjasama antar wilayah dan antar daerah. Dalam rangka meningkatkan peran dan hasil upaya pengembangan wilayah dan infrastruktur kota, diperlukan sinergi untuk menghasilkan saling penerian dan kerjasama antar wilayah sekitar (Pemkot Batu dan Pemkab Malang). Dengan pendekatan perencanaan wilayah secara terpadu Malang Raya, akan mengakomodir berbagai kepentingan wilayah secara menyeluruh dan terpadu satu dengan yang lain;
- ❖ Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang seimbang dengan pengembangan kota Malang, maupun seimbang bagi perkembangan wilayah Malang Raya dan kepentingan wilayah Kabupaten-kabupaten Bagian Selatan Propinsi Jawa Timur;
- ❖ Terciptanya arah pembangunan dan pengembangan kota Malang yang terarah dan jelas.

- c. Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota Malang melalui kebijakan-kebijakan;
- ❖ Pemanfaatan kawasan Tepi Air DAS untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Malang;
 - ❖ Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya sungai, dengan memperhatikan kapasitas dan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - ❖ Terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antarmoda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan.
 - ❖ Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha.
 - ❖ Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi.
 - ❖ Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.
 - ❖ Peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur.
- d. Aspek-aspek penting dalam pembangunan sarana dan prasarana, yaitu :
- ❖ Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur kota Malang dikuatkan dengan cara :
 - Pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu, baik makro maupun mikro;
 - Pengembangan mekanisme baku perencanaan pembangunan infrastruktur secara partisipatif;
 - Pengembangan sistem sosialisasi publik terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang aksesibel;
 - Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pembangunan infrastruktur;
 - Perencanaan yang mengedepankan sisi orientasi dan urgensi kebutuhan.

- ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih dikembangkan dengan cara:
 - Pengelolaan sumber daya air yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
 - Mengembangkan sumber air bersih melalui pengelolaan potensi air sungai secara berkelanjutan;
 - Penurunan tingkat polusi ke dalam sumber-sumber air bersih;
 - Penerapan sistem daur ulang dengan tetap menjaga kualitas dan kehiגעnisannya;
 - Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sebagai air yang memenuhi baku mutu standar air minum secara internasional.
- ❖ Sistem transportasi dikembangkan dengan cara :
 - Peningkatan kesalingterhubungan antar seluruh wilayah kota Malang yang mendorong pertumbuhan wilayah Malang Raya yang mendorong pertumbuhan wilayah internal dan eksternal yang merata;
 - Pola pergerakan kendaraan yang saat ini "*linier concentric*" diubah menjadi "*radial concentric*", artinya pemerintah kota harus segera mengembangkan jalan-jalan *inner ringroad* dan *outer ringroad* sebagai pemecah pergerakan sirkulasi kendaraan eksternal dan sirkulasi kendaraan pergerakan lokal. Segera direalisasikan pengembangan jaringan jalan Lingkar Timur dan Lingkar Barat, serta Lingkar Utara;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas jalur pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor yang aman dan nyaman;
 - Pengembangan moda transportasi yang menunjang koneksitas dengan daerah *hinterland*, melalui pengembangan transportasi massal. Pengembangan Kereta Api Commuter (Kepanjen-Malang-Lawang) dan Jalur-jalur Bus Kota merupakan alternatif

mengurangi kesemrawutan lalu lintas, serta penghematan penggunaan BBM yang berdampak mengurangi eksploitasi SDA secara berlebihan dan pengendalian polusi moda transportasi.

- ❖ Perumahan dan permukiman dikembangkan dengan cara :
 - Pengembangan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas perumahan dan prasarana-sarana permukiman;
 - Pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat kota Malang, dan didukung oleh prasarana sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, mandiri, dan efisien;
 - Ketersediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan ketentuan, dalam rangka mencapai ketentuan ketersediaan 30 % ruang terbuka di wilayah kota Malang secara berkelanjutan;
 - Pengembangan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - Terciptanya perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - Terealisasinya sarana prasarana permukiman yang berkualitas dan dikelola secara profesional, mandiri dan efisien.
- ❖ Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kota Malang ditingkatkan dengan cara :
 - Peningkatan kesadaran dan partisipasi warga kota Malang dalam pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip keterpaduan;
 - Peningkatan manajemen pengawasan dalam rangka mengurangi tingkat penyimpangan dan rencana yang telah ditetapkan;
 - Prioritas terhadap daerah yang benar-benar membutuhkan;
 - Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur;

- Pengembangan infrastruktur kota Malang disesuaikan dengan fungsi kawasan sebagai salah satu landasan dalam pengoptimalan fungsinya.
- ❖ Fungsi tata ruang wilayah dimanfaatkan secara konsisten sesuai perencanaan sebagai acuan dan arah koordinasi pembangunan. Konsistensi terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang dikendalikan dengan cara :
 - Peningkatan pengawasan dan penerapan *law enforcement* tata ruang yang efektif;
 - Penyeimbangan rasio lahan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan kota Malang;
 - Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan;
 - Perwujudan pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan terbuka dan *non*-lahan terbuka. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir, kelangkaan sumber air bersih, *aglomerasi* yang tidak terkendali (*unmanageable urban agglomerations*);
 - Penerapan sanksi yang jelas terhadap penggunaan lahan yang melanggar RTRW kota Malang (Sesuai dengan ketentuan UU tata Ruang No. 26 Tahun 2007);
 - Pentingnya dibuat kebijakan publik tentang pemberian insentif (bonus) bagi masyarakat yang memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan penyediaan ruang-ruang publik/terbuka yang berdampak positif bagi lingkungan kota Malang.
- ❖ Pertumbuhan wilayah dan sinergi antar wilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antar wilayah dilakukan untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara daerah sekitarnya dengan cara :
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;

- Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan sekitar Malang dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antara daerah sekitarnya;
- e. Sasaran keberhasilan dalam pengembangan wilayah dan infrastruktur kota, adalah sebagai berikut :
- ❖ Meningkatnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur kota Malang;
 - ❖ Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), melalui penataan kembali kawasan tepi Air di sepanjang DAS yang melintas kota Malang, disamping tetap terjaganya RTH yang telah ada, dalam rangka mewujudkan ketersediaan minimal ruang terbuka (privat dan publik) sebesar 30 %;
 - ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, capaian pelayanan harus lebih ditingkatkan agar mencapai minimal 80% sebagai standar pelayanan air bersih untuk predikat Kota Sehat;
 - ❖ Menurunnya unsur polutan dan gas buang kendaraan bermotor;
 - ❖ Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan moda transportasi massal;
 - ❖ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan bagi seluruh warga kota Malang;
 - ❖ Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman serta keseimbangan rasio lahan dan pengembangan infrastruktur kota Malang;
 - ❖ Adanya jaringan komunikasi dan informasi tentang pembangunan daerah atau daerah lain, nasional, dan internasional, serta jaringan guna membangun akses-akses pasar, dana, investor, data basis berbagai daerah. Jaringan ini sekaligus berfungsi sebagai jaringan publikasi dan sosialisasi program daerah yang ditawarkan kepada masyarakat luas.

5. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan.
- a. Mewujudkan visi kota Malang sebagai kota pendidikan yang didorong oleh keberhasilan kegiatan perdagangan dan jasa yang unggul dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan dengan upaya memberdayakan masyarakat kelompok ekonomi lemah dan mendorong kelompok ekonomi menengah dan besar sebagai kesatuan aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung.
 - b. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - ❖ Tata kelola ekonomi yang terpadu, aksesibel, dan berkelanjutan;
 - ❖ Diperlukan perubahan dalam kebijakan-kebijakan fiskal, yang mampu mendorong masuknya investor, pemanfaatan dana-dana yang tersedia seperti SCR, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih baik;
 - ❖ Kapasitas pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif, Kinerja sektor jasa keuangan yang profesional;
 - ❖ Tata kelola industri kecil dan menengah yang unggul.
 - c. Arah pembangunan ekonomi kota Malang diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya di kota Malang, pengembangan kekuatan ekonomi lokal; peningkatan produktivitas dan inovasi; pengembangan keuangan daerah. Ada 5 (lima) aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi untuk konsep perencanaan pembangunan kota Malang yaitu :
 - ❖ Peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator ditujukan guna menjaga keberlanjutan perekonomian kota Malang. Peningkatan terhadap peranan pemerintah dilakukan dengan :
 - Pengembangan kerangka regulasi *non* diskriminatif tata perekonomian Kota Malang, penyiapan menuju pasar bebas;

- Peningkatan iklim usaha, dan investasi yang menjamin keberlanjutan perekonomian kota;
 - Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah penyangga, regional, nasional dan global;
 - Penataan sektor formal dan informal yang memperhatikan harmonisasi *setting* sosial, kultural, estetika, dan lingkungan di kota Malang;
 - Fasilitasi terciptanya lapangan kerja formal dan informal;
 - Peningkatan aktifitas pemasaran produk yang dihasilkan dan kota Malang.
- ❖ Kemitraan dalam pengelolaan sumber daya di kota Malang ditingkatkan dengan cara :
- Penataan sektor formal dan informal kota Malang yang memperhatikan harmonisasi *setting* sosial, kultural, estetika, dan lingkungan;
 - Peningkatan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya produktif;
 - Peningkatan intensifikasi jaringan usaha lintas pelaku;
 - Penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan;
 - Menumbuhkembangkan sektor informal yang mengerucut pada sosial kemasyarakatan.
- ❖ Kekuatan ekonomi kota Malang dikembangkan dengan cara :
- Peningkatan dan memantapkan kapasitas kewirausahaan masyarakat;
 - Pengembangan sarana dan prasarana *public* yang berbasis keberlanjutan lingkungan;
 - Pengembangan etos pelayanan di bidang jasa;
 - Memperkuat jaringan dan pangsa pasar produk-produk lokal hingga ke luar daerah, bahkan ke luar negeri (pasar bebas);
 - Mendukung penuh usaha-usaha menengah kebawah sebagai akar perekonomian lokal kota Malang.

- ❖ Produktivitas dan inovasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan melalui:
 - Peningkatan kapasitas warga kota Malang dalam pengelolaan sumber daya produktif, dan penguasaan teknologi;
 - Pengembangan diversifikasi produk layanan jasa;
 - Penciptaan dan pengembangan pusat pendidikan yang berbasis kompetensi sektor jasa;
 - Peningkatan mutu keserasian sumber daya produktif yang ramah lingkungan;
 - Terciptanya lembaga yang menaungi inovasi masyarakat diberbagai bidang.
 - ❖ Keuangan daerah dikembangkan melalui cara :
 - Pengembangan manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif;
 - Revitalisasi sektor jasa keuangan;
 - Peningkatan kemampuan fiskal daerah yang adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat;
 - Peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih dan pembayar pajak;
 - Transparansi terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah.
- d. Sasaran keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang, tersebut dilakukan dengan melihat indikator-indikator sebagai berikut :
- ❖ Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya produktif;
 - ❖ Meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Malang;
 - ❖ Meningkatnya indeks daya beli masyarakat;
 - ❖ Meningkatnya investasi di Kota Malang;
 - ❖ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang.

6. Mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum.

- a. Mewujudkan visi kota Malang dengan menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good and clean governance*) dengan upaya pengembangan budaya tertib hukum disemua lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan kota Malang yang demokratis berlandaskan atas hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila. Prasyarat utama dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan bidang politik kota Malang terdiri dari :
- ❖ Partisipasi politik warga kota yang tinggi;
 - ❖ Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik;
 - ❖ Lembaga-lembaga publik yang efektif;
 - ❖ Budaya politik yang sehat;
 - ❖ Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses.
- b. Enam aspek yang penting dalam Politik untuk konsep perencanaan pembangunan yaitu :
- ❖ Arah pembangunan politik Indonesia khususnya kota Malang diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan *citizenship* (hak, kewajiban, dan etika politik warga kota) dengan cara :
 - Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
 - Peningkatan efektivitas lembaga dan partai politik;
 - Pengembangan budaya politik yang sehat;
 - Penyediaan media komunikasi politik;
 - Peningkatan hubungan antar daerah dan atau luar negeri.
 - ❖ Pelaksanaan kebijakan publik diwujudkan melalui penyelenggaraan :
 - Penyelenggaraan dan penyediaan instrumentasi dan media pembelajaran hak dan kewajiban berpolitik;
 - Pelembagaan sistem pembelajaran kepedulian terhadap kota secara berkelanjutan;
 - Terselenggaranya panitia penyusunan program pembelajaran tentang kebijakan publik tentang tata cara berpolitik;

- Realisasi program-program yang telah disusun dan disepakati bersama;
- Penghayatan dan pelaksanaan berpolitik.
- ❖ Kualitas tatalaksana pengawasan kinerja badan-badan publik ditingkatkan dengan cara :
 - Penyediaan mekanisme dan media pengawasan kinerja badan-badan publik;
 - Peningkatan pemahaman publik tentang program anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (anti-KKN);
 - Penyediaan wadah aspirasi dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan publik;
 - Penetapan *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap kualitas pelayanan badan-badan publik;
 - Transparansi dan mekanisme penanganan terhadap segala kasus yang berkenaan dengan kebijakan publik.
- ❖ Keefektivitasan lembaga pemerintahan kota, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan ditingkatkan dengan :
 - Pengayaan alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasi aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat;
 - Peningkatan hubungan antar daerah di bidang politik, sosial kemasyarakatan;
 - Peningkatan pemahaman publik tentang program dan kinerja kebijakan publik;
 - Realisasi dari program-program yang telah disusun dan disepakati bersama;
 - Pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan program kebijakan publik.
- ❖ Pengembangan budaya politik yang sehat dilakukan dengan :

- Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (*egalitarianism*), anti kekerasan, toleransi politik, keadilan dan orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media;
 - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pengenalan dan pengamalan cara berpolitik yang sehat dalam segala bentuknya;
 - Peningkatan kualitas dan jumlah partisipasi *stakeholders* kota dalam penetapan kebijakan publik.
- ❖ Media komunikasi politik disediakan dengan cara:
- Perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis;
 - Perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media massa yang independent;
 - Penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat;
 - Kemudahan akses alur informasi;
 - Perwujudan media sebagai sarana penyampaian informasi dan berita terbaru.
- c. Sasaran keberhasilan dalam mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berdasarkan Atas Hukum antara lain adalah :
- ❖ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
 - ❖ Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara berpolitik;
 - ❖ Meningkatnya *Good Governance* dalam tata kelola badan-badan publik;

- ❖ Meningkatnya kualitas dan jumlah partisipasi *stakeholders* kota dalam penyelenggaraan tata kelola kota mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- ❖ Meningkatnya komunikasi yang interaktif dan pemerintah dan masyarakat secara intensif.

7. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Dan Aparatur Yang Professional.

- a. Mewujudkan visi kota Malang dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.
- b. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip—prinsip supremasi hukum, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas didukung dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip "*Good Governance and Clean Government*".
- c. Lima aspek penting dalam politik untuk konsep perencanaan pembangunan yaitu:
 - ❖ Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten serta mencerminkan ketertiban dan keadilan. Dapat tercapai apabila:
 - Produk hukum yang berkeadilan;
 - Penegakan hukum yang konsisten dan efektif;
 - Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan;
 - Partisipasi dan tanggungjawab warga kota yang tinggi;
 - Tingginya kesadaran masyarakat akan hukum dan tertib kota.
 - ❖ Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, dengan cara:
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah kota Malang;

- Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional;
- Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan anti KKN.
- ❖ Terwujudnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan penyelenggaraan pemerintah kota Malang;
 - Meningkatnya efisiensi fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan;
 - Meningkatnya efektifitas fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan;
 - Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pemerintahan;
 - Meningkatnya pengawasan kinerja kelembagaan pemerintahan.
- ❖ Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* pemerintah kota Malang :
 - Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan;
 - Meningkatnya transparansi pemerintahan;
 - Meningkatnya responsibilitas pemerintahan;
 - Meningkatkan kewajaran pemerintahan.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum ditujukan untuk peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum dengan cara :
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - Peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan perubahan sistem politik yang mendukung penegakan hukum;
 - Penegakan peraturan daerah secara konsisten;
 - Penegakan hukum tanpa memandang kepentingan pribadi ataupun golongan;
 - Peningkatan kinerja penegak hukum secara profesional.
- d. Sasaran keberhasilan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional;
 - ❖ Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *Good Governance and Clean Government*;
 - ❖ Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegakan hukum

- ❖ Meningkatkan kepuasan warga terhadap layanan publik;
 - ❖ Terselenggaranya penegakan hukum tanpa memandang kepentingan pribadi ataupun golongan.
8. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa-
- a. Masyarakat Malang yang agamis adalah wujud masyarakat Malang di masa 20 tahun mendatang yang mencirikan karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta berkehidupan harmonis, didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - b. Arah pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis, dicapai melalui: Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, meliputi:
 - ❖ Peningkatan kualitas kehidupan beragama, diarahkan dengan;
 - Meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas kemudahan umat dalam menjalankan ibadahnya;
 - Mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di dalam keluarga dan sekolah-sekolah menuju terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia;
 - Membangun fasilitas peribadatan sesuai dengan tingkatan kebutuhannya.
 - ❖ Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, diarahkan dengan:
 - Mendorong upaya peningkatan kualitas kerukunan hidup antar umat beragama;
 - Mendorong upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;

- Mengembangkan kesadaran diri mengenai realitas multikulturalisme dan makna kemajemukan sosial;
 - Mendorong upaya penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Arah pembangunan untuk meningkatkan kualitas moral aparatur daerah menuju tata pemerintahan yang amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah, dicapai melalui: Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah; Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah; dan Pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
9. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
- a. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan dengan :
 - ❖ Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah;
 - ❖ Mewujudkan penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - ❖ Mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.
 - b. Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang daerah diarahkan dengan:
 - ❖ Menekankan fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan daerah;
 - ❖ Mengembangkan Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara sistematis komprehensif untuk mengurangi konflik kepentingan-baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok.
 - c. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan diarahkan dengan:
 - ❖ Merencanakan seluruh fungsi dan manfaat SDA secara seimbang dan memperhatikan daya dukung serta kemampuan pulih alaminya;

- ❖ Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam yang telah berada dalam kondisi kritis hingga pulih daya dukungnya;
 - ❖ Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam rangka menuju realisasi ketersediaan ruang terbuka (publik dan privat) sebesar 30 %;
 - ❖ Memanfaatkan aspek-aspek tak berwujud SDA seperti jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - ❖ Meningkatkan upaya-upaya untuk melestarikan aset lingkungan buatan dalam bentuk bangunan-bangunan dan lingkungan yang memiliki nilai historis dan nilai keilmuan seperti diamankan dalam UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui pendidikan dan kampanye penyadaran fungsi lingkungan diarahkan dengan :
- ❖ Meningkatkan intensitas penanaman kecintaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup, dan lingkungan buatan yang bernilai historis terutama bagi generasi muda;
 - ❖ Meningkatkan jumlah generasi muda penggerak dan peduli terhadap isu sumber daya alam, lingkungan hidup;
 - ❖ Meningkatkan sosialisasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam peri kehidupan sehari-hari.
- e. Pengenalan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diarahkan dengan :
- ❖ Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang rehabilitasi kerusakan lingkungan;
 - ❖ Mensosialisasikan strategi dan teknik pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - ❖ Mensosialisasikan strategi dan teknik pengendalian pelestarian bangunan dan/atau lingkungan yang memiliki nilai historis dan nilai keilmuan;

- ❖ Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi kualitas lingkungan.
- f. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan dengan :
- ❖ Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - ❖ Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - ❖ Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya dalam pelestarian lingkungan alam maupun buatan yang mendudukkannya sebagai aset kota;
 - ❖ Menekankan bahwa pola hidup sehat dan seimbang memberikan manfaat yang besar bagi ke lingkungan hidup.

10. Mewujudkan Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera

- a. Pembangunan di bidang kesehatan masyarakat dalam 20 tahun kedepan secara umum diarahkan untuk terwujudnya kota Malang sebagai kota sehat dalam arti yang luas, yang ditandai oleh kondisi masyarakat yang (1) hidup dilingkungan yang sehat, (2) mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, (3) mampu menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga (4) memiliki derajat kesehatan yang tinggi.
- b. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat maka strategi yang dijalankan adalah :
- ❖ Meningkatkan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat,
 - ❖ Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan;
 - ❖ Meningkatkan upaya kesehatan yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan balita, anak usia sekolah dan lansia serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - ❖ Meningkatkan penyehatan lingkungan.
- c. Peningkatan layanan kesehatan dalam rangka pengendalian terhadap Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan dengan :

- ❖ Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas;
 - ❖ Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - ❖ Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - ❖ Peningkatan peran pemerintah Indonesia dalam mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial;
 - ❖ Pengenalan pendidikan seks dan reproduksi sejak dini serta gambaran keluarga ideal.
- d. Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial dasar ditingkatkan melalui :
- ❖ Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan;
 - ❖ Perbaikan perilaku hidup sehat masyarakat;
 - ❖ Peningkatan kualitas gizi masyarakat;
 - ❖ Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat rentan;
 - ❖ Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
- e. Kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dilakukan dengan memfasilitasi, mendorong melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat diarahkan dengan :
- ❖ Meningkatkan upaya penciptaan sebanyak mungkin peluang dan lapangan kerja formal maupun informal;

- ❖ Mendorong upaya peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula;
 - ❖ Meningkatkan dukungan program-program pelatihan strategis dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi sumber daya manusia;
 - ❖ Mengembangkan sistem pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global;
 - ❖ Mengembangkan pasar kerja yang fleksibel, keselamatan kerja yang memadai, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antar semua pihak yang berkepentingan.
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat diarahkan dengan :
- ❖ Meningkatkan upaya penciptaan sebanyak mungkin peluang dan lapangan kerja formal maupun informal;
 - ❖ Mendorong upaya peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula;
 - ❖ Meningkatkan dukungan program-program pelatihan strategis dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi sumber daya manusia;
 - ❖ Mengembangkan sistem pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global;
 - ❖ Mengembangkan pasar kerja yang fleksibel, keselamatan kerja yang memadai, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antar semua pihak yang berkepentingan.
- g. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan dengan :
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - ❖ Memantapkan dukungan sistem hukum dan perlindungan sosial;
 - ❖ Menyediakan sarana pelayanan sosial yang memadai;
 - ❖ Meningkatkan derajat melalui pembentukan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat;

- ❖ Memantapkan mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap;
 - ❖ Membina kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
- h. Pengembangan sistem jaminan sosial diarahkan dengan :
- ❖ Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi lemah (tidak mampu) hingga sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - ❖ Mengembangkan budaya tolong menolong sebagai tradisi yang telah berakar di masyarakat.
- i. Pemberdayaan peran Perempuan diarahkan dengan :
- ❖ Meningkatkan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
 - ❖ Menurunkan intensitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - ❖ Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di daerah;
 - ❖ Mendorong terbentuknya Keluarga yang ideal melalui Keluarga Berencana.

4.1.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan muatan isi RTRW Kota Malang yang ditentukan dalam ruang lingkup penelitian ini yaitu Tujuan, Kebijakan, dan Strategi, berikut adalah Peraturan daerah kota Malang Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana tata ruang wilayah kota Malang Tahun 2010 – 2030 :

A. Tujuan :

1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota.

B. Kebijakan :**1. Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kota :**

- a. Kebijakan Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan pada kesiapan dan kenyamanan Kota Malang sebagai kota yang melayani kegiatan skala nasional;
- b. Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional diarahkan pada kemudahan akses dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala regional;
- c. Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya diarahkan pada kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Malang;
- d. Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala regional dan/atau skala wilayah kota, skala sub wilayah kota, dan skala lingkungan wilayah kota;
- e. Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah kota, dengan cara :
 - ❖ Penyediaan prasarana dan sarana kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
 - ❖ Penyediaan utilitas kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
 - ❖ Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air, serta pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota;
 - ❖ Peningkatan luas RTH sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;
 - ❖ Pengarahan perkembangan kawasan perumahan sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - ❖ Peran serta dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

2. Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kota.

- a. Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- b. Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota serta pertahanan dan keamanan.

3. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota :

Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).

C. Strategi

1. Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota.

- a. Strategi Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi :
 - ❖ Mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional;
 - ❖ Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan nasional.
- b. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, meliputi :
 - ❖ Mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala regional;
 - ❖ Mendukung pengembangan transportasi kereta api komuter;
 - ❖ Mengarahkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada skala regional;
 - ❖ Mengarahkan perkembangan perdagangan dan jasa pada jalur regional;
 - ❖ Mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan pergudangan pada kawasan perbatasan kota;

- ◆ Mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal;
 - ◆ Meningkatkan pengembangan kawasan yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan regional.
- c. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, meliputi :
- ◆ Mendorong sektor pendukung pariwisata yang melayani kawasan Malang Raya;
 - ◆ Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan Malang Raya;
 - ◆ Menjalin kerja sama dengan daerah otonom kawasan Malang Raya untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan kota;
 - ◆ Meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor perdagangan dan jasa yang mengarah pada pendukung sektor pariwisata.
- d. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang, meliputi :
- ◆ Menetapkan dan memantapkan kawasan alun-alun sebagai pusat pelayanan kota;
 - ◆ Menetapkan pembagian wilayah Kota Malang menjadi 5 (lima) sub pusat pelayanan kota;
 - ◆ Mengembangkan sub pusat pelayanan Kota secara merata;
 - ◆ Mengembangkan pusat-pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota secara proporsional;
 - ◆ Menghubungkan antar sub pusat kota dan antara masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata;
 - ◆ Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang;
 - ◆ Mengarahkan sentra-sentra budidaya yang mendukung pelayanan skala pusat kota dan sub pusat kota;

- ❖ Mengembangkan jaringan pusat kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan yang berhierarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota menuju pusat kota;
 - ❖ Mendorong pembangunan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan yang selaras dan seimbang;
 - ❖ Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat pada sub wilayah kota secara merata.
- e. Strategi Pengembangan prasarana wilayah Kota Malang, meliputi :
- ❖ Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan raya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat kota, dengan upaya :
 - o Mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, berupa pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan;
 - o Mengkondisikan kembali fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;
 - o Membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat;
 - o Meningkatkan kapasitas ruas jalan utama kota.
 - ❖ Mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya :
 - o Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum;
 - o Mengadakan angkutan umum massal meliputi angkutan umum bus metro, bus kota dan kereta api komuter;
 - o Membangun halte khusus untuk bus metro, bus kota, dan angkutan kota (angkot) sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan berfungsi untuk mencegah kemacetan;
 - o Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang beroperasinya sarana transportasi.
 - ❖ Mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya :

- o Meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal dan sub terminal;
 - o Mengalihfungsikan Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi;
 - o Membangun terminal kargo di sekitar jalan lingkar sebagai terminal angkutan barang;
 - o Membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan bermotor (uji KIR);
 - o Membangun stasiun (shelter) dan halte baru dalam mendukung rencana pengembangan kereta api komuter dan angkutan umum bus kota (Bus Rapid Transit).
- ◆ Mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya :
- o Menambah sarana penunjang jalan;
 - o Meremajakan dan memperbaharui kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik; dan
 - o Mengoptimalkan keberadaan sempadan rel kereta api.
- ◆ Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan, dengan upaya :
- o Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku ke seluruh wilayah perkotaan;
 - o Membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga listrik ke sub wilayah Malang Timur dan Malang Tenggara;
 - o Mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan;
 - o Mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh wilayah perkotaan;

- Menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya.
- ◆ Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya :
 - Mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman;
 - Menyediakan sarana prasarana telematika dengan mengikuti karakteristik kebutuhan di masing-masing sub wilayah kota dan pembangunannya mengikuti pola pembangunan transportasi baik pada jalan arteri, kolektor maupun lokal;
 - Menempatkan telepon umum dan warung telekomunikasi (wartel) pada pusat perbelanjaan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, pusat lingkungan, pusat pelayanan umum, terminal, dan sekitar permukiman;
 - Menempatkan hot spot yang diarahkan pada ruang-ruang publik utama di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran;
 - Menetapkan pemanfaatan tower bersama dalam penyediaan antena telekomunikasi.
- ◆ Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya :
 - Memperbaiki/normalisasi saluran irigasi;
 - Meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian yang ada di kota;
 - Memisahkan saluran irigasi dengan saluran drainase kota;
 - Memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air di wilayah kota;
 - Mengendalikan daya rusak air;
 - Mengoptimalkan keberadaan sempadan sungai;
 - Mengembangkan prasarana konservasi sumber daya air untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan sumber daya air.
- ◆ Mengembangkan sistem penyediaan air minum kota, dengan upaya :

- Menambah tingkat pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi 90% yang dapat menjangkau semua wilayah dengan menambah sambungan rumah tangga;
 - Meningkatkan kualitas air bersih secara bertahap sehingga dapat berkembang menjadi air minum;
 - Mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara kapasitas dan volume air bersih dengan jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menambah kapasitas dan volume sistem tandon (reservoir) sebagai sistem distribusi ke pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - Menambah sumber mata air selain dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah secara terbatas.
- ◆ Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya :
- Mengolah limbah on site system diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematuan;
 - Mengolah limbah dengan off site system, melalui :
 - Menangani Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Supiturang supaya tidak menimbulkan pencemaran;
 - Mengoptimalkan penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - Memantau dan mengarahkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada bangunan-bangunan yang memproduksi air limbah secara periodik;
 - Mengarahkan dan/atau mengembangkan pengolahan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat dan bantaran sungai.
- ◆ Mengembangkan sistem persampahan, dengan upaya :
- Mengatur volume sampah melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan/Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan rumah tangga;

- Membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) di beberapa lokasi yang membutuhkan terutama pada kelurahan/daerah yang tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan jarak dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdekat >1000 meter;
 - Memperbaiki sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang;
 - Menetapkan sistem sanitary landfill sepenuhnya dengan sistem Reduce (pengurangan volume sampah), Re-use (pemanfaatan sampah untuk kegunaan lain seperti bahan bakar atau energi alternatif), Recycle (daur ulang sampah menjadi barang bermanfaat);
 - Menata kembali lahan yang telah menggunakan sistem open dumping menjadi sistem sanitary landfill;
 - Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang ada, melalui peningkatan peran serta masyarakat.
- ◆ Mengembangkan sistem drainase, dengan upaya :
- Mengoptimalkan sistem drainase eksisting yang telah dibangun di zaman Belanda;
 - Mempertahankan Situ (tampung sementara) kota yang masih ada dan mengupayakan penambahannya;
 - Menurunkan debit limpasan dengan pembuatan bangunan resapan air;
 - Memperbaiki dan/atau normalisasi saluran drainase;
 - Membuat sudetan pada saluran drainase yang memiliki tingkat genangan tinggi;
 - Mengembangkan saluran drainase berbasis partisipasi masyarakat.
- ◆ Mengembangkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki, dengan upaya :
- Menyediakan fasilitas pejalan kaki;

- o Menambah dan memperbaiki fasilitas pejalan kaki pada kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.

◆ Mengembangkan jalur evakuasi bencana.

2. Strategi Pola Ruang Wilayah Kota.

a. Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, meliputi :

- ◆ Memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
- ◆ Membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan;
- ◆ Mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH;
- ◆ Menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan upaya :
 - o Melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH kota;
 - o Tidak mengalihfungsikan RTH eksisting;
 - o Merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH eksisting;
 - o Mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH nya menjadi RTH publik kota;
 - o Menata dan menyediakan RTH sesuai fungsinya : ekologis, sosial-ekonomi, dan arsitektural;
 - o Menanam pohon dengan jenis yang disesuaikan dengan karakteristik RTH;
 - o Menempatkan RTH sebagai pendukung identitas kawasan;
 - o Mengelompokkan RTH sesuai fungsi, hierarki, dan skala ruang lingkungannya;
 - o Membangun hutan kota, lapangan olahraga terbuka, kebun bibit, taman kota, dan taman lingkungan;
 - o Membangun RTH pada ruas jalan utama kota;
 - o Membangun RTH pada lokasi fasilitas umum kota;
 - o Membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan rel Kereta Api, sempadan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

- o Menghijaukan halaman/kavling rumah, perkantoran, dan perdagangan.
 - ❖ Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - ❖ Memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan;
 - ❖ Mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut;
 - ❖ Mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan;
 - ❖ Meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;
 - ❖ Meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai;
 - ❖ Mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung;
 - ❖ Menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (*roof garden*) pada bangunan tinggi, dinding hijau (*green wall*) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.
- b. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, meliputi :
- ❖ Tidak mengalihfungsikan RTH;
 - ❖ Mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang berbasis pada konservasi air yang berwawasan lingkungan;
 - ❖ Mengembangkan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - ❖ Mengembangkan perumahan secara vertikal;

- ❖ Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata sesuai skala pelayanan;
- ❖ Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal yang memperhatikan aspek ekologis;
- ❖ Mengembangkan kompleks perkantoran pemerintah maupun swasta secara vertikal;
- ❖ Mengarahkan kompleks industri dan pergudangan pada perbatasan kota;
- ❖ Mengendalikan intensitas kegiatan industri dan pergudangan pada sub wilayah kota yang telah ada;
- ❖ Mengembangkan kompleks industri dan pergudangan yang mempertimbangkan aspek ekologis;
- ❖ Mengarahkan terbentuknya kawasan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, secara merata pada sub wilayah kota;
- ❖ Mengarahkan dan menata kawasan bagi kegiatan sektor informal, dengan upaya :
 - Mengatur persebaran pedagang pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan jenisnya;
 - Memberikan kemudahan dalam proses penyediaan modal dan bantuan teknis untuk sektor informal;
 - Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar sektor informal lebih berkembang; dan
 - Menetapkan regulasi bagi keberadaan sektor informal.
- ❖ Menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana;
- ❖ Mengembangkan fasilitas umum dan sosial, meliputi pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan, dengan upaya :
 - Mengarahkan pendistribusian pembangunan fasilitas umum secara merata pada sub wilayah kota;
 - Meningkatkan kualitas tiap fasilitas umum yang sudah ada;

- o Membangun pusat pelayanan baru dengan memperhatikan sistem pelayanan wilayah kota;
 - o Meningkatkan skala pelayanan fasilitas yang memenuhi arahan untuk fasilitas dengan skala pelayanan regional, kota serta lokal yang menciptakan fungsi kegiatan primer, sekunder, dan tersier;
 - o Menciptakan efisiensi serta efektifitas pelayanan yang ada sehingga mampu menjangkau seluruh penduduk di semua sub wilayah kota yang ada dengan cara :
 - Membatasi dan mengarahkan perkembangan fasilitas yang berkelompok pada pusat pelayanan tertentu;
 - Melakukan upaya pemerataan penyediaan fasilitas pada sub wilayah kota yang memerlukan dengan pertimbangan konsentrasi penduduk.
 - ◆ Mendukung pemanfaatan kawasan militer;
 - ◆ Membatasi pemanfaatan kawasan budidaya yang mengganggu ekosistem yang ada.
3. Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota.
- a. Menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. Mengembangkan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi;
 - c. Menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota;
 - d. Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
 - e. Mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;

- f. Mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;
- g. Membangun prasarana pariwisata.

4.2. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)

Berikut ini adalah alokasi penganggaran untuk untuk masing-masing bidang (SKPD) tahun 2012, 2013, dan 2014, dimana dari tahun 2012-2014 anggaran belanja Kota Malang terus mengalami peningkatan dari Rp. 1.261.071.343.394,48 tahun 2012, Rp. 1.543.987.138.516,98 tahun 2013 menjadi Rp. 1.683.670.042.842,82 tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pembangunan yang selalu meningkat di segala aspek baik pembangunan fisik maupun non fisik meningkat dari tahun ke tahun.

4.2.1. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 2012

Anggaran belanja pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.261.071.343.394,48 yang dialokasikan ke berbagai bidang untuk kemajuan dan pembangunan Kota Malang. Yang terbesar adalah untuk pendidikan yaitu Rp. 512.812.049.677,09. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 4.1 Alokasi Penganggaran Tahun 2012

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN BELANJA	1261071343394,48
Pelayanan Umum	277425049071,45
Perencanaan Pembangunan	10778605279,21
Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	255901513410,36
Ketahanan Pangan	250000000,00
Statistik	283616500,00
Kearsipan	3082574263,46
Komunikasi dan Informatika	7128739 618,42
Ketertiban dan ketentraman (Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri)	14505619879,93

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Ekonomi	94541203996,15
Perhubungan	32424264443,82
Ketenagakerjaan	3904929388,79
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4177537136,26
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30237838000,00
Pertanian	5224908901,86
Kehutanan	39250000,00
Kelaulan dan Penakanan	480100000,00
Perdagangan	17447376125,42
Industri	285000000,00
Lingkungan Hidup	64690953499,73
Penataan Ruang	739005000,00
Lingkungan Hidup	63378973499,73
Pertanahan	572975000,00
Perumahan dan fasilitas umum	187388514088,09
Pekerjaan Umum	124903560810,16
Perumahan	62484953277,93
Kesehatan	76890375803,25
Pariwisata & Budaya	6467691048,35
Pariwisata	4532591048,35
Budaya	1935100000,00
Pendidikan	512812049677,09
Kepemudaan dan Olaharga	8038387035,08
Perlindungan Sosial	26349886330,44
Kependudukan dan Catatan Sipil	6156948002,41
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7119642328,03
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3493985500,00
Sosial	9579310500,00

Sumber : Bappeda Kota Malang

4.2.2. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 2013

Anggaran belanja pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.543.987.138.516,98 yang dialokasikan ke berbagai bidang untuk kemajuan dan pembangunan Kota Malang. Yang terbesar adalah untuk pendidikan yaitu Rp. 599.660.682.590,97. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 4.2 Alokasi Penganggaran Tahun 2013

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN BELANJA	1543987138516,98
Pelayanan Umum	336300190123,85
Perencanaan Pembangunan	7667336193,09
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	312547768754,62
Ketahanan pangan	1749200000,00
Statistik	523576600,00
Kearsipan	3.634.102.831.57
Komunikasi dan Informatika	10.178.205.744,57
Ketertiban dan Keamanan	23981917091,46
Ekonomi	110690667005,58
Perhubungan	39294862020,53
Ketenagakerjaan	31252862095,39
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5117467891,95
Penanaman modal	680000000,00
Pemberdayaan masyarakat dan Desa	5424442950,00
Pertanian	6767182437,77
Kehutanan	392500,00
kelautan dan Perikanan	5301000,00
Perdagangan	20549499609,94
Industri	950000000,00
Ketransmigrasian	250000,00
Lingkungan Hidup	77058223280,09
Penataan Ruang	32524000,00
Lingkungan Hidup	73096570793,79
Pertanahan	709252486,30
Perumahan dan Fasilitas Umum	230474424550,14
Pekerjaan Umum	170481592904,14
Perumahan	59992831646,00
Kesehatan	125580857858,73
Pariwisata dan Budaya	8367357143,06
Kebudayaan	6467505143,06
Parwisata	1899852000,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Pendidikan	599660682590,97
Pendidikan	583113230386,03
Kepemudaan dan olahraga	16547452204,94
Pertindungan Sosial	31872818873,11
Kependudukan dan Catatan Sipil	6659013225,66
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9207465647,45
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	29296000,00
Sosial	130767400,00

Sumber : Bappeda Kota Malang

4.2.3. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 2014

Anggaran belanja pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.683.670.042.842,82 yang dialokasikan ke berbagai bidang untuk kemajuan dan pembangunan Kota Malang. Yang terbesar adalah untuk pendidikan yaitu Rp. 617.906.299.671,97. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 4.3 Alokasi Penganggaran Tahun 2014

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN BELANJA	1.683.670.042.842,82
Pelayanan Umum	340.261.092.314,57
Perencanaan Pembangunan	10.954.772.815,67
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	309.515.543.018,67
Ketahanan Pangan	2.221.638.438,69
Statistik	951.745.600,00
Kearsipan	5.056.675.208,51
Komunikasi dan Informatika	11.560.717.233,03
Ketertiban dan ketentraman	22.577.240.020,36
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	22.577.240.020,36
Ekonomi	142.257.640.812,44
Perhubungan	29.040.767.356,43
Ketenagakerjaan	33.042.796.296,20

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.721.399.804,07
Penanaman Modal	829.469.500,00
Pembudayaan Masyarakat dan Desa	32.860.637.960,00
Pertanian	7.874.372.424,18
Kehutanan	40.000.000,00
Kelautan dan Perikanan	562.158.000,00
Perdagangan	28.120.489.471,56
Industri	4.150.000.000,00
Ketransmigrasian	15.550.000,00
Lingkungan hidup	84.987.437.826,32
Penataan Ruang	2.204.000.000,00
Lingkungan Hidup	82.373.651.826,32
Pertanahan	409.786.000,00
Perumahan dan faslitas umum	295.749.820.895,10
Pekerjaan Umum	229.805.274.895,10
Perumahan	65.944.546.000,00
Kesehatan	128.723.488.388,42
Pariwisata dan budaya	7.719.545.591,01
Kebudayaan	6.226.971.191,01
Pariwisata	1.492.574.400,00
Pendidikan	617.906.299.671,97
Pendidikan	603.393.841.647,27
Kepemudaan dan Olahraga	14.512.458.024,69
Perlindungan Sosial	43.487.477.322,64
Kependudukan dan Catatan Sipil	8.478.651.554,53
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.043.550.707,54
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5.671.070.000,00
Sosial	18.294.205.060,57

Sumber : Bappeda Kota Malang

BAB V

ANALISA KESESUAIAN RPJP DENGAN RTRW DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN

5.1 Analisis Kesesuaian RPJP dengan RTRW menggunakan *Content Analysis* (Analisis Isi)

Analisis kesesuaian dengan content analysis ini terdiri dari analisis keterkaitan RPJP dengan RTRW menggunakan matriks keterkaitan RPJP dengan RTRW, pemaknaan melalui dialog dengan teks-teks lain atau sumber-sumber teori lain (penelitian yang serupa), dan konseptualisasi/teorisasi (kesimpulan).

Untuk langkah pertama akan dilakukan analisa dengan matriks ini untuk mengetahui keterkaitan dan tingkat kesesuaian dari RPJP dengan RTRW Kota Malang dengan ketentuan sebagai berikut :

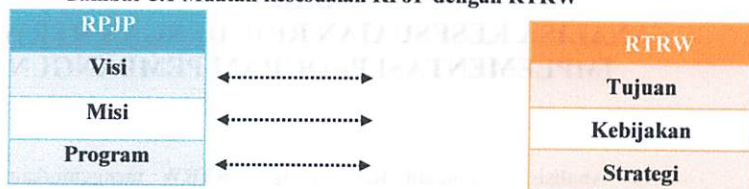
Tabel 5.1 Kualifikasi keterkaitan RPJP-RTRW

KUALIFIKASI HUBUNGAN	INDIKATOR
Kuat (K)	Jika sebagian besar hubungan dari isi kedua produk sama-sama mencakup kandungan isi, muatan, nama, tempat yang sama
Lemah (L)	Jika hubungan dari kedua produk tersebut hanya sebagian kecil yang mencakup kandungan isi, muatan, nama, tempat dari masing-masing produk
Tidak ada keterkaitan (kosong)	Jika kedua isi atau muatan dari kedua produk tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali

Sumber : Hasil analisa

Muatan dari masing-masing produk RPJP dan RTRW yang akan dicari keterkaitannya akan diberi simbol angka (1,2,3,4,..) pada muatan RPJP sedangkan simbol huruf (a,b,c,d,...) pada muatan RTRW sesuai dengan ruang lingkup penelitian di bawah ini :

Gambar 5.1 Muatan kesesuaian RPJP dengan RTRW



Berikut adalah matriks keterkaitan RPJP - RTRW dengan persentase kesesuaiannya (Riduan, 2004:71-95) yang dihitung dengan :

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

DP = Deskriptif Persentase (%)

n = Skor yang akan dicari

N = Jumlah data

1. Kesesuaian Visi (RPJP) dengan Tujuan (RTRW)

Muatan Visi dari RPJP ada 4 diberi simbol angka, sedangkan muatan tujuan dari RTRW ada 2 diberi simbol huruf, seperti yang tertera di bawah ini :

Tabel 5.2 Keterkaitan Visi dengan Tujuan

VISI (RPJP)	TUJUAN (RTRW)	KETERKAITAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Pendidikan Berkualitas 2. Berbudaya 3. Berwawasan Lingkungan 4. Sejahtera 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kota Pendidikan Berkualitas b. Prasarana dan sarana berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Pendidikan yang berkualitas dengan Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas (terkait kuat karena berorientasi pada pendidikan berkualitas). 2. Berbudaya dengan Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas (terkait lemah karena tersirat pengembangan kawasan strategis budaya). 3. Berwawasan Lingkungan dengan sebagian kecil dari tujuan RTRW (1) didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 4. Sejahtera dengan sebagian kecil peningkatan pertumbuhan ekonomi kota pendidikan berkualitas.

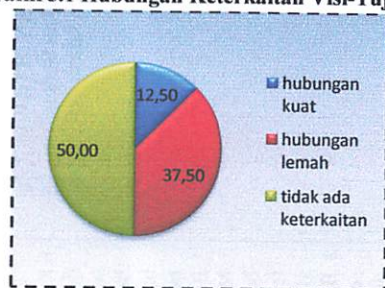
Dari hasil keterkaitan menunjukkan antara Visi (RPJP) dengan Misi (RTRW) sama-sama berorientasi pada pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah hasil keterkaitan dari visi (RPJP) dengan Tujuan (RTRW) :

Tabel 5.3 Matriks Keterkaitan Visi (RPJP) dengan Tujuan (RTRW)

VISI (RPJP)	TUJUAN (RTRW)	
	a	b
1	K	
2		L
3	L	
4	L	

Dari matriks kesesuaian di atas akan diketahui persentase hubungan keterkaitan, dimana 50 % muatan visi (RPJP) tidak sesuai dengan muatan tujuan (RTRW) seperti berikut ini :

Grafik 5.1 Hubungan Keterkaitan Visi-Tujuan



Pembahasan

Kesesuaian :

1. Sama-sama berorientasi pada pendidikan berkualitas.
2. Aspek berwawasan lingkungan hanya sebagian kecil tertuang dalam dalam RTRW.
3. Aspek kesejahteraan hanya sebagian kecil tertuang dalam RTRW.

Ketidaksesuaian :

1. Aspek berbudaya tidak tertuang dalam RPJP.
2. Prasarana dan sarana tidak tertuang dalam RTRW.

2. Kesesuaian Misi (RPJP) dengan Kebijakan (RTRW)

Muatan misi dari RPJP terdiri dari 8 misi, sedangkan kebijakan dari RTRW terbagi menjadi 3 yaitu kebijakan struktur ruang, kebijakan pola ruang, dan kebijakan penetapan kawasan strategis, lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 5.4 Keterkaitan Misi dengan Kebijakan

MISI (RPJP)	KEBIJAKAN (RTRW)	KETERKAITAN
1. Kota pendidikan berorientasi global	a. Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kota	1. Pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung ; dan Kebijakan pengembangan prasarana wilayah (terkait kuat karena tersirat pengembangan wilayah); Kebijakan Struktur Ruang , Kebijakan penetapan kawasan strategis ((terkait lemah karena tersirat pengembangan wilayah).
2. SDM berkualitas	1. Kebijakan sebagai (PKN)	2. Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan tersirat dengan kebijakan penetapan kawasan strategis kota (terkait lemah karena tersirat pengembangan kawasan strategis budaya).
3. Kota kondusif sebagai kota pendidikan	2. Kebijakan sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional	3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota; dan Kebijakan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya (terkait kuat karena berorientasi pada pembangunan ekonomi).
4. Pembangunan wilayah & Infrastruktur	3. Kebijakan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya	4. Mewujudkan kota sejahtera dengan Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota; dan Kebijakan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya . (terkait kuat karena berorientasi pada pembangunan ekonomi).
5. Tata pemerintahan dan aparatur profesional	4. Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan	
6. Kota agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya.	5. Kebijakan Pengembangan prasarana wilayah	
7. Pertumbuhan ekonomi	b. Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kota	
8. Kota sejahtera	1. Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung	
	2. Kebijakan Pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya	
	c. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota	

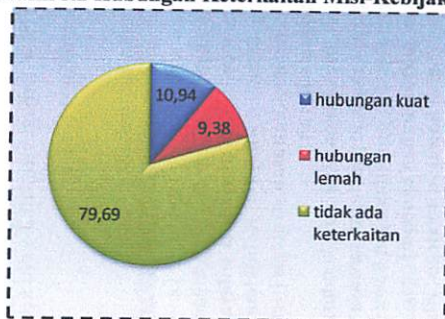
Dari hasil keterkaitan menunjukkan antara Misi (RPJP) dengan Kebijakan (RTRW) sebagian besar berorientasi pada Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur. Berikut adalah hasil keterkaitan dari Misi (RPJP) dengan Kebijakan (RTRW) :

Tabel 5.5 Matriks Keterkaitan Misi (RPJP) - Kebijakan (RTRW)

MISI	KEBIJAKAN								
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	c	
1									
2									
3									L
4	L	L	L	L	K	K	L	K	
5									
6									
7			K						K
8			K						K

Dari matriks kesesuaian di atas akan diketahui persentase hubungan keterkaitan, dimana 79,69 % muatan Misi (RPJP) tidak sesuai dengan muatan Kebijakan (RTRW) seperti berikut ini :

Grafik 5.2 Hubungan Keterkaitan Misi-Kebijakan



Pembahasan

Kesesuaian :

5. Sama-sama berorientasi pada pembangunan wilayah dan infrastruktur.
6. Sama-sama berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

7. Tersirat aspek kesejahteraan.

Ketidaksesuaian :

1. Kota pendidikan
2. SDM berkualitas
3. Tata pemerintahan dan aparatur professional
4. Kota agamis, bermoral, beretika, dst

Tidak tertuang dalam RTRW.

3. PROGRAM (RPJP)-STRATEGI (RTRW)

Program merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam RPJP yang terbagi menjadi 10 program yang telah disusun berdasarkan bidang masing-masing untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kota Malang, sedangkan dalam RTRW hanya sebagian yang muatan strategi terkait program per bidang seperti yang tertera dalam program RPJP.

a. Pendidikan berorientasi global dengan kearifan lokal

Dalam uraian berikut hanya memuat program RPJP saja yaitu Program kota pendidikan yang terdiri dari 2 program pokok, sedangkan dalam Strategi RTRW tidak memuat program pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : Jelaskan tabel 5.5. ~~keberkaitan~~

Tabel 5.5 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM	STRATEGI (RTRW)
1. Kota pendidikan berorientasi global	-
2. Sarana dan prasarana pendidikan	-

Pembahasan

Kesesuaian :-

Ketidaksesuaian : Semua program pendidikan tidak terdapat dalam Strategi RTRW.

ujudnya SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, mbangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbudaya

Dalam uraian berikut hanya memuat program RPJP saja yaitu Program SDM berkualitas yang terdiri dari 3 program pokok, sedangkan dalam Strategi RTRW tidak memuat program SDM berkualitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.6 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya visi kota Malang 2. Terwujudnya masyarakat kota Malang yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, makmur, serta berakhlak mulia 3. Pembangunan sumber daya manusia dan Iptek 	-

Pembahasan

Kesesuaian : -

Ketidakesuaian : Semua program SDM berkualitas tidak terdapat dalam Strategi RTRW.

c. Lingkungan Kota Pendidikan Yang Kondusif

Dalam uraian berikut hanya memuat program RPJP saja yaitu ProgramLingkungan kota pendidikan yang terdiri dari 4 program pokok, sedangkan dalam Strategi RTRW tidak memuat program Lingkungan kota pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.7 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM	STRATEGI (RTRW)	KETERKAITAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana unggul 2. Kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya dan aktifitas kondusif 3. Infrastruktur penunjang pendidikan 4. Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan Kota pada masa kolonial 5. Fasilitas penunjang pendidikan 6. Pemanfaatan ICT 7. Membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh Lapisan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Strategi Struktur Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 2. Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional 3. Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya 4. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan 5. Pengembangan Prasarana Wilayah Kota b. Strategi Pola Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung 2. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya c. Strategi Penetapan Kawasan Strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan lingkungan kota yang kondusif; 2. Pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan; 3. Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan kota pada masa kolonial; <u>dengan</u> Strategi penetapan kawasan strategis. (terkait lemah karena tersirat pengembangan kawasan strategis budaya).

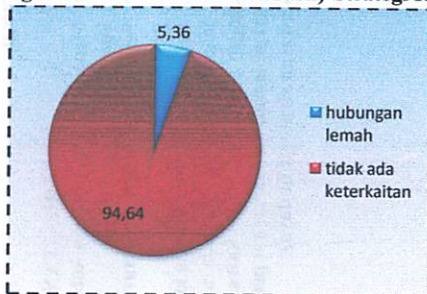
Dari hasil keterkaitan menunjukkan antara Program Lingkungan Kota yang Kondusif (RPJP) dengan Kebijakan (RTRW) sebagian kecil berorientasi pada Kawasan Strategis Sosial Budaya berupa pelestarian bangunan-bangunan bersejarah. Berikut adalah hasil keterkaitan dari Program Lingkungan Kota yang Kondusif (RPJP) dengan Strategi (RTRW) :

Tabel 5.8 Matriks kesesuaian Program Lingkungan Kota Pendidikan Kondusif (RPJP)-Strategi (RTRW)

PROGRAM RPJP	STRATEGI RTRW								
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	c	
1									
2									L
3									L
4									L
5									
6									
7									

Dari matriks kesesuaian di atas akan diketahui persentase hubungan keterkaitan, dimana 94,64 % muatan program Lingkungan Kota Pendidikan Kondusif (RPJP) memiliki hubungan kuat dengan muatan Strategi (RTRW), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 5.3 Hubungan Keterkaitan Program RPJP (Lingkungan Kota Pendidikan Kondusif)-Strategi RTRW



Pembahasan

Kesesuaian : Sebagian kecil berorientasi pada pengembangan kawasan strategi kota

Ketidaksesuaian :

- a.) Penyediaan sarana dan prasarana unggul;
- b.) Infrastruktur penunjang pendidikan;
- c.) Pemanfaatan ICT;
- d.) Membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh Lapisan masyarakat; Tidak tertuang dalam RTRW.
- e.) Strategi struktur ruang;
- f.) Strategi pola ruang; Tidak tertuang dalam RPJP.

d. Pembangunan Wilayah & Infrastruktur Berkelanjutan

Program pembangunan wilayah & infrastruktur dalam RPJP terbagi menjadi 10 program, sedangkan strategi terkait pembangunan wilayah & infrastruktur dalam RTRW terbagi menjadi 5 yaitu strategi struktur ruang, strategi pola ruang, strategi pengembangan prasarana wilayah, Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.9 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)	KETERKAITAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota hijau lestari 2. pemanfaatan ruang kota, serta mendudukkan RTH sebesar 30 %, secara proporsional 3. Pembangunan infrastruktur 4. Aspek pembangunan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> a. Strategi Struktur Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 2. Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional 3. Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya 4. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan 5. Pengembangan Prasarana Wilayah Kota b. Strategi Pola Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung 2. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya c. Strategi Penetapan Kawasan Strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Kota Malang hijau lestari <u>dengan</u> Strategi sebagai PKN, Strategi sebagai Pusat Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan, Pengembangan Prasarana Wilayah Kota (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Strategi Pola Ruang, Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait kuat karena pembangunan berwawasan lingkungan&berkelanjutan). 2. Pemanfaatan ruang kota, serta mendudukkan RTH sebesar 30 % <u>dengan</u> Strategi sebagai Pusat Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan, Pengembangan Prasarana Wilayah Kota (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Strategi Pola Ruang Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung (terkait kuat karena mengandung pengembangan kawasan lindung&RTH); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya , Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena tersirat pembangunan). 3. Pembangunan infrastruktur <u>dengan</u> Strategi sebagai (PKN), Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional (terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Pengembangan Prasarana

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)	KETERKAITAN
		<p>Wilayah Kota(terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya (terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena tersirat pembangunan).</p> <p>4. Aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan Strategi sebagai (PKN), Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional (terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Pengembangan Prasarana Wilayah Kota(terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya (terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena tersirat pembangunan).</p>

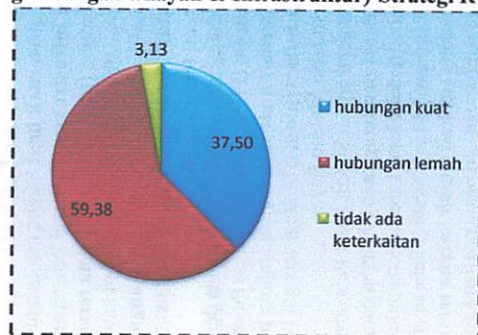
Dari hasil keterkaitan menunjukkan antara Program Pembangunan Wilayah & Infrastruktur (RPJP) dengan Kebijakan (RTRW) sebagian besar berorientasi pada Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur. Berikut adalah hasil keterkaitan dari Program Pembangunan Wilayah & Infrastruktur (RPJP) dengan Strategi (RTRW):

Tabel 5.10 Matriks kesesuaian Program Pembangunan Wilayah & Infrastruktur (RPJP)-Strategi (RTRW)

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)							
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	c
1	L	L	L	L	L	K	K	K
2	L	L	L	L		K	L	L
3	K	K	L	L	K	L	K	L
4	K	K	L	L	K	L	K	L

Dari matriks kesesuaian di atas akan diketahui persentase hubungan keterkaitan, dimana 37,50 % muatan program pembangunan wilayah & infrastruktur (RPJP) memiliki hubungan kuat dengan muatan Strategi (RTRW), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 5.4 Hubungan keterkaitan Program RPJP (Pengembangan wilayah & Infrastruktur)-Strategi RTRW



Pembahasan

Kesesuaian :

- a) Sama-sama berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan sebagian kecil pada pertumbuhan ekonomi.
- b) Sama-sama berorientasi pada sarana prasarana dan sebagian kecil pada pertumbuhan ekonomi.
- c) Sama-sama berorientasi pada pengembangan wilayah dan sebagian kecil pada pertumbuhan ekonomi.
- d) Sama-sama berorientasi pada RTH dan SDA.
- e) Tersirat aspek keserasian pemanfaatan ruang.
- f) Tersirat sebagian kecil aspek kesadaran masyarakat.

Ketidaksesuaian : -

e. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan

Untuk program RPJP Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi terbagi menjadi 3 dan strategi dalam RTRW terbagi menjadi 4 strategi, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 5.11 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)	KETERKAITAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Kota pendidikan didukung Perdagangan Jasa yang unggul 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Arah pembangunan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Strategi Struktur Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 2. Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional 3. Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya 4. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan 5. Pengembangan Prasarana Wilayah Kota b. Strategi Pola Ruang <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung 2. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya c. Strategi Penetapan Kawasan Strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Kota pendidikan didukung Perdagangan Jasa yang unggul <u>dengan</u> Strategi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena tersirat perdagangan & jasa). 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi <u>dengan</u> Strategi sebagai PKN, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya (terkait kuat karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi); Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena sebagian kecil membahas pertumbuhan ekonomi); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya (terkait lemah karena sebagian kecil membahas pertumbuhan ekonomi); Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait kuat karena berorientasi pada

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)	KETERKAITAN
		<p>pertumbuhan ekonomi). Arah pembangunan ekonomi <u>dengan</u> Strategi sebagai PKN, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional (terkait lemah karena tersirat pembangunan ekonomi); Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya (terkait kuat karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi); Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena sebagian kecil membahas pertumbuhan ekonomi); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya (terkait lemah karena sebagian kecil membahas pertumbuhan ekonomi); Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait kuat karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi).</p>

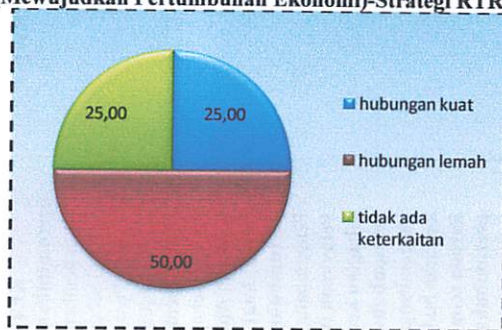
Dari hasil keterkaitan menunjukkan antara Program Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi (RPJP) dengan Strategi (RTRW) sebagian besar berorientasi pada Pertumbuhan dan arah pembangunan ekonomi. Berikut adalah hasil keterkaitan dari Program Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi (RPJP) dengan Strategi (RTRW) :

Tabel 5.12 Matriks Keterkaitan Program Pertumbuhan Ekonomi (RPJP) dengan Strategi (RTRW)

PROGRAM RPJP	STRATEGI RTRW							
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	c
1	L	L	L	L		L	L	
2	K	K	K	L			L	K
3	L	L	K	L			L	K

Dari matriks kesesuaian di atas akan diketahui persentase hubungan keterkaitan, dimana 25 % muatan sesuai yang berorientasi pada pengembangan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 5.5 Hubungan keterkaitan Program RPJP (Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi)-Strategi RTRW



Pembahasan

Kesesuaian :

- Sama-sama berorientasi pada pembangunan perdagangan dan jasa
- Sama-sama berorientasi pada pembangunan ekonomi

Ketidakesesuaian : -

f. Mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berland

Program Kota Demokratis dalam RPJP terdiri dari 2 dalam RTRW tidak memuat strategi yang terkait dengan kota demokratis. Berikut adalah program kota demokratis dalam RPJP :

Tabel 5.13 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)
1. Mewujudkan visi Kota Malang 2. Politik untuk konsep perencanaan pembangunan	

Pembahasan

Kesesuaian : -

Ketidakesuaian : Semua program “Kota Demokratis Berlandaskan Hukum” tidak terdapat dalam Strategi RTRW.

g. Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional

Program Tata Pemerintahan dan Aparatur dalam RPJP terdiri dari 3 program, sedangkan dalam RTRW tidak memuat strategi yang terkait dengan Tata Pemerintahan dan Aparatur. Berikut adalah programnya dalam RPJP :

Tabel 5.14 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)
1. Mewujudkan visi kota Malang 2. <i>Good Governance</i> 3. politik untuk konsep perencanaan pembangunan	

Pembahasan

Kesesuaian : -

Ketidakesuaian : Semua program “Tata Pemerintahan dan Aparatur Profesional” tidak terdapat dalam Strategi RTRW.

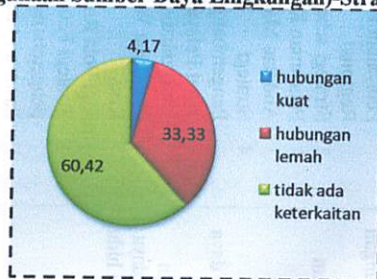
Dari hasil keterkaitan menunjukkan antara Program Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan(RPJP) dengan Strategi (RTRW) sebagian besar berorientasi pada Keserasian pemanfaatan ruang. Berikut adalah hasil keterkaitan dari Program Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan (RPJP) dengan Strategi (RTRW) :

Tabel 5.18 Matriks keterkaitan Program Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan RPJP) dengan Strategi (RTRW)

PROGRAM RPJP	STRATEGI RTRW							
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	c
1	L	L	L	L			L	L
2	L	L	L	K	L	L	L	L
3			L	L		K	L	L
4								
5								
6								

Dari matriks kesesuaian di atas akan diketahui persentase hubungan keterkaitan, dimana muatan berorientasi pada keserasian pemanfaatan ruang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 5.6 Hubungan keterkaitan Program RPJP (Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan)-Strategi RTRW



Pembahasan

Kesesuaian :

- Tersirat sebagian kecil pada pembangunan ekonomi
- Berorientasi pada keserasian pemanfaatan ruang

- c) Berorientasi pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan

Ketidaksesuaian :

- a) Tidak memuat program RPJP kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dalam RTRW
- b) Tidak memuat program RPJP Pengenalan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam RTRW
- c) Tidak tertuang program RPJP Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam RTRW.

j. Mewujudkan Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera

Program masyarakat sejahtera terdiri dari 9 program yaitu kesehatan, pelayanan masyarakat, kesejahteraan, serta pemberdayaan perempuan. Sedangkan dalam RTRW tidak memuat program terkait, karena dalam RTRW hanya membahas program keruangan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 5.18 Keterkaitan Program dengan Strategi

PROGRAM (RPJP)	STRATEGI (RTRW)
1. Pembangunan dibidang kesehatan masyarakat	-
2. Strategi kesehatan masyarakat	
3. Peningkatan layanan masyarakat	
4. Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial dasar	
5. Kesejahteraan masyarakat	
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat	
7. Pembangunan kesejahteraan sosial	
8. Pengembangan sistem jaminan sosial	
9. Pemberdayaan peran Perempuan	

Pembahasan

Kesesuaian : -

Ketidaksesuaian : Semua Program Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera dalam RPJPTidak tertuang dalam RTRW.

Berikut adalah referensi dari sumber-sumber lain dengan pada tahap ke 4 pada *content analysis*:

Tabel 5.19 Sinkronisasi RPJP Jatim (Tahun 2005-2025) dengan RTRWP Jatim 2009-2029

RPJP	Pembahasan	RTRW	Pembahasan	Evaluasi Kesesuaian
<p>- Visi pembangunan adalah Pusat Agribisnis (1) Terkemuka (2), Berdaya Saing Global (3) dan Berkelanjutan (4) menuju Jawa Timur Makmur (4) dan Berakhlak (5).</p>	<p>(1) : pusat pertumbuhan = kawasan strategis, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus berbasis pertanian</p> <p>(2), (3), (4) = sifat dari (1)</p> <p>(4) = Pemerataan ekonomi</p> <p>(5) Pembangunan SDM</p>	<p>Visi penataan ruang Jatim adalah "Terwujudnya ruang wilayah Provinsi Jawa Timur berbasis agribisnis (1) dan jasa komersial (2) yang berdaya saing global (3) dalam pembangunan berkelanjutan (4).</p>	<p>(1) Pemerataan pembangunan pertanian di Jawa Timur = pusat pertumbuhan berupa kawasan strategis, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus berbasis pertanian yang tersebar merata</p> <p>(2) Pemerataan pembangunan jasa komersial di Jawa Timur pusat pertumbuhan berupa kawasan strategis, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus yang tersebar merata</p> <p>(3) dan (4) sifat dari (1) dan (2)</p>	<p>Sesuai =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sama – sama berorientasi pusat pertumbuhan dan pemerataan berbasis pembangunan pertanian. 2. Sama-sama mengedepankan aspek pembangunan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan lingkungan. 3. Tersirat aspek pemerataan pembangunan ekonomi <p>Kurang sesuai = 1. visi pembangunan jasa komersial tidak ada dalam RPJP</p> <p>2. visi pembangunan SDM tidak tersurat dalam RTRW.</p>

RPJP	Pembahasan	RTRW	Pembahasan	Evaluasi Kesesuaian
<p>- Misi Pembangunan terdiri dari :</p> <p>(1) mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis;</p> <p>(2) mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;</p> <p>(3) mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;</p> <p>(4) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;</p> <p>(5) mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi;</p> <p>(6) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik;</p>	<p>(1) pembangunan pertanian</p> <p>(2) pembangunan sektor pendidikan</p> <p>(3) pembangunan infrastruktur wilayah</p> <p>(4) pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur wilayah</p> <p>(5) pengembangan infrastruktur wilayah</p> <p>(6) pengembangan sektor politik dan administrasi pemerintahan.</p>	<p>Misi Penataan ruang Jatim adalah:</p> <p>1. Mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global.</p> <p>2. Mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia.</p> <p>3. Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan.</p> <p>4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi.</p> <p>5. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional.</p> <p>6. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>7. Mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>1. pengembangan kawasan budidaya</p> <p>2. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan andalan.</p> <p>3. pengembangan kawasan lindung</p> <p>4. pengembangan pembangunan infrastruktur wilayah</p> <p>5. pengembangan sektor politik, hukum, dan administrasi pemerintahan.</p>	<p>Sesuai :</p> <p>1. Telah sama-sama menitikberatkan pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur wilayah</p> <p>2. Telah menitikberatkan pengembangan sektor politik dan administrasi pemerintahan</p> <p>Kurang sesuai</p> <p>1. Pengembangan kawasan lindung kurang tersurat dalam misi dalam RPJP</p> <p>2. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dalam RPJP hanya ditujukan berorientasi pertanian</p> <p>3. Pengembangan SDM yang bersifat umum dalam RPJP, bersifat khusus (aspek kemandirian secara ekonomi) dalam RTRWP.</p>

5.2 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) dengan Menggunakan analisis deskriptif komparatif

Dalam analisis deskriptif komparatif ini akan dijabarkan implementasi pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dengan alokasi anggaran program pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2012, 2013, dan 2014. Dari program dan jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tersebut maka akan diketahui sejauh mana implementasi pembangunan ini mendukung Visi, Misi, dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJP.

5.2.1 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) Tahun 2012

Berikut adalah besaran jumlah dan persentase alokasi anggaran masing-masing bidang tahun 2012 :

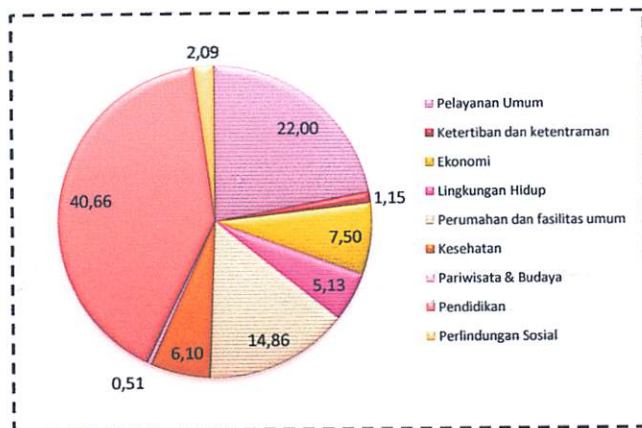
Tabel 5.21 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2012

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA	1261071343394,48	100,00
Pelayanan Umum	277425049071,45	22,00
Perencanaan Pembangunan	10778605279,21	
Otonomi Daerah Pemerintahan Urnum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	255901513410,36	
Ketahanan Pangan	250000000,00	
Statistik	283616500,00	
Kearsipan	3082574263,46	
Komunikasi dan Informatika	7128739 618,42	
Ketertiban dan ketentraman (Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri)	14505619879,93	1,15
Ekonomi	94541203996,15	7,50
Perhubungan	32424264443,82	
Ketenagakerjaan	3904929388,79	
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4177537136,26	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30237838000,00	

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN
Pertanian	5224908901,86	
Kehutanan	39250000,00	
Kelaulan dan Penakanan	480100000,00	
Perdagangan	17447376125,42	
Industri	285000000,00	
Lingkungan Hidup	64690953499,73	5,13
Penataan Ruang	739005000,00	
Lingkungan Hidup	63378973499,73	
Pertanahan	572975000,00	
Perumahan dan fasilitas umum	187388514088,09	14,86
Pekerjaan Umum	124903560810,16	
Perumahan	62484953277,93	
Kesehatan	76890375803,25	6,10
Pariwisata & Budaya	6467691048,35	0,51
Pariwisata	4532591048,35	
Budaya	1935100000,00	
Pendidikan	512812049677,09	40,66
Kepemudaan dan Olaharga	8038387035,08	
Perlindungan Sosial	26349886330,44	2,09
Kependudukan dan Catatan Sipil	6156948002,41	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7119642328,03	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3493985500,00	
Sosial	9579310500,00	

Sumber : Hasil analisa

Grafik 5.7 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2012



Dari besaran alokasi APBD tahun 2012 di atas dapat diketahui bidang Pendidikan memiliki alokasi anggaran terbesar dengan 40,66%, Pelayanan Umum dengan 22 %, dan bidang Perumahan dan Fasilitas Umum dengan 14,86 %.

Berikut adalah kesesuaian proram yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 dengan realisasi program dalam APBD 2012, sebagai berikut :

Tabel 5.21 Implementasi pembangunan dengan APBD Tahun 2012 :

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
1	Kota Pendidikan yang berorientasi global	
a	Tenaga berkualitas (bersertifikasi)	program peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan kualifikasi dari SLTA/Diploma ke S1 PAUD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam bidang bahasa peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter program peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan kualifikasi dari SLTA/Diploma ke S1 PAUD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
b	Kebijakan politik (peningkatan derajat pendidikan)	program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) daerah untuk SD/MI dan SMP/MTs penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) daerah untuk SMA penyediaan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera bantuan pengentasan siswa pra sejahtera untuk memperoleh pendidikan pelayanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SMA dan SMK penyelenggaraan ujian paket C biaya operasional bantuan siswa dan lembaga SMA/MA/SMALB/SMK bantuan khusus siswa miskin bagi siswa SMA/SMK peningkatan lifeskill bagi warga prasejahtera pelayanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan
c	Kesadaran masyarakat	program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
d	Peningkatan akses dan ruang	pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP penyediaan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
		bantuan pengentasan siswa pra sejahtera untuk memperoleh pendidikan pelayanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SMA dan SMK penyelenggaraan ujian paket C bantuan khusus siswa miskin bagi siswa SMA/SMK peningkatan lifeskill bagi warga prasejahtera pemeliharaan rutin/berkala ruang lembaga pendidikan
e	Sarana dan prasarana unggul	kegiatan peningkatan infrastruktur pendidikan (DPPID) pengadaan alat peraga edukatif SD/MI/SMP pengadaan mebel sekolah SD dan SMP rehabilitasi sedang/berat bangunan SD/SMP peningkatan sarana prasarana sekolah menengah pengadaan sarana prasarana pembelajaran SMA, SMK peningkatan prasarana LAB IPA, komputer, bahasa dan IPS untuk SMP, SMA dan SMK pembangunan LAB mekatronika di kawasan MIEP pembangunan SMK 13 pembangunan unit sekolah baru SMK peningkatan sarana prasarana Unit Gedung Baru SMA Sampoerna Foundation pengadaan mebel RUSUNAWA pengembangan sarana prasarana SMK model B rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK pembangunan ruang kelas baru SMA peningkatan sarana prasarana PAUD Kota Malang pembinaan dan peningkatan sarana prasarana UKS

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
		peningkatan sarana prasarana olahraga program peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan kualifikasi dari SLTA/Diploma ke S1 PAUD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
f	Mutu dan pelayanan pendidikan	peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam bidang bahasa peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter program peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan kualifikasi dari SLTA/Diploma ke S1 PAUD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan workshop pengembangan metode pembelajaran berbasis TIK pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP peningkatan prestasi akademis dan non akademis siswa SMP terbuka penyediaan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera pelayanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan peningkatan mutu pendidikan non formal
g	Informasi yang mudah dan terjangkau	
h	Kebijakan politik (kebijakan-kebijakan publik)	program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun penyediaan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera pelayanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan peningkatan lifeskill bagi warga prasejahtera bantuan pengentasan siswa pra sejahtera untuk memperoleh pendidikan kegiatan peningkatan infrastruktur pendidikan (DPPID) peningkatan prestasi akademis dan non akademis siswa SMP terbuka
i	Kesiapan dan daya dukung masyarakat	
2	Terwujudnya SDM yang Berkualitas	
a	Kualitas SDM	

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
b	pemahaman masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan	
c	Terwujudnya partisipasi konkrit	pemberdayaan masyarakat dan desa
d	Kualitas tenaga kerja	peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
e	Partisipasi masyarakat	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		pemberdayaan masyarakat dan desa
		peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
f	Peningkatkan IPM	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
g	Peningkatkan indeks daya saing	penyusunan analisa IPM kota malang
h	Peningkatkan pengguna media informasi	
i	Peningkatkan jumlah tenaga kerja handal dan terampil	
j	Terciptanya kesejahteraan yang merata	
3	Lingkungankotapendidikan yang kondusif	
a	Penyediaan sarana dan prasarana unggul	pengadaan alat peraga edukatif SD/MI/SMP
		pengadaan mebeler sekolah SD dan SMP
		rehabilitasi sedang/berat bangunan SD/SMP
		peningkatan sarana prasarana sekolah menengah
		pengadaan sarana prasarana pembelejaraan SMA, SMK
		peningkatan prasarana LAB IPA, komputer, bahasa dan IPS untuk SMP, SMA dan SMK
		pembangunan LAB mekatronika di kawasan MIEP
		pembangunan SMK 13
		pembangunan unit sekolah baru SMK
	peningkatan sarana prasarana Unit Gedung Baru SMA Sampoerna Foundation	

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
		pengadaan mebeler RUSUNAWA pengembangan sarana prasaran SMK model B rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK pembangunan ruang kelas baru SMA peningkatan sarana prasarana PAUD Kota Malang pembinaan dan peningkatan sarana prasarana UKS peningkaran sarana prasarana olahraga program peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan kualifikasi dari SLTA/Diploma ke S1 PAUD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
b	Kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya	-
c	Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan Kota pada masa kolonial	-
d	Fasilitas penunjang pendidikan	-
e	Pemanfaatan ICT	Bimtek penyusunan bahan ajar berbasis ICT dan lomba bahan ajar berbasis ICT
f	Membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh Lapisan masyarakat	pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP penyediaan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera bantuan siswa prasejahtera untuk memperoleh pendidikan pelayanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan peningkatan lifeskill bagi warga prasejahtera pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SMA dan SMK penyelenggaraan ujian paket C bantuan khusus siswa miskin bagi siswa SMA/SMK peningkatan lifeskill bagi warga prasejahtera

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
4	Pembangunan Wilayah Dan Infrastruktur Berkelanjutan	
a	Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong program pembangunan turap/talud/brojong program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan program lingkungan sehat perumahan program pembangunan/perbaikan gedung daerah dan fasilitas umum program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang perencanaan teknis hasil MUSREMBANG tahun 2012
b	Sistem perencanaan efektif dan berkelanjutan	program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang perencanaan teknis hasil MUSREMBANG tahun 2012
c	Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	program pengendalian pemanfaatan tata ruang
d	Perkembangan dan pertumbuhan fisik sampai pelosok kota	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong program pembangunan turap/talud/brojong program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan program lingkungan sehat perumahan program pembangunan/perbaikan gedung daerah dan fasilitas umum
e	Mewujudkan RTH 30 % secara berkelanjutan	program pengelolaan RTH
f	Stakeholders mengakomodir kepentingan	
g	Sinergi dan kerjasama antar wilayah dan antar daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
h	Infrastruktur seimbang dengan pengembangan kota	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong program pembangunan turap/talud/brojong program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan program lingkungan sehat perumahan program pembangunan/perbaikan gedung daerah dan fasilitas umum program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong program pembangunan turap/talud/brojong program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan program lingkungan sehat perumahan program pembangunan/perbaikan gedung daerah dan fasilitas umum
i	Pembangunan dan pengembangan kota terarah dan jelas	program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang
j	Kuantitas dan kualitas RTH	program pengelolaan RTH
k	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya sungai	rehabilitasi saluran irigasi rehabilitasi lahan sempadan sungai pada DAS dengan penanaman rumput akar wangi
l	Infrastruktur transportasi handal dan terintegrasi	program peningkatan pelayanan angkutan
m	pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan	-
n	Prasarana dan sarana publik yang handal	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong program pembangunan turap/talud/brojong program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan program lingkungan sehat perumahan program pembangunan/perbaikan gedung daerah dan fasilitas umum

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
o	Hunian dengan prasarana dan sarana pendukung	program lingkungan sehat perumahan
p	Pengendalian pembangunan infrastruktur	program pengendalian pemanfaatan tata ruang
q	Penguatan sistem perencanaan infrastruktur	program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang
r	Kualitas dan kuantitas air bersih	pembangunan jaringan air minum
s	Penguatan sistem transportasi	program peningkatan pelayanan angkutan program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
t	Pengembangan perumahan dan permukiman	program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang program lingkungan sehat perumahan penyusunan naskah akademis RP4D
u	Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur	program pengendalian pemanfaatan tata ruang
v	Fungsi tata ruang dimanfaatkan secara konsisten	program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang
w	Pertumbuhan dan sinergi antar wilayah	program perencanaan tata ruang
5	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan	
a	Tata kelola ekonomi	program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM pemeliharaan pasar program pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar
b	Perubahan kebijakan-kebijakan fiskal	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
		<p>program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM</p> <p>penyelenggaraan promosi produk UMKN di dalam dan luar propinsi</p>
c	Pelaku ekonomi yang unggul	<p>program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</p> <p>program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM</p> <p>bimbingan teknis kewirausahaan bagi wirausaha baru bagi anggota keluarga pabrik rokok</p>
d	Tata kelola industri kecil & menengah	<p>program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</p> <p>program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM</p> <p>penyelenggaraan promosi produk UMKN di dalam dan luar propinsi</p>
e	Peranan pemerintah	penyelenggaraan promosi produk UMKN di dalam dan luar propinsi
f	Kemitraan	
g	Pengembangan Kekuatan ekonomi	<p>program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>program peningkatan dan pengembangan ekspor</p>
h	Peningkatan Produktivitas dan inovasi	
i	Pengembangan Keuangan daerah	
6	Mewujudkan Kota Yang Demokratis	
a	Partisipasi politik warga yang tinggi	
b	Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik	
c	Lembaga-lembaga publik yang efektif	<p>pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat</p> <p>pembinaan dan pelatihan organisasi kewanitaan</p>
d	Budaya politik yang sehat	
e	Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses	
f	pembangunan politik melalui pendidikan <i>citizenship</i>	forum komunikasi bagi pemerintah, parpol, dan lembaga swadaya masyarakat

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
g	Pelaksanaan kebijakan publik	
h	Kualitas tatalaksana pengawasan kinerja badan-badan publik	
i	Keefektifitasan lembaga pemerintahan kota	
j	Pengembangan budaya politik yang sehat	
k	Media komunikasi politik	
7	Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional	
a	supremasi hukum yang konsisten	
b	kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa	
c	efektifitas dan efisiensi kelembagaan	
d	Good Governance and Clean Government	
e	Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum	
8	Kota Agamis, bermoral, beretika, beradap, berbudaya, beriman dan bertaqwa	
a	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	pelaksanaan pembinaan guru ngaji dan sekolah minggu pengembangan Tilawatil qur'an peningkatan keimanan kesejahteraan masjid Baiturrohim
b	Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama	
9	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan	

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
a	Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah	program perencanaan pembangunan ekonomi program perencanaan tata ruang program pengendalian pemanfaatan tata ruang
b	Penataan administrasi kependudukan	
c	Terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial	
d	Fungsi RTRW sebagai acuan dan alat koordinasi	program perencanaan tata ruang
e	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara sistematis	program pengendalian pemanfaatan tata ruang
f	Fungsi dan manfaat SDA	program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
g	Rehabilitasi sumber daya alam	program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
h	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	program pengelolaan RTH
i	Aspek-aspek tak berwujud SDA	
j	Melestarikan aset lingkungan buatan	
k	Penanaman kecintaan terhadap SDA, lingkungan hidup, dan lingkungan buatan	
l	Generasi muda penggerak dan peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup	
m	Sosialisasi konsep pembangunan berkelanjutan	
n	Pendidikan dan pelatihan rehabilitasi kerusakan lingkungan	
o	Sosialisasi Pengendalian pencemaran lingkungan	
p	Sosialisasi Pengendalian pelestarian bangunan dan/atau lingkungan dengan nilai historis dan nilai keilmuan	

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
q	Pengetahuan tentang fungsi kualitas lingkungan	
r	Keterlibatan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	
s	Koordinasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	
t	Pengawasan dan penegakan hukumnya dalam pelestarian lingkungan alam maupun buatan	
u	Pola hidup sehat dan seimbang memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan hidup	pengadaan pengolahan sampah dengan prinsip 3R
10	Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	
a	promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
b	Meningkatkan pelayanan kesehatan	peningkatan SE kesehatan jamaah Haji
c	Meningkatkan upaya kesehatan	pemantapan upaya kesehatan gigi dan mulut
		pertemuan pemantapan perawatan kesehatan masyarakat
		peningkatan pelayanan spesialisik Kota Malang
		program perbaikan gizi masyarakat
		program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
d	Meningkatkan penyehatan lingkungan	pengembangan kota sehat
e	pelayanan kesehatan reproduksi	
f	persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang	
g	Penataan administrasi kependudukan	

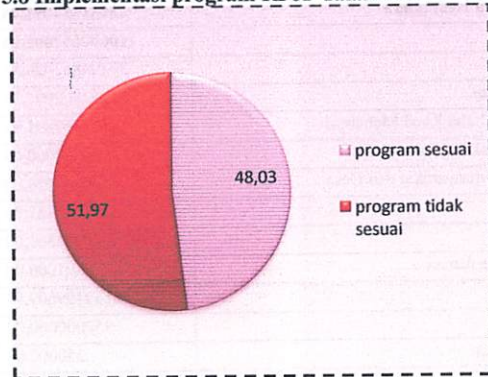
NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
h	peran pemerintah Indonesia	
i	pendidikan seks dan reproduksi sejak dini	
j	pelayanan kesehatan masyarakat rentan	program perbaikan gizi masyarakat
		penanggulangan kekurangan energi protein gizi buruk dan kurang gizi
k	perilaku hidup sehat	program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
l	kualitas gizi masyarakat	program perbaikan gizi masyarakat
m	akses dan pemerataan pelayanan pendidikan	pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP
		penyediaan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera
		bantuan pengentasan siswa pra sejahtera untuk memperoleh pendidikan
		pelayanan pendidikan orang dewasa yang berkelanjutan
		pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SMA dan SMK
		penyelenggaraan ujian paket C
		bantuan khusus siswa miskin bagi siswa SMA/SMK
		peningkatan lifeskill bagi warga prasejahtera
		pemeliharaan rutin/berkala ruang lembaga pendidikan
		kegiatan peningkatan infrastruktur pendidikan (DPPID)
n	kualitas dan relevansi pendidikan	program peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		peningkatan kualifikasi dari SLTA/Diploma ke S1 PAUD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam bidang bahasa
		peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter
		program peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		peningkatan kualifikasi dari SLTA/Diploma ke S1 PAUD bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
o	peluang dan lapangan kerja formal maupun informal	
p	peningkatan produktivitas	

NO.	PROGRAM RPJP	IMPLEMENTASI PROGRAM APBD 2012
q	pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja	
r	sistem pengakuan kompetensi profesi	
s	pasar kerja fleksibel, keselamatan kerja, serta hubungan industrial harmonis	
t	kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	
u	sistem hukum dan perlindungan sosial	
v	sarana pelayanan sosial	
w	Meningkatkan derajat masyarakat	
x	penanganan masalah sosial	
y	Membina kesempatan usaha kesejahteraan sosial	
z	Pengentasan kemiskinan	
aa	Mengembangkan budaya tolong menolong	
ab	Pemberdayaan perempuan	pembinaan dan pelatihan organisasi kewanitaan
ac	Menurunkan intensitas tindak kekerasan	
ad	kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender	
ae	Terbentuknya Keluarga berencana	

Sumber : Hasil analisa

Berikut adalah persentase tingkat kesesuaian program dalam RPJP dengan implementasi program pada APBD :

Grafik 5.8 Implementasi program RPJP dalam APBD Tahun 2012



Dari persentase di atas dapat dilihat bahwa program yang sesuai lebih kecil dengan 48,03 % dan program tidak sesuai dengan 51,97 %.

5.2.2 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) Tahun 2013

Berikut adalah besaran jumlah dan persentase alokasi anggaran masing-masing SKPD tahun 2013 :

Tabel 5.22 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2013

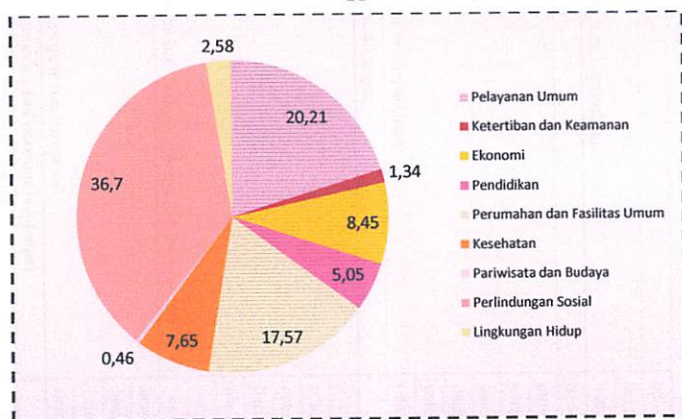
PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA	1543987138516,98	100,00
Pelayanan Umum	336300190123,85	21,78
Perencanaan Pembangunan	7667336193,09	
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	312547768754,62	
Ketahanan pangan	1749200000,00	
Statistik	523576600,00	

PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN
Kearsipan	3.634.102.831,57	
Komunikasi dan Informatika	10,178.205.744,57	
Ketertiban dan Keamanan	23981917091,46	1,55
Ekonomi	110690667005,58	7,17
Perhubungan	39294862020,53	
Ketenagakerjaan	31252862095,39	
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5117467891,95	
Penanaman modal	680000000,00	
Pemberdayaan masyarakat dan Desa	5424442950,00	
Pertanian	6767182437,77	
Kehutanan	392500,00	
kelautan dan Perikanan	5301000,00	
Perdagangan	20549499609,94	
Industri	950000000,00	
Ketransmigrasian	250000,00	
Lingkungan Hidup	77058223280,09	4,99
Penataan Ruang	32524000,00	
Lingkungan Hidup	73096570793,79	
Pertanahan	709252486,30	
Perumahan dan Fasilitas Umum	230474424550,14	14,93
Pekerjaan Umum	170481592904,14	
Perumahan	59992831646,00	
Kesehatan	125580857858,73	8,13
Pariwisata dan Budaya	8367357143,06	0,54
Kebudayaan	6467505143,06	
Parwisata	1899852000,00	
Pendidikan	599660682590,97	38,84
Pendidikan	583113230386,03	
Kepemudaan dan olahraga	16547452204,94	
Perlindungan Sosial	31872818873,11	2,06
Kependudukan dan Catatan Sipil	6659013225,66	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9207465647,45	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	29296000,00	
Sosial	130767400,00	

Sumber : Hasil analisa

Dari besaran alokasi APBD tahun 2013 di atas dapat diketahui bidang Pendidikan memiliki alokasi anggaran terbesar dengan 38,84%, Pelayanan Umum dengan 21,78 %, dan bidang Perumahan dan Fasilitas Umum dengan 14,93 %.

Grafik 5.9 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2013



Berikut adalah kesesuaian proram yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 dengan realisasi program dalam APBD 2013, sebagai berikut :

Tabel 5.23 Implementasi pembangunan dengan APBD Tahun 2013 :

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
1.	Kota Pendidikan yang berorientasi global	
a	Tenaga berkualitas (bersertifikasi)	peningkatan mutu guru kelas untuk mata pelajaran MIPA peningkatan profesional guru fisika SMP dan SMA peningkatan profesional guru SD peningkatan kompetensi guru SD
b	Kebijakan politik (peningkatan derajat pendidikan)	pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SD penyelenggaraan/pengentasan wajar pendidikan dasar 9 tahun (untuk SD 6 tahun) penyelenggaraan/pengentasan wajar pendidikan dasar 9 tahun (untuk SMP 3 tahun) bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMP bantuan khusus siswa miskin bagi SMA/SMK bimbingan belajar dari siswa keluarga prasejahtera (posko peduli)
c	Kesadaran masyarakat	
d	Peningkatan akses dan ruang	bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SD bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMP bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMA/SMK (seragam) bantuan pengentasan siswa SMA,SMK prasejahtera untuk memperoleh pendidikan bantuan khusus siswa miskin bagi SMA/SMK bimbingan belajar dari siswa keluarga prasejahtera (posko peduli) peningkatan mutu pendidikan non formal dan lifeskill bagi siswa prasejahtera
e	Sarana dan prasarana unggul	peningkatan sarana prasarana PAUD pemeliharaan rutin/berkala gedung SD peningkatan sarana prasarana SDLB/MI/SD negeri

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
		pengadaan sarana prasarana pendidikan SD pengadaan sarana prasarana pendidikan SMP pengadaan sarana prasarana perpustakaan SD
f	Mutu dan pelayanan pendidikan	peningkatan mutu guru kelas untuk mata pelajaran MIPA peningkatan mutu pendidikan non formal dan lifeskill bagi siswa prasejahtera peningkatan profesional guru SD peningkatan kompetensi guru SD pembinaan guru matematika ke semua guru matematika SMP, SMA, SMK program manajemen pelayanan pendidikan
g	Informasi yang mudah dan terjangkau	
h	Kebijakan politik (kebijakan-kebijakan publik)	pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SD penyelenggaraan/pengentasan wajar pendidikan dasar 9 tahun (untuk SD 6 tahun) penyelenggaraan/pengentasan wajar pendidikan dasar 9 tahun (untuk SMP 3 tahun) bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMP bantuan khusus siswa miskin bagi SMA/SMK bimbingan belajar dari siswa keluarga prasejahtera (posko peduli) peningkatan sarana prasarana PAUD pemeliharaan rutin/berkala gedung SD peningkatan sarana prasarana SDLB/MI/SD negeri
		pengadaan sarana prasarana pendidikan SD pengadaan sarana prasarana pendidikan SMP pengadaan sarana prasarana perpustakaan SD
i	Kesiapan dan daya dukung masyarakat	

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
2	Terwujudnya SDM yang Berkualitas	
a	Kualitas SDM	
b	pemahaman masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan	pelaksanaan Musrembang peningkatan pemahaman pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat
c	Terwujudnya partisipasi konkrit	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
d	Kualitas tenaga kerja	program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
e	Partisipasi masyarakat	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
f	Peningkatan IPM	
g	Peningkatan indeks daya saing	
h	Peningkatan pengguna media informasi	
i	Peningkatan jumlah tenaga kerja handal dan terampil	program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
j	Terciptanya kesejahteraan yang merata	
3	Lingkungan kota pendidikan yang kondusif	
a	Penyediaan sarana dan prasarana unggul	peningkatan sarana prasarana PAUD pemeliharaan rutin/berkala gedung SD peningkatan sarana prasarana SDLB/MI/SD negeri pengadaan sarana prasarana pendidikan SD pengadaan sarana prasarana pendidikan SMP pengadaan sarana prasarana perpustakaan SD
b	Kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya	program pengembangan nilai budaya program pengelolaan kekayaan budaya
c	Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan	program pengembangan nilai budaya

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
	Kota pada masa kolonial	
d	Fasilitas penunjang pendidikan	pengadaan sarana perpustakaan digital
e	Pemanfaatan ICT	
f	Membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh Lapisan masyarakat	pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus SD dan SMP penyelenggaraan/pengentasan wajar pendidikan dasar 9 tahun (untuk SD 6 tahun) penyelenggaraan/pengentasan wajar pendidikan dasar 9 tahun (untuk SMP 3 tahun) bantuan pengentasan siswa SMA,SMK prasejahtera untuk memperoleh pendidikan
4	Pembangunan Wilayah Dan Infrastruktur Berkelanjutan	
a	Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong program pembangunan turap/talud/brojong program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan program lingkungan sehat perumahan program perencanaan tata ruang program perencananaan prasarana wilayah dan sumber daya alam program pengendalian pemanfaatan ruang
b	Sistem perencanaan efektif dan berkelanjutan	program perencanaan tata ruang program perencananaan prasarana wilayah dan sumber daya alam program pengendalian pemanfaatan ruang
c	Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	program pengendalian pemanfaatan ruang
d	Perkembangan dan pertumbuhan fisik sampai pelosok kota	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		program pembangunan turap/talud/brojong
		program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
		program lingkungan sehat perumahan

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
e	Mewujudkan RTH 30 % secara berkelanjutan	program pengelolaan areal pemakaman
		program pengelolaan RTH
f	Stakeholders mengakomodir kepentingan	
g	Sinergi dan kerjasama antar wilayah dan antar daerah	rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
h	Infrastruktur seimbang dengan pengembangan kota	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		program pembangunan turap/talud/brojong
		program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
		program lingkungan sehat perumahan
		program perencanaan tata ruang
		program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
		program pemanfaatan ruang
		program pengendalian pemanfaatan ruang
i	Pembangunan dan pengembangan kota terarah dan jelas	program perencanaan tata ruang
		program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
		program pemanfaatan ruang
		program pengendalian pemanfaatan ruang
j	Kuantitas dan kualitas RTH	program pengelolaan areal pemakaman
		program pengelolaan RTH
k	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya sungai	
l	Infrastruktur transportasi handal dan terintegrasi	program peningkatan pelayanan angkutan
m	pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan	
n	Prasarana dan sarana publik yang handal	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		program pembangunan turap/talud/brojong
		program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
		program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
o	Hunian dengan prasarana dan sarana pendukung	program lingkungan sehat perumahan
p	Pengendalian pembangunan infrastruktur	program pengendalian pemanfaatan ruang
q	Penguatan sistem perencanaan infrastruktur	program perencanaan tata ruang program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
r	Kualitas dan kuantitas air bersih	
s	Penguatan sistem transportasi	program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
t	Pengembangan perumahan dan permukiman	program lingkungan sehat perumahan
u	Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur	program pengendalian pemanfaatan ruang
v	Fungsi tata ruang dimanfaatkan secara konsisten	program perencanaan tata ruang program pemanfaatan ruang program pengendalian pemanfaatan ruang
w	Pertumbuhan dan sinergi antar wilayah	program pengendalian pemanfaatan ruang program perencanaan tata ruang program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
5	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan	
a	Tata kelola ekonomi	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan program perencanaan pembangunan ekonomi
b	Perubahan kebijakan-kebijakan fiskal	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah program pengembangan nilai budaya program pengelolaan kekayaan budaya
	... ekonomi yang unggul	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
d	Tata kelola industri kecil & menengah	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan program pengembangan industri kecil dan menengah program pengembangan sentra-sentra industri potensial
e	Peranan pemerintah	program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah program pengembangan industri kecil dan menengah program pengembangan sentra-sentra industri potensial
f	Kemitraan	
g	Pengembangan Kekuatan ekonomi	program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan program peningkatan dan pengembangan ekspor program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri program perencanaan pembangunan ekonomi
h	Peningkatan Produktivitas dan inovasi	program peningkatan dan pengembangan ekspor program pengembangan industri kecil dan menengah program pengembangan sentra-sentra industri potensial
i	Pengembangan Keuangan daerah	program peningkatan dan pengembangan ekspor program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
6	Mewujudkan Kota Yang Demokratis	
a	Partisipasi politik warga yang tinggi	
b	Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik	
c	Lembaga-lembaga publik yang efektif	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
d	Budaya politik yang sehat	
e	Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses	
f	pembangunan politik melalui pendidikan <i>citizenship</i>	program pendidikan politik masyarakat

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
g	Pelaksanaan kebijakan publik	
h	Kualitas tatalaksana pengawasan kinerja badan-badan publik	
i	Keefektifitasan lembaga pemerintahan kota	program peningkatan kapasitas anggota satuan pelaksana penanggulangan bencana
j	Pengembangan budaya politik yang sehat	program pendidikan politik masyarakat
k	Media komunikasi politik	
7	Mewujudkan Tata Kepemerintahan Dan Aparatur Yang Professional	
a	supremasi hukum yang konsisten	
b	kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
c	efektifitas dan efisiensi kelembagaan	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
d	Good Governance and Clean Government	
e	Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum	
8	Kota Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertaqwa	
a	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	
b	Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama	program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan	
a	Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah	
b	Penataan administrasi kependudukan	
c	Terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial	
d	Fungsi RTRW sebagai acuan dan alat koordinasi	program pengendalian pemanfaatan ruang
e	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara sistematis	program perencanaan tata ruang

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
f	Fungsi dan manfaat SDA	program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
g	Rehabilitasi sumber daya alam	program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
h	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	program pengelolaan areal pemakaman
i	Aspek-aspek tak berwujud SDA	program pengelolaan RTH
j	Melestarikan aset lingkungan buatan	
k	Penanaman kecintaan terhadap SDA, lingkungan hidup, dan lingkungan buatan	
l	Generasi muda penggerak dan peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup	
m	Sosialisasi konsep pembangunan berkelanjutan	
n	Pendidikan dan pelatihan rehabilitasi kerusakan lingkungan	
o	Sosialisasi Pengendalian pencemaran lingkungan	
p	Sosialisasi Pengendalian pelestarian bangunan dan/atau lingkungan dengan nilai historis dan nilai keilmuan	program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
q	Pengetahuan tentang fungsi kualitas lingkungan	
r	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	
s	Koordinasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	
t	Pengawasan dan penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan alam maupun buatan	program upaya kesehatan masyarakat
u	Pola hidup sehat dan seimbang memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan hidup	program obat dan pembekalan kesehatan
10	Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	program upaya kesehatan masyarakat
a	promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	program obat dan pembekalan kesehatan

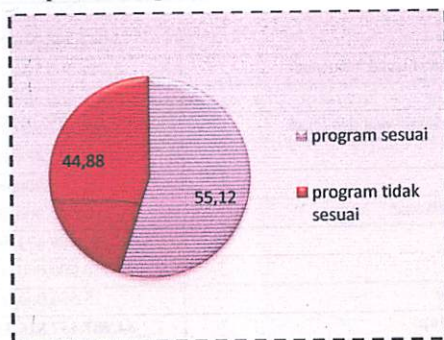
NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
b	Meningkatkan pelayanan kesehatan	program upaya kesehatan masyarakat
c	Meningkatkan upaya kesehatan	program pengembangan lingkungan sehat
d	Meningkatkan penyehatan lingkungan	program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
e	pelayanan kesehatan reproduksi	
f	persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang	
g	Penataan administrasi kependudukan	
h	peran pemerintah Indonesia	
i	pendidikan seks dan reproduksi sejak dini	
j	pelayanan kesehatan masyarakat rentan	program upaya kesehatan masyarakat
k	perilaku hidup sehat	
l	kualitas gizi masyarakat	bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SD
m	akses dan pemerataan pelayanan pendidikan	bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMP
		bantuan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMA/SMK (seragam)
		bantuan pengentasan siswa SMA,SMK prasejahtera untuk memperoleh pendidikan
		bantuan khusus siswa miskin bagi SMA/SMK
		bimbingan belajar dari siswa keluarga prasejahtera (posko peduli)
		peningkatan mutu pendidikan non formal dan lifeskill bagi siswa prasejahtera
		program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
n	kualitas dan relevansi pendidikan	program manajemen pelayanan pendidikan program peningkatan kesempatan kerja
o	peluang dan lapangan kerja formal maupun informal	
p	peningkatan produktivitas	program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
q	pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja	
r	sistem menaekuan kompetensi profesi	

NO.	PROGRAM RPJP	APBD 2013
s	pasar kerja fleksibel, keselamatan kerja, serta hubungan industrial harmonis	
t	kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	
u	sistem hukum dan perlindungan sosial	
v	sarana pelayanan sosial	
w	Meningkatkan derajat masyarakat	
x	penanganan masalah sosial	program peningkatan kesempatan kerja
y	Membina kesempatan usaha kesejahteraan sosial	
z	Pengentasan kemiskinan	
aa	Mengembangkan budaya tolong menolong	
ab	Pemberdayaan perempuan	
ac	Menurunkan intensitas tindak kekerasan	
ad	kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender	program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
ae	Terbentuknya Keluarga berencana	

Sumber : Hasil analisa

Berikut adalah persentase tingkat kesesuaian program RPJP dengan implementasi dalam APBD :

Grafik 5.10 Implementasi program RPJP dalam APBD Tahun 2013



Dari grafik di atas mengalami peningkatan persentase dari tahun 2012, dimana pada tahun 2013 program yang sesuai sebesar 55,12 % dan program yang tidak sesuai dengan 44,88 %.

4.2.3 Implementasi rencana program (RPJP) dengan alokasi anggaran program pemerintah (APBD) Tahun 2014

Berikut adalah besaran jumlah dan persentase alokasi anggaran masing-masing SKPD tahun 2014 :

Tabel 5.24 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2014

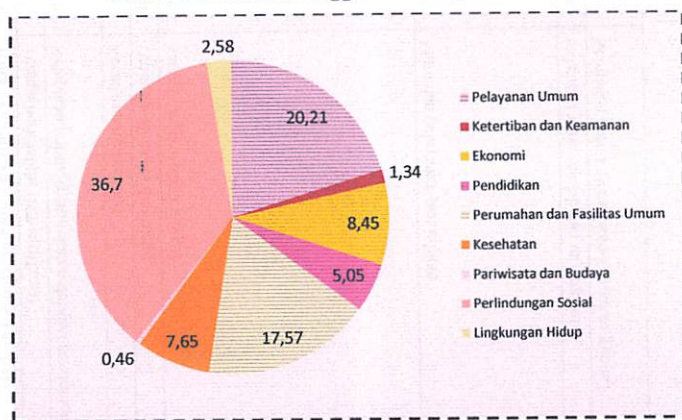
PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA	1.683.670.042.842,82	100,00
Pelayanan Umum	340.261.092.314,57	20,21
Perencanaan Pembangunan	10.954.772.815,67	
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	309.515.543.018,67	
Ketahanan Pangan	2.221.638.438,69	
Statistik	951.745.600,00	
Kearsipan	5.056.675.208,51	
Komunikasi dan Informatika	11.560.717.233,03	

PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN
Ketertiban dan ketentraman	22.577.240.020,36	1,34
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	22.577.240.020,36	
Ekonomi	142.257.640.812,44	8,45
Perhubungan	29.040.767.356,43	
Ketenagakerjaan	33.042.796.296,20	
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.721.399.804,07	
Penanaman Modal	829.469.500,00	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.860.637.960,00	
Pertanian	7.874.372.424,18	
Kehutanan	40.000.000,00	
Kelautan dan Perikanan	562.158.000,00	
Perdagangan	28.120.489.471,56	
Industri	4.150.000.000,00	
Ketransmigrasian	15.550.000,00	
Lingkungan hidup	84.987.437.826,32	5,05
Penataan Ruang	2.204.000.000,00	
Lingkungan Hidup	82.373.651.826,32	
Pertanahan	409.786.000,00	
Perumahan dan fasilitas umum	295.749.820.895,10	17,57
Pekerjaan Umum	229.805.274.895,10	
Perumahan	65.944.546.000,00	
Kesehatan	128.723.488.388,42	7,65
Pariwisata dan budaya	7.719.545.591,01	0,46
Kebudayaan	6.226.971.191,01	
Pariwisata	1.492.574.400,00	
Pendidikan	617.906.299.671,97	36,70
Pendidikan	603.393.841.647,27	
Kepemudaan dan Olahraga	14.512.458.024,69	
Perlindungan Sosial	43.487.477.322,64	2,58
Kependudukan dan Catatan Sipil	8.478.651.554,53	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.043.550.707,54	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5.671.070.000,00	
Sosial	18.294.205.060,57	

Sumber : Hasil analisa

Dari besaran alokasi APBD tahun 2014 di atas dapat diketahui bidang Pendidikan memiliki alokasi anggaran terbesar dengan 36,70%, Pelayanan Umum dengan 20,21 %, dan bidang Perumahan dan Fasilitas Umum dengan 17,57 %.

Grafik 5.11 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2014



Berikut adalah kesesuaian program yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 dengan realisasi program dalam APBD 2014, sebagai berikut :

Tabel 5.25 Implementasi pembangunan dengan APBD Tahun 2014 :

NO.	PROGRAM	APBD 2014
I	Kota Pendidikan yang berorientasi global	
a	Tenaga berkualitas (bersertifikasi)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
b	Kebijakan politik (peningkatan derajat pendidikan)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Non Formal
c	Kesadaran masyarakat	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
d	Peningkatan akses dan ruang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
e	Sarana dan prasarana unggul	Rehabilitasi Gedung TK
		Rehab Sedang/Berat Gedung SD
		Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD
		Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP
		Pengadaan Alat Kesenian
		Pengadaan Alat Peraga SMP
		Pengadaan Alat Peraga SD
		Pembangunan SMKN 13
		Pembangunan Asrama SMKN 13
f	Mutu dan pelayanan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Menengah
		Program Pendidikan Non Formal
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
g	Informasi yang mudah dan terjangkau	
h	Kebijakan politik (kebijakan-kebijakan publik)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Non Formal

NO.	PROGRAM	APBD 2014
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
i	Kesiapan dan daya dukung masyarakat	
2	Terwujudnya SDM yang Berkualitas	
a	Kualitas SDM	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
		dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
		Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
b	pemahaman masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan
c	Terwujudnya partisipasi konkrit	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
d	Kualitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
e	Partisipasi masyarakat	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
f	Peningkatkan IPM	
g	Peningkatkan indeks daya saing	
h	Peningkatkan pengguna media informasi	
i	Peningkatkan jumlah tenaga kerja handal dan terampil	
j	Terciptanya kesejahteraan yang merata	
3	Lingkungan kota pendidikan yang kondusif	
a	Penyediaan sarana dan prasarana unggul	Rehab Sedang/Berat Gedung SD
		Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD
		Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP
		Pengadaan Alat Kesenian
		Pengadaan Alat Peraga SMP

NO.	PROGRAM	APBD 2014
		Pengadaan Alat Peraga SD
		Pembangunan SMKN 13
		Pembangunan Asrama SMKN 13
b	Kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya	
c	Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan Kota pada masa kolonial	
d	Fasilitas penunjang pendidikan	
e	Pemanfaatan ICT	
f	Membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh Lapisan masyarakat	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA Prasejahtera Siswa SMA,SMK
4	Pembangunan Wilayah Dan Infrastruktur Berkelanjutan	
a	Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Lingkungan Sehat Perumahan
b	Sistem perencanaan efektif dan berkelanjutan	Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

NO.	PROGRAM	APBD 2014
c	Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Pemanfaatan Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d	Perkembangan dan pertumbuhan fisik sampai pelosok kota	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		Program Pembangunan turap/talud/brojong
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Program pembangunan/perbaikan Gedung Daerah dan Fasilitas Umum
e	Mewujudkan RTH 30 % secara berkelanjutan	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
f	Stakeholders mengakomodir kepentingan	
g	Sinergi dan kerjasama antar wilayah dan antar daerah	
h	Infrastruktur seimbang dengan pengembangan kota	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
i	Pembangunan dan pengembangan kota terarah dan jelas	Program Perencanaan Tata Ruang
		Program Pemanfaatan Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
j	Kuantitas dan kualitas RTH	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
k	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya sungai	
l	Infrastruktur transportasi handal dan terintegrasi	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		Program peningkatan pelayanan angkutan
		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
m	pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan	
n	Prasarana dan sarana publik yang handal	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

NO.	PROGRAM	APBD 2014
o	Hunian dengan prasarana dan sarana pendukung	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
p	Pengendalian pembangunan infrastruktur	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
q	Penguatan sistem perencanaan infrastruktur	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
r	Kualitas dan kuantitas air bersih	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
s	Penguatan sistem transportasi	
t	Pengembangan perumahan dan permukiman	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
u	Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
v	Fungsi tata ruang dimanfaatkan secara konsisten	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Program Pemanfaatan Ruang
w	Pertumbuhan dan sinergi antar wilayah	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan	
a	Tata kelola ekonomi	Program perencanaan pembangunan ekonomi
b	Perubahan kebijakan-kebijakan fiskal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Nilai Budaya
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
		Program Penataan Struktur Industri
c	Pelaku ekonomi yang unggul	
d	Tata kelola industri kecil & menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

NO.	PROGRAM	APBD 2014
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
c	Peranan pemerintah	
f	Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan
g	Pengembangan Kekuatan ekonomi	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
h	Peningkatan Produktivitas dan inovasi	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
		Program pengembangan budidaya perikanan
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
i	Pengembangan Keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
6	Mewujudkan Kota Yang Demokratis	
a	Partisipasi politik warga yang tinggi	
b	Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik	
c	Lembaga-lembaga publik yang efektif	
d	Budaya politik yang sehat	
e	Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

NO.	PROGRAM	APBD 2014
f	pembangunan politik melalui pendidikan <i>citizenship</i>	
g	Pelaksanaan kebijakan publik	
h	Kualitas tatalaksana pengawasan kinerja badan-badan publik	
i	Keefektifitasan lembaga pemerintahan kota	
j	Pengembangan budaya politik yang sehat	Program Pendidikan Politik Masyarakat
k	Media komunikasi politik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7	Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Professional	
a	supremasi hukum yang konsisten	
b	kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa	
c	efektifitas dan efisiensi kelembagaan	
d	Good Governance and Clean Government	
e	Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum	
8	Kota Agamis, bermoral, beretika, beradap, berbudaya, beriman dan bertaqwa	
a	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	
b	Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama	
9	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan	
a	Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah	
b	Penataan administrasi kependudukan	
c	Terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
d	Fungsi RTRW sebagai acuan dan alat koordinasi	Program Penerapan dan Penegakan Hukum
e	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara sistematis	Program Perencanaan Tata Ruang

NO.	PROGRAM	APBD 2014
		Program Pemanfaatan Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
f	Fungsi dan manfaat SDA	
g	Rehabilitasi sumber daya alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
h	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
i	Aspek-aspek tak berwujud SDA	
j	Melestarikan aset lingkungan buatan	
k	Penanaman kecintaan terhadap SDA, lingkungan hidup, dan lingkungan buatan	
l	Generasi muda penggerak dan peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup	
m	Sosialisasi konsep pembangunan berkelanjutan	
n	Pendidikan dan pelatihan rehabilitasi kerusakan lingkungan	
o	Sosialisasi Pengendalian pencemaran lingkungan	
p	Sosialisasi Pengendalian pelestarian bangunan dan/atau lingkungan dengan nilai historis dan nilai keilmuan	
q	Pengetahuan tentang fungsi kualitas lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
r	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	
s	Koordinasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	
t	Pengawasan dan penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan alam maupun buatan	
u	Pola hidup sehat dan seimbang memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan hidup	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10	Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	

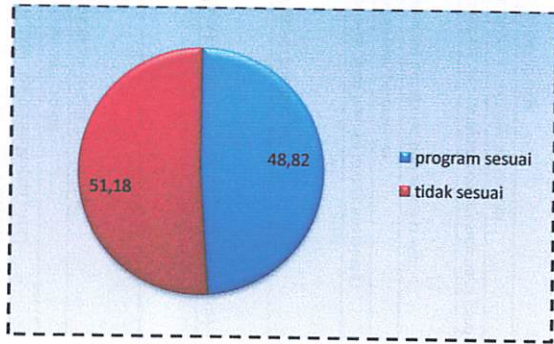
NO.	PROGRAM	APBD 2014
a	promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
b	Meningkatkan pelayanan kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
c	Meningkatkan upaya kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
d	Meningkatkan penyehatan lingkungan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
e	pelayanan kesehatan reproduksi	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
f	persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang	
g	Penataan administrasi kependudukan	
h	peran pemerintah Indonesia	
i	pendidikan seks dan reproduksi sejak dini	
j	pelayanan kesehatan masyarakat rentan	
k	perilaku hidup sehat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
l	kualitas gizi masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
m	akses dan pemerataan pelayanan pendidikan	
n	kualitas dan relevansi pendidikan	
o	peluang dan lapangan kerja formal maupun informal	
p	peningkatan produktivitas	
q	pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja
r	sistem pengakuan kompetensi profesi	
s	pasar kerja fleksibel, keselamatan kerja, serta hubungan industrial harmonis	
t	kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Program peningkatan kualitas pelayanan publik

NO.	PROGRAM	APBD 2014
u	sistem hukum dan perlindungan sosial	Program Penerapan dan Penegakan Hukum
v	sarana pelayanan sosial	
w	Meningkatkan derajat masyarakat	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
x	penanganan masalah sosial	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
y	Membina kesempatan usaha kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
z	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
aa	Mengembangkan budaya tolong menolong	
ab	Pemberdayaan perempuan	
ac	Menurunkan intensitas tindak kekerasan	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
ad	kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
ae	Terbentuknya Keluarga berencana	

Sumber : Hasil analisa

Berikut adalah persentase tingkat kesesuaian program RPJP dengan implementasi dalam APBD :

Grafik 5.12 implementasi program RPJP dalam APBD Tahun 2014



Dimana program yang telah terealisasi adalah sebesar 48,82 % dan yang tidak terealisasi adalah 51, 18 %.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Bagian ini merupakan akhir dari keseluruhan pembahasan dari keseluruhan yang telah dilakukan. Pada bab ini akan dibahas kesimpulan mengenai kesesuaian RPJP-RTRW dan implementasi pembangunan. Dimana pada kesesuaian muatan dari RPJP-RTRW dan implementasi pembangunan dapat dikatakan belum sesuai. Selain itu akan di ungkapkan pula beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait.

6.1.1 Kesesuaian RPJP-RTRW

RPJP merupakan produk pembangunan yang bermuatan program-program fisik dan non fisik sedangkan RTRW adalah produk tata ruang kota yang merupakan hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang suatu wilayah. Kesesuaian antara RPJP dengan RTRW dapat diketahui dari keterkaitan masing-masing muatan program yang tertuang di dalamnya.

Dari muatan kesesuaian masing-masing muatan yang telah dianalisis, didapatkan persentase Visi dengan Tujuan 50 % tidak ada keterkaitan, persentase Misi dengan Kebijakan 79,69 % tidak ada keterkaitan, dan Program dengan Strategi yang ada dalam masing-masing produk belum sepenuhnya mencakup isi dari muatan keduanya (dari 10 program hanya 4 program saja yang terkait dengan strategi dalam RPJP. Jadi secara umum muatan RPJP dengan RTRW tidak sesuai, hal ini dikarenakan RPJP bermuatan program-program dari masing-masing SKPD (dari pemerintah daerah untuk pembangunan (fisik dan non fisik) dan kesejahteraan masyarakat) sedangkan RTRW bermuatan program-program keruangan dari berbagai kepentingan (pemerintah, swasta, stakeholder).

6.1.2 Implementasi pembangunan program RPJP dengan APBD

Implementasi pembangunan dalam pembangunan suatu daerah sangat penting untuk diketahui masyarakat, karena dari implementasi pembangunan tersebut diketahui seberapa serius pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program kerjanya dalam wujud yang nyata baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Dimana pada implementasi tahun 2012 bidang Pendidikan memiliki alokasi anggaran terbesar dengan 40,66%, pada tahun 2013 bidang pendidikan yaitu memiliki alokasi anggaran sebesar 38,84%, dan pada tahun 2014 bidang Pendidikan memiliki alokasi anggaran terbesar dengan 36,70%. Dari besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan dapat disimpulkan bahwa jumlah alokasi anggaran dalam APBD sudah mendukung Visi pemerintah. Namun tidak didukung dengan alokasi yang cukup untuk menunjang Visi pendukung yaitu Budaya, Wawasan Lingkungan dan Sejahtera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP).

Dari persentase kesesuaian program RPJP dengan implementasi program dalam RPJP tahun 2012 dimana program yang sesuai 48,03 % dan program tidak sesuai dengan 51,97 %. Untuk tahun 2013 program yang sesuai 55,12 % dan tidak sesuai 44,88 %. Sedangkan tahun 2014 sesuai 48,82 % dan yang tidak sesuai adalah 51,18 %. Jadi dapat dikatakan implementasi pembangunan untuk 3 tahun belum sepenuhnya terealisasi.

6.2. Rekomendasi

Rekomendasi berikut berdasarkan kesimpulan yang ada pada sub bab sebelumnya, maka rekomendasi dalam penelitian ini berisi saran untuk penelitian selanjutnya, rekomendasi untuk judul penelitian selanjutnya, dan saran untuk pemerintah daerah maupun instansi terkait demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

6.2.1 Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi dan saran ini ditunjukkan untuk penelitian selanjutnya maupun para pembaca atau stakeholder untuk kesesuaian RPJP-RTRW dan implementasi pembangunan :

- a. Ruang lingkup atau muatan yang akan dikaitkan antara RPJP dengan RTRW bisa lebih banyak lagi, tidak hanya terbatas pada Visi, Misi, Kebijakan (RPJP) dan Tujuan, kebijakan, Strategi (RTRW).
- b. Dalam metode content analysis untuk sumber-sumber lain atau referensi lain dapat menggunakan analisis pakar sebagai pendukung analisis.
- c. Untuk implementasi pembangunan dapat menggunakan data atau program fisik saja agar lebih fokus mengetahui tingkat implementasi pembangunan fisik.

6.2.2 Rekomendasi Judul Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi ini ditujukan untuk para peneliti yang akan mengambil judul penelitian tentang masalah kebijakan pemerintah terutama yang berhubungan dengan RPJP – RTRW dan Implementasi program pembangunan.

- a. “Kesesuaian RPJP-RTRW dan Isu-Isu Strategis Kota”
Judul ini akan membahas kesesuaian muatan dari RPJP dan RTRW yang kemudian akan dikaitkan dengan isu-isu strategis kota.
- b. “Kesesuaian Muatan Fisik RPJP-RTRW”
Judul ini akan membahas keterkaitan muatan program fisik dari kedua produk. Yang kemudian akan diketahui arah program pembangunan fisik kota.
- c. “Kesesuaian Muatan Fisik RPJP-RTRW dan Isu-Isu Strategis”
Judul ini akan membahas keterkaitan muatan program fisik dari kedua produk. Yang kemudian akan diketahui arah program pembangunan fisik kota yang akan dikaitkan dengan isu-isu strategis kota.

6.2.3 Kepada Pemerintah Dan Instansi Terkait

Rekomendasi dan saran ini ditunjukkan untuk pemerintah kota, dinas dan instansi terkait yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan terutama yang dalam RPJP, RTRW, dan APBD.

- a. Kesesuaian RPJP – RTRW dari muatan masing-masing produk sebagian besar tidak sesuai, seharusnya muatan yang ada di RPJP dan RTRW harus saling mengacu satu sama lain dan fokus pada bidang pendidikan, budaya, wawasan lingkungan, dan kesejahteraan untuk lebih mendukung Visi Kota Malang yaitu **“Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawaskan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera”**.
- b. Implementasi program pembangunan dari APBD 3 tahun sebagian besar tidak sesuai. Seharusnya kebijakan pemerintah lebih mendukung alokasi anggaran untuk terlaksananya program pembangunan, untuk mendukung program kerja masing-masing bidang/ SKPD demi terwujudnya Visi, Misi Pembangunan Kota Malang yang tertuang dalam RPJP Kota Malang 2005-2025 seperti yang tertera di atas.

DAFTAR PUSTAKA

elitian

uningsih, 2009. "Pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah". Semarang, Universitas Diponegoro,

ah, Mohammad, 2008. Kesesuaian lokasi TPS dar iaspek teknis dan pendapat masyarakat di Kota Serang. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

tion Building for the Integration of National-Regional Development and Spatial Planning, 2010 "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)".

ramoedyo, Deddy MSc. "Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang". Jakarta, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.

ik Pomits Vol. 2, 2013. Content Analysis Dalam "identifikasi Karakteristik Ekonomi Masyarakat Pesisir Brondong" Kabupaten Lamongan.

L, Metode Analisa Perencanaan "Alokasi Anggaran Dan Pelaksanaan Program"

an

ana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang 2005-2025

ana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030.

uran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

uran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

uran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Internet

<http://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah.html>. 12-05-2013

<http://arnienuranisa.blogspot.com/2011/05/pelaksanaan-otonomi-daerah-di-indonesia.html>. 12-06-2013

<http://ampundeh.wordpress.com/2012/03/25/permasalahan-yang-timbul-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah/>. 15-04-2013.

<http://pojokino.wordpress.com>. Otonomi Daerah. 14-06-2013

http://2vanpwk.blogspot.com/2011/10/penggunaan-kebijakan-otonomi-daerah_06.html. 14-06-2013

<http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw280708taru.htm>. 19-07-2013

http://www.researchgate.net/publication/42348754_Upaya_Peningkatan_Manfaat_Rencana_Tata_Ruang_D. 19-05-2013

<bk2009.files.wordpress.com/2012/04/makalah.docx>. 14-06-2013

<http://www.scribd.com/doc/82508324/Pengertian-Penelitian-Deskriptif>. 14-06-2013

<http://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/#more-320/>. 29-06-2013

<http://www.scribd.com/doc/82508324/Pengertian-Penelitian-Deskriptif>. 14-06-2013

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
1.	<p>VISI : "TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA, BERWAWASKAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa pembangunan Kota Malang ditekankan pada pengembangan bidang pendidikan dalam arti yang sangat luas, selain bidang lainnya. 2. Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan kota Malang dalam mencapai visi harus tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat kota Malang (kearifan lokal) melalui pengembangan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan kota Malang menuju kota Metropolitan. 3. Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman kota Malang. Makna wawasan lingkungan (sosial, budaya, alamiah) dalam pembangunan akan memberikan nilai orientasi pembangunan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan perekonomian (pertumbuhan dan pemerataan ekonomi), tetapi juga orientasi pada konservasi (conservation orientations), dan berorientasi pada masyarakat (community orientations). 4. Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spirituil. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 	<p>TUJUAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 2. Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. 	<p>KESESUIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Pendidikan yang berkualitas dengan Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas. - Sebagian kecil (2) dengan Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas - Berwawasan Lingkungan dengan sebagian kecil dari tujuan RTRW (1) didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. - Sejahtera dengan sebagian kecil peningkatan pertumbuhan ekonomi RTRW (1) <p>KETIDAKSESUSIAN : -</p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
2.	<p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadikan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan Mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional Mewujudkan Kota Malang yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan Mewujudkan Kota Malang yang sejahtera. 	<p>KEBIJAKAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kota : <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan pada kesiapan dan kenyamanan Kota Malang sebagai kota yang melayani kegiatan skala nasional; Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional diarahkan pada kemudahan akses dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala regional; Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya diarahkan pada kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Malang; Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala regional dan/atau skala wilayah kota, skala sub wilayah kota, dan skala lingkungan wilayah kota; Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah kota, dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan prasarana dan sarana kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku 	<p>KESESUSIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan <u>dengan</u> Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung; dan Kebijakan pengembangan prasarana wilayah; Kebijakan Struktur Ruang (lemah); Kebijakan penetapan kawasan strategis (lemah) - Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan tersirat <u>dengan</u> kebijakan penetapan kawasan strategis kota - Mewujudkan pertumbuhan ekonomi <u>dengan</u> Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota; dan Kebijakan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya. - Mewujudkan kota sejahtera <u>dengan</u> Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota; dan Kebijakan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya. <p>KETIDAKSESUSIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kota pendidikan berorientasi global - Mewujudkan SDM yang berkualitas - Tata pemerintahan dan aparatur yang profesional - Kota Malang yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa <p><u>Tidak tertuang dalam RTRW.</u></p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ penyediaan utilitas kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan sesuai dengan standar yang berlaku; ❖ pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air, serta pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota; ❖ peningkatan luas RTH sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota; ❖ pengarahannya perkembangan kawasan perumahan sesuai dengan karakteristik kawasan; ❖ peran serta dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. <p>2. Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kota.</p> <p>a. Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.</p> <p>b. Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota serta pertahanan dan keamanan.</p> <p>3. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota : Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).</p>	

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
3.	<p>PROGRAM</p> <p>1. Menuju kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal</p> <p>a. Dalam mewujudkan kota Malang sebagai kota pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal, pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk dapat tercapai dengan terpenuhinya kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Terpenuhinya jumlah tenaga kependidikan yang berkualitas (sertifikasi sesuai UU guru dan Dosen) yang memadai di semua level/jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi). Dalam hal ini pemerintah memberikan arahan yang jelas akan ketercapaian kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan; ❖ Kebijakan politik pemerintah kota yang secara konsisten dan berkelanjutan berorientasi pada kepentingan peningkatan derajat pendidikan masyarakat; ❖ Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan pendidikan. Hal ini ditandai oleh kenaikan APK (angka partisipasi kasar) dan APM (angka partisipasi murni), berkurangnya angka buta huruf; ❖ Peningkatan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi kelompok masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu secara ekonomi; ❖ Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang unggul, dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh; 	<p>STRATEGI</p> <p><u>Tidak terdapat muatan pendidikan dalam strategi Rencana Tata Ruang Kota Malang.</u></p>	<p>KESESUAIAN : -</p> <p>KETIDAKSESUAIAN <u>Semua program pendidikan tidak terdapat dalam RTRW.</u></p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>(Jaringan Informasi Sekolah).</p> <p>b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang mampu menjadi rujukan nasional dan global, diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang unggul direalisasikan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan dan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai dengan standar kompetensi yang diharapkan; ○ Terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif dan nyaman; ○ Tersedianya kelengkapan dan peralatan penunjang kegiatan pendidikan yang memadai; ○ Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan; ○ Terbangunnya fasilitas-fasilitas pendidikan untuk masyarakat penyandang cacat. ◆ Meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; ○ Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pengajar yang berorientasi pada standar nasional dan internasional; ○ Pola penjarangan dan penerimaan pelajar/mahasiswa yang obyektif; ○ Penerapan manajemen pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan; ○ Penerapan metode pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisien; ○ Menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas dalam berkarya guna menyokong dan memotifasi dunia pendidikan. ◆ Akses informasi yang mudah dan terjangkau dengan cara : 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terbangunnya sistem informasi yang memuat segala aspek terkait dengan dunia pendidikan melalui jaringan informasi sekolah (JIS); ○ Kemudahan akses dan pencapaian informasi skala nasional dan internasional, melalui koneksi jaringan pendidikan kota Malang dengan Jardiknas; ○ Penggunaan teknologi tepat guna dalam penyaluran informasi agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau sasaran dengan baik; ○ Promosi nasional dan internasional tentang dunia pendidikan kota Malang; ○ Terjalinya kerjasama yang harmonis antara stakeholders yang terkait dan institusi pendidikan di dalam dan luar negeri sebagai konsekwen pasar bebas dalam kerangka WTO. ◆ Kebijakan politik yang berorientasi pada pendidikan diarahkan untuk memberikan kebijakan-kebijakan publik sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengambilan kebijakan yang terfokus dan memihak pada kemajuan serta perkembangan pendidikan secara menyeluruh; ○ Pengembangan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan fungsi kawasan; ○ Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu secara ekonomi untuk dapat meningkatkan pendidikannya dengan biaya gratis dan/atau terjangkau; ○ Peningkatan kapasitas dan kapabilitas semua stakeholder dalam memajukan pendidikan kota Malang. 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>keberlanjutan program-program pembangunan yang telah disusun;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kesiapan dan daya dukung masyarakat terhadap laju perkembangan dunia pendidikan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif; ○ Peningkatan kesadaran masyarakat kota Malang tentang arah pembangunan kota Malang terkait visi dan misi tentang pendidikan; ○ Terjalinya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan Kota Malang; ○ Terjalinya simbiosis mutualisme antara 3 (tiga) elemen terkait yaitu pemerintah, dunia pendidikan dan masyarakat. 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>2. Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Terwujudnya visi kota Malang dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada nilai agama, etika dan sosial budaya secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani.</p> <p>b. Terwujudnya masyarakat kota Malang yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, makmur, serta berakhlak mulia.</p> <p>c. Arah pembangunan sumber daya manusia dan Iptek diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial, dasar peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat kota Malang menuju persaingan nasional dan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat kota Malang di segala bidang.</p>	<p>STRATEGI</p> <p><u>Tidak terdapat muatan SDM dalam strategi Rencana Tata Ruang Kota Malang.</u></p>	<p>KESESUAIAN : -</p> <p><u>KETIDAKSESUAIAN</u> <u>Semua program SDM tidak tertuang dalam RTRW.</u></p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>3. Lingkungan kota pendidikan yang kondusif</p> <p>a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang unggul dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan di kota Malang ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di semua level pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Dalam rangka menciptakan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan, maka pemerintah kota Malang diarahkan untuk membuat kebijakan-kebijakan menciptakan atmosfer sosial-budaya dan aktifitas yang kondusif bagi proses pendidikan di kota Malang.</p> <p>c. Pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan dalam bentuk pusat-pusat penelitian dan pengembangan, pusat sumber (<i>resource centers</i>), museum dan tinggalan-tinggalan sejarah kota (<i>heritage building conservation</i>) sebagai sumber belajar.</p> <p>d. Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan kota pada masa kolonial merupakan asset yang dapat menjadi sumber-sumber kajian bidang arsitektur dan planologi, sebagai "museum" kota. Pemerintah kota diarahkan untuk memberikan kebijakan pelestarian bangunan melalui perda yang dapat disepakati dan dijalankan oleh semua pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam kerangka membangun sumber-sumber ilmu dari lingkungan (alam maupun buatan).</p> <p>e. Fasilitas penunjang kegiatan pendidikan seperti <i>convention hall</i>, <i>community hall</i> yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan event berskala nasional di bidang ilmiah dan ekspo hasil-hasil penelitian ilmiah dari satuan pendidikan secara berkala. Fasilitas ini juga ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisata pendidikan di kota</p>	<p>Strategi Struktur Ruang</p> <p>a. Strategi Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional; ❖ Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan nasional. <p>b. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala regional; ❖ Mendukung pengembangan transportasi kereta api komuter; ❖ Mengarahkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada skala regional; ❖ Mengarahkan perkembangan perdagangan dan jasa pada jalur regional; ❖ Mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan perdagangan pada kawasan perbatasan kota; ❖ Mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal; ❖ Meningkatkan pengembangan kawasan yang cenderung menjadi <i>aglomerasi</i> fasilitas pelayanan regional. <p>c. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mendorong sektor pendukung pariwisata yang melayani kawasan Malang Raya; ❖ Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan Malang Raya; ❖ Menjalin kerja sama dengan daerah otonom kawasan Malang Raya untuk memantapkan pelayanan dan 	<p>KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan lingkungan kota yang kondusif; - Pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan; - Pelestarian bangunan, tata lansekap, maupun kawasan kota pada masa colonial; <u>dengan</u> Strategi penetapan kawasan <u>strategis</u> <p>KETIDAKSESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana unggul; - Infrastruktur penunjang pendidikan; - Pemanfaatan ICT; - Membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh Lapisan masyarakat; <u>Tidak tertuang dalam RTRW</u>; - Strategi struktur ruang; <u>Strategi pola ruang; Tidak tertuang dalam RPJP</u>;

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>Malang.</p> <p>f. Pemanfaatan ICT dalam pengembangan pendidikan dalam rangka memperluas akses informasi teknologi, melalui pengembangan fasilitas <i>wifi</i> untuk kemudahan akses informasi berbasis internet Jardiknas dan JIS diarahkan untuk menuju "<i>silicon valley</i>" yang berbudaya dengan kearifan lokal.</p> <p>g. Kebijakan pengembangan pendidikan oleh pemerintah dilakukan dengan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).</p>	<p>pengembangan kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor perdagangan dan jasa yang mengarah pada pendukung sektor pariwisata. <p>d. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Menetapkan dan memantapkan kawasan alun-alun sebagai pusat pelayanan kota; ❖ Menetapkan pembagian wilayah Kota Malang menjadi 5 (lima) sub pusat pelayanan kota; ❖ Mengembangkan sub pusat pelayanan Kota secara merata; ❖ Mengembangkan pusat-pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota secara proporsional; ❖ Menghubungkan antar sub pusat kota dan antara masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; ❖ Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang; ❖ Mengarahkan sentra-sentra budidaya yang mendukung pelayanan skala pusat kota dan sub pusat kota; ❖ Mengembangkan jaringan pusat kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan yang berhierarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota menuju pusat kota; 	

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
4.	<p>Pembangunan Wilayah & Infrastruktur</p> <p>a. Mewujudkan Kota Malang hijau lestari, sejuk melalui pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dilakukan dengan mendorong pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota agar mampu mendukung dan memwadhahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan.</p> <p>b. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, maka pemanfaatan ruang kota harus mengakomodir seluas-luasnya kepentingan masyarakat, serta mendukung keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 %, secara proporsional. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro lingkungan kota. Dalam mewujudkan tujuan kota Malang dalam pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan diarahkan untuk dapat tercapainya hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sistem perencanaan pembangunan kota Malang yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas sosialisasi dan informasi substansi perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan; ❖ Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah. Perlu disadari kembali esensi pemanfaatan ruang kota adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat seperti diamanahkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional; ❖ Upaya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dilakukan untuk lebih memeratakan perkembangan dan pertumbuhan fisik kota kearah wilayah dan bagian wilayah kota di 	<p>administrasi masyarakat pada sub wilayah kota secara merata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengembangkan sistem penyediaan air minum kota. ❖ Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah. ❖ Mengembangkan sistem persampahan. ❖ Mengembangkan sistem drainase. ❖ Mengembangkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki. <p>Strategi Pola Ruang</p> <p>a. Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan; ❖ Membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan; ❖ Mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH; ❖ Menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota. ❖ Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; ❖ Memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan; ❖ Mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut; ❖ Mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan; 	<p>KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Kota Malang hijau lestari dengan Strategi sebagai PKN, Strategi sebagai Pusat Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan, Pengembangan Prasarana Wilayah Kota (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Strategi Pola Ruang, Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait kuat karena pembangunan berwawasan lingkungan & berkelanjutan). - Pemanfaatan ruang kota, serta mendukung RTH sebesar 30 % dengan Strategi sebagai Pusat Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan, Pengembangan Prasarana Wilayah Kota (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Strategi Pola Ruang Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung (terkait kuat karena mengandung pengembangan kawasan lindung & RTH); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya , Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena tersirat pembangunan). - Pembangunan infrastruktur dengan Strategi sebagai (PKN), Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional (terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena tersirat pembangunan); Pengembangan Prasarana Wilayah Kota (terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah &

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>segenap pelosok-pelosok kota. Sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan kota yang serasi, seimbang dan terpadu secara keseluruhan;</p> <p>❖ Kebijakan pemanfaatan ruang oleh pemerintah didorong untuk mewujudkan penyediaan ruang terbuka (publik maupun privat) sebesar 30 % secara berkelanjutan. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro lingkungan kota.</p> <p>❖ Partisipasi seluruh <i>stakeholders</i> yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan warga kota Malang pemerintah dan swasta dapat menjamin keberlanjutan pembangunan kota Malang;</p> <p>❖ Sinergi dan kerjasama antar wilayah dan antar daerah. Dalam rangka meningkatkan peran dan hasil upaya pengembangan wilayah dan infrastruktur kota, diperlukan sinergi untuk menghasilkan saling penguatan dan kerjasama antar wilayah sekitar (Pemkot Batu dan Pemkab Malang). Dengan pendekatan perencanaan wilayah secara terpadu Malang Raya, akan mengakomodir berbagai kepentingan wilayah secara menyeluruh dan terpadu satu dengan yang lain;</p> <p>❖ Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang seimbang dengan pengembangan kota Malang, maupun seimbang bagi perkembangan wilayah Malang Raya dan kepentingan wilayah Kabupaten-kabupaten Bagian Selatan Propinsi Jawa Timur;</p> <p>❖ Terciptanya arah pembangunan dan pengembangan kota Malang yang terarah dan jelas.</p>	<p>❖ Meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;</p> <p>❖ Meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai;</p> <p>❖ Mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung;</p> <p>❖ Menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (<i>roof garden</i>) pada bangunan tinggi, dinding hijau (<i>green wall</i>) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.</p> <p>Strategi Pengembangan prasarana wilayah Kota Malang, meliputi :</p> <p>a. Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan raya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat kota, dengan upaya :</p> <p>❖ Mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, berupa pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan;</p> <p>❖ Mengkondisikan kembali fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;</p> <p>❖ Membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan</p>	<p>infrastruktur); Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung (terkait lemah karena terstrat pembangunan); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya (terkait kuat karena mengandung pembangunan wilayah & infrastruktur); Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena terstrat pembangunan).</p> <p>Aspek pembangunan sarana dan prasarana (sama dengan kesesuaian pada pembangunan infrastruktur).</p> <p>KETIDAKSESUAIAN :-</p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Malang;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya sungai, dengan memperhatikan kapasitas dan ketentuan peraturan yang berlaku; ❖ Terbangunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antarmoda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan. ❖ Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha. ❖ Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi. ❖ Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. ❖ Peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. <p>d. Aspek-aspek penting dalam pembangunan sarana dan prasarana, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur kota Malang dikuatkan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu, baik makro maupun mikro; ○ Pengembangan mekanisme baku perencanaan pembangunan infrastruktur secara partisipatif; ○ Pengembangan sistem sosialisasi publik terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang aksesibel; ○ Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pembangunan infrastruktur; ○ Perencanaan yang mengedepankan sisi orientasi dan urgensi kebutuhan. ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih 	<p>upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum; ❖ Mengadakan angkutan umum massal meliputi angkutan umum bus metro, bus kota dan kereta api komuter; ❖ Membangun halte khusus untuk bus metro, bus kota, dan angkutan kota (angkot) sebagai tempat menaik dan menurunkan penumpang dan berfungsi untuk mencegah kemacetan; ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang beroperasinya sarana transportasi. <p>c. Mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal dan sub terminal; ❖ Mengalihfungsikan Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi; ❖ Membangun terminal kargo di sekitar jalan lingkar sebagai terminal angkutan barang; ❖ Membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan bermotor (uji KIR); ❖ Membangun stasiun (<i>shelter</i>) dan halte baru dalam mendukung rencana pengembangan kereta api komuter dan angkutan umum bus kota (<i>Bus Rapid Transit</i>). <p>d. Mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Menambah sarana penunjang jalan; ❖ Meremajakan dan memperbaharui kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik; dan ❖ Mengoptimalisasikan keberadaan sempadan rel kereta api. <p>e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana</p>	

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>dikembangkan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengelolaan sumber daya air yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; ○ Mengembangkan sumber air bersih melalui pengelolaan potensi air sungai secara berkelanjutan; ○ Penurunan tingkat polusi ke dalam sumber-sumber air bersih; ○ Penerapan sistem daur ulang dengan tetap menjaga kualitas dan kehiagenisannya; ○ Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas sebagai air yang memenuhi baku mutu standar air minum secara internasional. <p>❖ Sistem transportasi dikembangkan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kesalingterhubungan antar seluruh wilayah kota Malang yang mendorong pertumbuhan wilayah Malang Raya yang mendorong pertumbuhan wilayah internal dan eksternal yang merata; ○ Pola pergerakan kendaraan yang saat ini "linier concentric" diubah menjadi "radial concentric", artinya pemerintah kota harus segera mengembangkan jalan-jalan inner ringroad dan outer ringroad sebagai pemecah pergerakan sirkulasi kendaraan eksternal dan sirkulasi kendaraan pergerakan lokal. Segera direalisasikan pengembangan jaringan jalan Lingkar Timur dan Lingkar Barat, serta Lingkar Utara; ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas jalur pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor yang aman dan nyaman 	<p>energi/kolistriken, dengan upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku ke seluruh wilayah perkotaan; ❖ Membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga listrik ke sub wilayah Malang Timur dan Malang Tenggara; ❖ Mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan; ❖ Mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh wilayah perkotaan; ❖ Menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya. <p>f. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman; ❖ Menyediakan sarana prasarana telematika dengan mengikuti karakteristik kebutuhan di masing-masing sub wilayah kota dan pembangunannya mengikuti pola pembangunan transportasi baik pada jalan 	

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>Api Commuter (Kepanjen-Malang-Lawang) dan Jalur-jalur Bus Kota merupakan alternatif mengurangi kesemrawutan lalu lintas, serta penghematan penggunaan BBM yang berdampak mengurangi eksploitasi SDA secara berlebihan dan pengendalian polusi moda transportasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Perumahan dan permukiman dikembangkan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas perumahan dan prasarana-sarana permukiman; ○ Pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat kota Malang, dan didukung oleh prasarana sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, mandiri, dan efisien; ○ Ketersediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan ketentuan, dalam rangka mencapai ketentuan ketersediaan 30 % ruang terbuka di wilayah kota Malang secara berkelanjutan; ○ Pengembangan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup; ○ terciptanya perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat; ○ Terealisasinya sarana prasarana permukiman yang berkualitas dan dikelola secara profesional, mandiri dan efisien. ◆ Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kota Malang ditingkatkan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kesadaran dan partisipasi warga kota Malang dalam pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan aturan yang 	<p>pelayanan umum, terminal, dan sekitar permukiman;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Menempatkan <i>hot spot</i> yang diarahkan pada ruang-ruang publik utama di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran; ◆ Menetapkan pemanfaatan tower bersama dalam penyediaan antena telekomunikasi. <p>g. Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Memperbaiki/normalisasi saluran irigasi; ◆ Meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian yang ada di kota; ◆ Memisahkan saluran irigasi dengan saluran drainase kota; ◆ Memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air di wilayah kota; ◆ Mengendalikan daya rusak air; ◆ Mengoptimalkan keberadaan sempadan sungai; ◆ Mengembangkan prasarana konservasi sumber daya air untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan sumber daya air. </p> <p>h. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tidak mengalihfungsikan RTH; ◆ Mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang berbasis pada konservasi air yang berwawasan lingkungan; ◆ Mengembangkan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai; ◆ Mengembangkan perumahan secara vertikal; ◆ Mengembangkan kompleks perkantoran pemerintah maupun swasta secara vertikal; </p>	

NO.	INFUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>berleku dan prinsip keterpaduan;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan manajemen pengawasan dalam rangka mengurangi tingkat penyimpangan dan rencana yang telah ditetapkan; o Prioritas terhadap daerah yang benar-benar membutuhkan; o Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur; o Pengembangan infrastruktur kota Malang disesuaikan dengan fungsi kawasan sebagai salah satu landasan dalam pengoptimalan fungsinya. <p>◆ Fungsi tata ruang wilayah dimanfaatkan secara konsisten sesuai perencanaan sebagai acuan dan arah koordinasi pembangunan. Konsistensi terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang dikendalikan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan pengawasan dan penerapan law enforcement tata ruang yang efektif; o Penyeimbangan rasio lahan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan kota Malang; o Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; o Perwujudan pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan terbuka dan non-lahan terbuka. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir, kelangkaan sumber air bersih, aglomerasi yang tidak terkendali (unmanageable urban agglomerations); o Penerapan sanksi yang jelas terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mengarahkan terbentuknya kawasan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, secara merata pada sub wilayah kota; ◆ Mengarahkan dan menata kawasan bagi kegiatan sektor informal ◆ menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana; <p>i. Mengembangkan fasilitas umum dan sosial, meliputi pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan</p> <p>j. Mendukung pemanfaatan kawasan militer;</p> <p>k. Membatasi pemanfaatan kawasan budidaya yang mengganggu ekosistem yang ada.</p> <p>Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata sesuai skala pelayanan; ◆ Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal yang memperhatikan aspek ekologis; ◆ Mengarahkan kompleks industri dan pergudangan pada perbatasan kota; ◆ Mengendalikan intensitas kegiatan industri dan pergudangan pada sub wilayah kota yang telah ada; ◆ Mengembangkan kompleks industri dan pergudangan yang mempertimbangkan aspek ekologis; <p>Strategi Penetapan Kawasan Strategis</p>	

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>yang memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan penyediaan ruang-ruang publik/terbuka yang berdampak positif bagi lingkungan kota Malang.</p> <p>❖ Pertumbuhan wilayah dan sinergi antar wilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antar wilayah dilekukan untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara daerah sekitarnya dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; ○ Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan sekitar Malang dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antara daerah sekitarnya; 	<p>tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota; d. Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya. e. Mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan; f. Mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya; g. Membangun prasarana pariwisata. 	

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>5. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>a. Mewujudkan visi kota Malang sebagai kota pendidikan yang didorong oleh keberhasilan kegiatan perdagangan dan jasa yang unggul dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan dengan upaya memberdayakan masyarakat kelompok ekonomi lemah dan mendorong kelompok ekonomi menengah dan besar sebagai kesatuan aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung.</p> <p>b. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tata kelola ekonomi yang terpadu, aksesibel, dan berkelanjutan; ◆ Diperlukan perubahan dalam kebijakan-kebijakan fiskal, yang mampu mendorong masuknya investor, pemanfaatan dana-dana yang tersedia seperti SCR, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih baik; ◆ Kapasitas pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif, Kinerja sektor jasa keuangan yang profesional; ◆ Tata kelola industri kecil dan menengah yang unggul. <p>c. Arah pembangunan ekonomi kota Malang diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya di kota Malang, pengembangan kekuatan ekonomi lokal;</p>	<p>STRATEGI : <u>Muatan seperti tertera di atas</u></p>	<p>KESESUAIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi Kota pendidikan didukung Perdagangan Jasa yang unggul dengan Strategi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena tersirat perdagangan & jasa). - Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan Strategi sebagai PKN, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya (terkait kuat karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi); Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait lemah karena sebagian kecil membahas pertumbuhan ekonomi); Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya (terkait lemah karena sebagian kecil membahas pertumbuhan ekonomi); Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait kuat karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi). - Arah pembangunan ekonomi dengan Strategi sebagai PKN, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional (terkait lemah karena tersirat pembangunan ekonomi); Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya (terkait kuat karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi); Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator ditujukan guna menjaga keberlanjutan perekonomian kota Malang. Peningkatan terhadap peranan pemerintah dilakukan dengan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan kerangka regulasi <i>non</i> diskriminatif tata perekonomian Kota Malang, penyiapan menuju pasar bebas; ○ Peningkatan iklim usaha, dan investasi yang menjamin keberlanjutan perekonomian kota; ○ Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah penyangga, regional, nasional dan global; ○ Penataan sektor formal dan informal yang memperhatikan harmonisasi <i>setting</i> sosial, kultural, estetika, dan lingkungan di kota Malang; ○ Fasilitasi terciptanya lapangan kerja formal dan informal; ○ Peningkatan aktifitas pemasaran produk yang dihasilkan dan kota Malang. ❖ Kemitraan dalam pengelolaan sumber daya di kota Malang ditingkatkan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan sektor formal dan informal kota Malang yang memperhatikan harmonisasi <i>setting</i> sosial, kultural, estetika, dan lingkungan; ○ Peningkatan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya produktif; ○ Peningkatan intensifikasi jaringan usaha lintas pelaku; ○ Penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan; ○ Memumbuhkembangkan sektor informal yang mengerucut pada sosial kemasyarakatan. ❖ Kekuatan ekonomi kota Malang dikembangkan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan dan memantapkan kapasitas 		<p>Penetapan Kawasan Strategis (terkait kuat karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi).</p> <p>KETIDAKSESUAIAN : -</p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>kewirausahaan masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengembangan sarana dan prasarana public yang berbasis keberlanjutan lingkungan; o Pengembangan etos pelayanan di bidang jasa; o Memperkuat jaringan dan pangsa pasar produk-produk lokal hingga ke luar daerah, bahkan ke luar negeri (pasar bebas); o Mendukung penuh usaha-usaha menengah kebawah sebagai akar perekonomian lokal kota Malang. <p>❖ Produktivitas dan inovasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan kapasitas warga kota Malang dalam pengelolaan sumber daya produktif, dan penguasaan teknologi; o Pengembangan diversifikasi produk layanan jasa; o Penciptaan dan pengembangan pusat pendidikan yang berbasis kompetensi sektor jasa; o Peningkatan mutu keserasian sumber daya produktif yang ramah lingkungan; o Terciptanya lembaga yang menaungi inovasi masyarakat diberbagai bidang. <p>❖ Keuangan daerah dikembangkan melalui cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengembangan manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif; o Revitalisasi sektor jasa keuangan; o Peningkatan kemampuan fiskal daerah yang adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat; o Peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih dan pembayar pajak; o Transparansi terhadap pendapatan dan 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>6. Mewujudkan Kota Malang Yang Demokratis Berlandaskan Atas Hukum</p> <p>a. Mewujudkan visi kota Malang dengan menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>good and clean governance</i>) dengan upaya pengembangan budaya tertib hukum disemua lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan kota Malang yang demokratis berlandaskan atas hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila. Prasyarat utama dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan bidang politik kota Malang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Partisipasi politik warga kota yang tinggi; ❖ Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik; ❖ Lembaga-lembaga publik yang efektif; ❖ Budaya politik yang sehat; ❖ Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses. <p>b. Enam aspek yang penting dalam Politik untuk konsep perencanaan pembangunan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Arah pembangunan politik Indonesia khususnya kota Malang diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan <i>citizenship</i> (hak, kewajiban, dan etika politik warga kota) dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam berpolitik; ○ Peningkatan efektivitas lembaga dan partai politik; ○ Pengembangan budaya politik yang sehat; ○ Penyediaan media komunikasi politik; ○ Peningkatan hubungan antar daerah dan atau luar negeri. ❖ Pelaksanaan kebijakan publik diwujudkan melalui penyelenggaraan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelenggaraan dan penyediaan instrumentasi dan media pembelajaran hak 	<p>STRATEGI</p> <p><u>Tidak terdapat muatan SDM dalam strategi Rencana Tata Ruang Kota Malang.</u></p>	<p>KESESUAIAN : -</p> <p>KETIDAKSESUAIAN <u>Semua program RPJP tidak tertuang dalam RTRW.</u></p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>dan kewajiban berpolitik;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pelembagaan sistem pembelajaran kepedulian terhadap kota secara berkelanjutan; o Terselenggaranya panitia penyusunan program pembelajaran tentang kebijakan publik tentang tata cara berpolitik; o Realisasi program-program yang telah disusun dan disepakati bersama; o Penghayatan dan pelaksanaan berpolitik. <p>❖ Kualitas tatalaksana pengawasan kinerja badan-badan publik ditingkatkan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan mekanisme dan media pengawasan kinerja badan-badan publik; o Peningkatan pemahaman publik tentang program anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (anti-KKN); o Penyediaan wadah aspirasi dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan publik; o Penetapan reward dan punishment yang jelas terhadap kualitas pelayanan badan-badan publik; o Transparansi dan mekanisme penanganan terhadap segala kasus yang berkenaan dengan kebijakan publik. <p>❖ Keefektifitasan lembaga pemerintahan kota, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan ditingkatkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengayaan alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasi aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat; 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>disusun dan disepakati bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan program kebijakan publik. <p>❖ Pengembangan budaya politik yang sehat dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (egalitarianism), anti kekerasan, toleransi politik, keadilan dan orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media; o Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pengenalan dan pengamalan cara berpolitik yang sehat dalam segala bentuknya; o Peningkatan kualitas dan jumlah partisipasi stakeholders kota dalam penetapan kebijakan publik. <p>❖ Media komunikasi politik disediakan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlindungi serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; o Perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media massa yang independent; o Penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat; o Kemudahan akses alur informasi; o Perwujudan media sebagai sarana penyampaian informasi dan berita terbaru. 		

NO.	INPOT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>7. Mewujudkan Tata Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional</p> <p>a. Mewujudkan visi kota Malang dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.</p> <p>b. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah <i>Good Governance</i>. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip—prinsip supremasi hukum, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas didukung dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip "<i>Good Governance and Clean Government</i>".</p> <p>c. Lima aspek penting dalam politik untuk konsep perencanaan pembangunan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten serta mencerminkan ketertiban dan keadilan. Dapat tercapai apabila: <ul style="list-style-type: none"> ○ Produk hukum yang berkeadilan; ○ Penegakan hukum yang konsisten dan efektif; ○ Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan; ○ Partisipasi dan tanggungjawab warga kota yang tinggi; ○ Tingginya kesadaran masyarakat akan hukum dan ketertiban kota. ❖ Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah yang 	<p>STRATEGI</p> <p><u>Tidak terdapat muatan SDM dalam strategi Rencana Tata Ruang Kota Malang.</u></p>	<p>KESESUAIAN :-</p> <p>KETIDAKSESUAIAN <u>Semua program RPJP tidak tertuang dalam RTRW.</u></p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>profesional;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan anti KKN. <p>❖ Terwujudnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan penyelenggaraan pemerintah kota Malang;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Meningkatnya efisiensi fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan; o Meningkatnya efektifitas fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan; o Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pemerintahan; o Meningkatnya pengawasan kinerja kelembagaan pemerintahan. <p>❖ Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Government</i> pemerintah kota Malang :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan; o Meningkatnya transparansi pemerintahan; o Meningkatnya tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintahan; o Meningkatkan kewajaran pemerintahan. <p>❖ Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum ditujukan untuk peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; o Peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan perubahan sistem politik yang mendukung penegakan hukum; o Penegakan peraturan daerah secara konsisten; o Penegakan hukum tanpa memandang kepentingan pribadi ataupun golongan; o Peningkatan kinerja penegak hukum secara profesional. 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>8. Mewujudkan Kota Malang yang Agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>a. Masyarakat Malang yang agamis adalah wujud masyarakat Malang di masa 20 tahun mendatang yang mencirikan karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta berkehidupan harmonis, didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.</p> <p>b. Arah pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia menuju kehidupan masyarakat yang harmonis, dicapai melalui: Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Peningkatan - kualitas kehidupan beragama, diarahkan dengan; <ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas kemudahan umat dalam menjalankan ibadahnya; ○ Mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di dalam keluarga dan sekolah-sekolah menuju terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia; ○ Membangun fasilitas peribadatan sesuai dengan tingkatan kebutuhannya. ◆ Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, diarahkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mendorong upaya peningkatan kualitas kerukunan hidup antar umat beragama; ○ Mendorong upaya peningkatan rasa saling 	<p>STRATEGI</p> <p><u>Tidak terdapat muatan SDM dalam strategi Rencana Tata Ruang Kota Malang.</u></p>	<p>KESESUAIAN : -</p> <p>KETIDAKSESUAIAN <u>Semua program RPJP tidak tertuang dalam RTRW.</u></p>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>kemajemukan sosial;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mendorong upaya penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Arah pembangunan untuk meningkatkan kualitas moral aparatur daerah menuju tata pemerintahan yang amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah, dicapai melalui: Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah; Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah; dan Pengembangan kapasitas pemerintah daerah. 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
9.	<p>Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan</p> <p>a. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah; ❖ Mewujudkan penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; ❖ Mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial. <p>b. Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang daerah diarahkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Menekankan fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan daerah; ❖ Mengembangkan Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara sistematis komprehensif untuk mengurangi konflik kepentingan-baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok. <p>c. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan diarahkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Merencanakan seluruh fungsi dan manfaat SDA secara seimbang dan memperhatikan daya dukung serta kemampuan pulih alaminya; ❖ Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam yang telah berada dalam kondisi kritis hingga pulih daya dukungnya; ❖ Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam rangka menuju realisasi ketersediaan ruang terbuka (publik dan privat) 	<p>STRATEGI : <u>Muatan seperti tertera di atas</u></p>	<p>KESESUAIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan persebaran dan mobilitas penduduk <u>dengan</u> Strategi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan, Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena tersirat pembangunan ekonomi). - Keserasian pemanfaatan ruang <u>dengan</u> Strategi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Strategi sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, Strategi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena tersirat pemanfaatan ruang); Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan (terkait kuat karena berorientasi pada keserasian pemanfaatan ruang). - Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan <u>dengan</u> Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan, Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, Strategi Penetapan Kawasan Strategis (terkait lemah karena tersirat pengembangan SDA); Strategi Penetapan dan pengembangan

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>yang berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan upaya-upaya untuk melestarikan aset lingkungan buatan dalam bentuk bangunan-bangunan dan lingkungan yang memiliki nilai historis dan nilai keilmuan seperti diamankan dalam UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. <p>d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui pendidikan dan kampanye penyadaran fungsi lingkungan diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan intensitas penanaman kecintaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup, dan lingkungan buatan yang bernilai historis terutama bagi generasi muda; ❖ Meningkatkan jumlah generasi muda penggerak dan peduli terhadap isu sumber daya alam, lingkungan hidup; ❖ Meningkatkan sosialisasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam peri kehidupan sehari-hari. <p>e. Pengenalan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang rehabilitasi kerusakan lingkungan; ❖ Mensosialisasikan strategi dan teknik pengendalian pencemaran lingkungan hidup; ❖ Mensosialisasikan strategi dan teknik pengendalian pelestarian bangunan dan/atau lingkungan yang memiliki nilai historis dan nilai keilmuan; ❖ Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi kualitas lingkungan. <p>f. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 		<p>KETIDAKSESUAIAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesadaran masyarakat - Pengenalan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam - Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup <u>tidak tertuang dalam RTRW.</u>

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; ❖ Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya dalam pelestarian lingkungan alam maupun buatan yang mendudukkannya sebagai aset kota; ❖ Menekankan bahwa pola hidup sehat dan seimbang memberikan manfaat yang besar bagi ke lingkungan hidup. 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
10.	<p>Mewujudkan Masyarakat Kota Malang Yang Sejahtera</p> <p>a. Pembangunan di bidang kesehatan masyarakat dalam 20 tahun kedepan secara umum diarahkan untuk terwujudnya kota Malang sebagai kota sehat dalam arti yang luas, yang ditandai oleh kondisi masyarakat yang (1) hidup dilingkungan yang sehat, (2) mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, (3) mampu menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga (4) memiliki derajat kesehatan yang tinggi.</p> <p>b. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat maka strategi yang dijalankan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat, ❖ Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan; ❖ Meningkatkan upaya kesehatan yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan balita, anak usia sekolah dan lansia serta upata pencegahan dan pemberantasan penyakit; ❖ Meningkatkan penyehatan lingkungan. <p>c. Peningkatan layanan kesehatan dalam rangka pengendalian terhadap Jumlah dan leju pertumbuhan penduduk diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan pedlayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; ❖ Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; ❖ Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; ❖ Peningkatan peran pemerintah Indonesia dalam mendorong terakomodasinya hak-hak 	<p><u>Tidak terdapat muatan Strategi masyarakat sejahtera di dalam RTRW</u></p>	<p>KESESUAIAN : - KETIDAKSESUAIAN : Semua program tidak tertuang di dalam RTRW</p>

NO.	INFUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>penduduk dan perlindungan sosial;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengenalan pendidikan seks dan reproduksi sejak dini serta gambaran keluarga ideal. <p>d. Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial dasar ditingkatkan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (sustainable) dan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan; ❖ Perbaikan perilaku hidup sehat masyarakat; ❖ Peningkatan kualitas gizi masyarakat; ❖ Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat rentan; ❖ Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. <p>e. Kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dilakukan dengan memfasilitasi, mendorong melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan upaya penciptaan sebanyak mungkin peluang dan lapangan kerja formal maupun informal; ❖ Mendorong upaya peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula; ❖ Meningkatkan dukungan program-program pelatihan strategis dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>keselamatan kerja yang memadai, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antar semua pihak yang berkepentingan.</p> <p>f. Meningkatkan pendapatan masyarakat diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan upaya penciptaan sebanyak mungkin peluang dan lapangan kerja formal maupun informal; ❖ Mendorong upaya peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula; ❖ Meningkatkan dukungan program-program pelatihan strategis dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi sumber daya manusia; ❖ Mengembangkan sistem pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global; ❖ Mengembangkan pasar kerja yang fleksibel, keselamatan kerja yang memadai, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antar semua pihak yang berkepentingan. <p>g. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); ❖ Memantapkan dukungan sistem hukum dan perlindungan sosial; ❖ Menyediakan sarana pelayanan sosial yang memadai; ❖ Meningkatkan derajat melalui pembentukan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat; ❖ Memantapkan mekanisme penanganan masalah 		

NO.	INPUT		PEMBAHASAN
	RPJP	RTRW	
	<p>sosial yang mantap;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Membina kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial. <p>h. Pengembangan sistem jaminan sosial diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ❖ Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi lemah (tidak mampu) hingga sesuai dengan martabat kemanusiaan; ❖ Mengembangkan budaya tolong menolong sebagai tradisi yang telah berakar di masyarakat. <p>i. Pemberdayaan peran Perempuan diarahkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan perempuan di berbagai bidang pembangunan; ❖ Menurunkan intensitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; ❖ Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di daerah; ❖ Mendorong terbentuknya Keluarga yang ideal melalui Keluarga Berencana. 		

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE KEMENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1					2	3	4
00	00	4			PENDAPATAN DAERAH		
00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	8.600.000,00	
00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	8.600.000,00	
00	00	4	2		Dana Perimbangan	0,00	
00	00	4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	
					PENDAPATAN DAERAH	8.600.000,00	
00	00	5			BELANJA DAERAH		
00	00	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	355.227.770.852,56	
00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	355.227.770.852,56	
						147.603.649.339,45	
					Belanja Langsung	147.603.649.339,45	
					Pendidikan	1.783.658.654,00	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	702.819.750,00	
01	01				Penyediaan jasa surat menyurat	702.819.750,00	
01	01	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	430.400.000,00	
01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	430.400.000,00	
01	01	02	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.136.500,00	
01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	170.136.500,00	
01	01	08	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.980.000,00	
01	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	145.950.000,00	
01	01	11	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.898.750,00	
01	01	17			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	114.898.750,00	
01	01	17	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
01	01	18			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	
01	01	18	5	2	BELANJA BARANG DAN JASA		

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2011

PEMERINTAH KOTA MALANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung		Jenis Belanja			Jumlah 8=3+4+5+6+7
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	
	Pelayanan Umum	104.164.973.701,62	25.666.963.319,83	25.858.027.850,00	91.749.532.300,00	29.985.551.900,00	277.425.049.071,45
1 06	Perencanaan Pembangunan	1.796.874.179,21	0,00	2.643.997.000,00	4.210.284.100,00	2.127.450.000,00	10.778.605.279,21
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	98.900.072.340,53	25.666.963.319,83	22.011.584.800,00	82.309.924.350,00	27.012.968.600,00	255.501.513.410,36
1 21	Ketuhanan Pangan	0,00	0,00	82.700.000,00	167.300.000,00	0,00	250.000.000,00
1 23	Statistik	0,00	0,00	90.708.050,00	192.908.450,00	0,00	283.616.500,00
1 24	Keepsipan	1.579.982.563,46	0,00	281.550.000,00	842.137.400,00	378.904.300,00	3.082.574.263,46
1 25	Komunikasi dan Informatika	1.888.044.618,42	0,00	747.488.000,00	4.026.978.000,00	466.229.000,00	7.128.739.618,42
	Keterlibatan dan ketentraman	7.650.819.879,93	0,00	3.296.153.000,00	3.399.297.000,00	159.350.000,00	14.505.619.879,93
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.650.819.879,93	0,00	3.296.153.000,00	3.399.297.000,00	159.350.000,00	14.505.619.879,93
	Ekonomi	34.627.952.146,15	0,00	6.633.197.500,00	36.575.249.050,00	16.704.805.300,00	94.541.203.996,15
1 07	Perhubungan	13.550.421.443,82	0,00	988.073.800,00	1.710.163.200,00	16.195.605.000,00	32.424.254.443,82
1 14	Ketenagakerjaan	2.720.859.388,79	0,00	312.065.000,00	872.005.000,00	0,00	3.904.929.388,79
1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.618.784.636,26	0,00	1.021.184.000,00	1.504.213.700,00	33.354.800,00	4.177.537.136,26
1 16	Penanaman Modal	0,00	0,00	169.380.000,00	150.620.000,00	0,00	320.000.000,00
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	2.521.200.000,00	27.630.395.500,00	86.242.500,00	30.237.838.000,00
1 26	Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01	Pertanian	4.124.501.901,86	0,00	285.200.000,00	797.232.000,00	37.975.000,00	5.224.908.901,86
2 02	Kehutanan	0,00	0,00	1.600.000,00	37.650.000,00	0,00	39.250.000,00
2 03	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	164.201.000,00	315.389.000,00	500.000,00	480.100.000,00
2 06	Perdagangan	12.613.384.775,42	0,00	1.141.693.700,00	3.373.170.650,00	319.127.000,00	17.447.376.125,42
2 07	Industri	0,00	0,00	66.600.000,00	184.400.000,00	32.000.000,00	285.000.000,00
2 08	Ketransmigrasian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lingkungan hidup	39.764.720.349,73	0,00	6.628.757.000,00	11.732.674.100,00	6.568.802.050,00	64.600.953.499,73
1 05	Penataan Ruang	0,00	0,00	19.875.000,00	719.130.000,00	0,00	739.005.000,00
1 08	Lingkungan Hidup	39.764.720.349,73	0,00	6.407.350.000,00	10.640.101.100,00	6.568.802.050,00	63.378.973.499,73
1 09	Pertanahan	0,00	0,00	199.532.000,00	373.443.000,00	0,00	572.975.000,00
	Perumahan dan fasilitas umum	9.079.042.388,09	0,00	971.942.500,00	17.507.462.800,00	159.830.066.400,00	187.388.514.088,09

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung		Jenis Belanja			Jumlah
	Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
Perumahan dan fasilitas umum	7.188.783.510,89	0,00	2.470.683.100,00	10.712.954.602,56	210.106.103.437,00	230.474.424.550,14
Pekerjaan Umum	7.188.783.510,89	0,00	1.362.111.100,00	5.325.307.252,55	156.608.391.041,00	170.481.592.904,14
Perumahan	0,00	0,00	1.108.472.000,00	5.387.647.250,00	53.486.712.396,00	59.992.831.646,00
Kesehatan	32.274.867.858,73	0,00	4.955.688.760,00	41.702.637.494,00	46.647.473.746,00	125.580.857.858,73
Kesehatan	32.274.857.858,73	0,00	4.955.688.700,00	41.702.637.494,00	46.647.473.746,00	125.580.857.858,73
Parwisata dan budaya	2.964.140.143,06	0,00	1.044.259.000,00	4.240.318.000,00	118.540.000,00	8.367.357.143,06
Rekreasi dan kebudayaan	2.964.140.143,06	0,00	730.853.000,00	2.674.032.000,00	98.640.000,00	6.467.505.143,06
Parwisata	0,00	0,00	313.596.000,00	1.566.298.000,00	20.000.000,00	1.899.894.000,00
Pendidikan	415.495.568.690,97	0,00	20.119.668.000,00	89.112.043.851,00	74.933.402.249,00	599.660.582.590,97
Pendidikan	410.852.240.086,03	0,00	19.350.245.000,00	85.970.152.851,00	69.940.592.448,00	583.113.230.386,03
Rekreasi dan olahraga	4.643.328.604,94	0,00	769.423.000,00	3.141.890.800,00	7.992.809.800,00	16.547.452.204,94
Pendidikan dan kebudayaan	10.249.078.873,11	0,00	9.772.579.000,00	6.700.645.000,00	2.150.516.000,00	31.872.818.873,11
Pendidikan dan Catatan Sipil	3.329.410.725,66	0,00	484.243.000,00	972.741.000,00	1.872.618.500,00	6.659.013.225,66
Pendidikan dan Perlindungan Anak	5.781.068.147,45	0,00	932.666.000,00	2.452.734.000,00	40.997.500,00	9.207.465.647,45
Perencanaan dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	494.290.000,00	2.432.310.000,00	3.000.000,00	2.929.600.000,00
Modal	1.138.600.000,00	0,00	7.861.380.000,00	3.842.860.000,00	233.900.000,00	13.076.740.000,00
JUMLAH	66.064.852.353,62	73.985.450.587,41	85.551.644.760,00	297.502.103.931,55	420.983.186.884,50	1.543.987.138.516,98

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Dr. PENI SUPARTO, M.AP

Balasan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

PEMERINTAH KOTA MALANG
 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2013

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung		Jenis Belanja			Jumlah
	Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa		
				Modal		
2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
Pelayanan Umum	103.196.434.282,74	73.885.450.587,41	29.071.430.250,00	96.388.063.293,79	27.769.811.710,00	336.300.190.123,85
Perencanaan Pembangunan	1.807.692.193,09	0,00	2.573.918.250,00	3.200.725.750,00	85.000.000,00	7.667.338.193,09
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	102.295.983.363,51	73.885.450.587,41	24.724.812.000,00	85.962.251.843,70	25.679.270.960,00	312.547.768.754,62
Katahanan Pangan	1.079.200.000,00	0,00	195.425.000,00	474.575.000,00	0,00	1.749.200.000,00
Statistik	0,00	0,00	206.425.000,00	291.651.600,00	0,00	523.576.600,00
Kearsipan	1.825.467.961,57	0,00	287.500.000,00	805.980.100,00	25.500.000,00	3.634.102.831,57
Komunikasi dan Informatika	2.188.090.744,57	0,00	1.083.350.000,00	5.652.879.000,00	1.253.886.000,00	10.178.205.744,57
Keterlibatan dan ketentraman	9.215.687.091,46	0,00	4.236.394.000,00	9.713.186.000,00	816.650.000,00	23.981.917.091,46
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.215.687.091,46	0,00	4.236.394.000,00	9.713.186.000,00	816.650.000,00	23.981.917.091,46
Ekonomi	38.142.719.359,08	0,00	6.788.744.500,00	18.320.932.854,00	47.440.270.292,50	110.680.667.005,58
Perhubungan	14.549.019.020,53	0,00	1.898.654.000,00	4.225.909.054,00	18.621.279.946,00	39.294.882.020,53
Ketenagakerjaan	1.996.298.248,89	0,00	612.870.000,00	1.416.568.500,00	27.227.029.348,50	31.252.862.095,39
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.143.715.391,95	0,00	1.031.206.000,00	1.968.145.500,00	34.401.000,00	5.177.467.891,95
Penanaman Modal	0,00	0,00	304.892.000,00	375.108.000,00	0,00	680.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	994.840.000,00	4.444.702.950,00	14.900.000,00	5.424.442.950,00
Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perikanan	4.416.775.437,77	0,00	285.096.500,00	1.031.810.500,00	1.033.530.000,00	6.767.182.437,77
Pohutan	0,00	0,00	5.100.000,00	34.150.000,00	0,00	39.250.000,00
Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	138.930.000,00	391.170.000,00	0,00	530.100.000,00
Perdagangan	15.036.913.259,94	0,00	1.328.056.000,00	3.722.500.350,00	461.130.000,00	20.549.499.609,94
Industri	0,00	0,00	206.780.000,00	695.220.000,00	48.000.000,00	950.000.000,00
Keransmigrasian	0,00	0,00	9.450.000,00	15.550.000,00	0,00	25.000.000,00
Lingkungan hidup	41.340.582.543,79	0,00	7.094.198.160,00	17.611.123.136,30	11.012.319.450,00	77.058.223.280,09
Penataan Ruang	0,00	0,00	602.925.000,00	2.649.475.000,00	0,00	3.252.400.000,00
Lingkungan Hidup	41.340.582.543,79	0,00	6.245.383.150,00	14.498.285.650,00	11.012.319.450,00	73.096.570.793,79
Perumahan	0,00	0,00	245.890.000,00	463.362.486,30	0,00	709.252.486,30

PEMERINTAH KOTA MALANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah 6=3+4+5
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
	2		3	4	5	
	URUSAN WAJIB		83.263.696.260,00	290.045.417.081,55	419.420.526.884,50	792.729.640.226,05
	Pendidikan		19.350.245.000,00	85.970.152.851,00	66.940.592.449,00	172.260.990.300,00
	Dinas Pendidikan		18.578.245.000,00	83.758.978.951,00	66.237.776.049,00	168.575.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.250.000,00	1.882.914.350,00	17.592.960,00	1.908.757.310,00
01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	D A U	0,00	734.103.055,00	17.592.960,00	751.696.015,00
01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	D A U	0,00	460.527.600,00	0,00	460.527.600,00
01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	D A U	0,00	182.045.560,00	0,00	182.045.560,00
01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	D A U	0,00	156.166.500,00	0,00	156.166.500,00
01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	D A U	0,00	122.941.485,00	0,00	122.941.485,00
01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	D A U	0,00	32.100.000,00	0,00	32.100.000,00
01	17 Penyediaan makanan dan minuman	D A U	0,00	95.524.250,00	0,00	95.524.250,00
01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	D A U	0,00	66.340.000,00	0,00	66.340.000,00
01	20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	D A U	8.250.000,00	33.165.900,00	0,00	41.415.900,00
00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0,00	50.475.000,00	2.667.806.792,00	2.718.281.792,00
02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	D A U	0,00	50.475.000,00	41.400.000,00	91.875.000,00
02	33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor	D A U	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
02	48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang	D A U	0,00	0,00	2.076.406.792,00	2.076.406.792,00
02	63 Rehabilitasi Gedung UPTD Pada Dinas Pendidikan Kota Malang	D A U	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
18	Program Pendidikan Anak Usia Dini		124.650.000,00	3.680.077.250,00	6.837.750,00	3.811.565.000,00
18	69 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD	D A U	0,00	3.267.850.000,00	0,00	3.267.850.000,00
18	70 Peningkatan Prestasi Siswa PAUD	D A U	72.800.000,00	114.077.250,00	6.837.750,00	193.715.000,00
18	72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal	D A U	11.350.000,00	188.650.000,00	0,00	200.000.000,00

Kode	Urutan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung		Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1.03	Pekerjaan Umum	6.844.994.810,16	0,00	341.663.000,00	14.966.371.300,00	102.748.531.700,00	124.903.560.810,16
1.04	Pertahanan	2.234.047.577,93	0,00	630.279.500,00	2.539.091.500,00	57.081.534.700,00	62.484.953.277,93
	Reseptan	29.049.946.946,97	0,00	4.182.945.000,00	19.841.363.627,00	23.816.120.229,28	76.890.375.803,25
	Reseptan	29.049.946.946,97	0,00	4.182.945.000,00	19.841.363.627,00	23.816.120.229,28	76.890.375.803,25
	Perwakilan dan budaya	2.504.201.048,35	0,00	737.240.000,00	3.041.380.000,00	184.870.000,00	6.467.691.048,35
1.17	Kebudayaan	2.504.201.048,35	0,00	412.350.000,00	1.573.470.000,00	42.570.000,00	4.532.591.048,35
1.04	Permisasi	0,00	0,00	324.890.000,00	1.467.910.000,00	142.300.000,00	1.935.100.000,00
	Pendidikan	359.448.543.287,64	0,00	31.495.979.500,00	50.829.475.654,00	71.038.051.135,45	512.812.049.677,09
1.01	Pendidikan	355.227.779.852,56	0,00	31.009.934.800,00	49.657.682.204,00	68.878.285.985,45	504.773.662.642,01
1.18	Kepemudaan dan Olahraga	4.220.763.435,08	0,00	486.045.000,00	1.171.813.450,00	2.159.765.150,00	8.038.387.035,08
	Perlindungan Sosial	8.409.125.830,44	0,00	10.016.990.000,00	6.501.708.000,00	1.422.062.500,00	26.349.886.330,44
1.10	Keperawatan dan Catatan Sipil	2.992.995.502,41	0,00	1.192.308.000,00	1.934.144.500,00	37.500.000,00	6.156.948.002,41
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.416.130.328,03	0,00	805.565.000,00	879.147.000,00	16.800.000,00	7.119.642.328,03
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	446.255.000,00	1.959.766.000,00	1.087.964.500,00	3.493.985.500,00
1.13	Sosial	0,00	0,00	7.572.862.000,00	1.728.650.500,00	277.798.000,00	9.579.310.500,00
	JUMLAH	594.699.325.578,92	25.666.963.319,83	89.819.232.450,00	241.178.142.531,00	309.707.679.514,73	1.261.071.343.394,48

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pengadaan Sarana Prasarana Rusunawa	D A U	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2.500.000,00	48.300.500,00	229.199.500,00	280.000.000,00
Penyusunan Database Sertifikasi dan Gaji	D A U	2.500.000,00	48.300.500,00	229.199.500,00	280.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini		5.500.000,00	584.500.000,00	225.000.000,00	815.000.000,00
Rehabilitasi Gedung TK	D A U	0,00	150.000.000,00	225.000.000,00	375.000.000,00
Gebyar Siswa PAUD	D A U	5.500.000,00	174.500.000,00	0,00	180.000.000,00
Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD	D A U	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal	LAIN-LAIN	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		101.800.000,00	84.825.107.680,00	28.588.574.320,00	113.215.482.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	D A U	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD (seragam)	D A U	0,00	138.060.000,00	0,00	138.060.000,00
Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK)	D A U	0,00	1.206.040.000,00	0,00	1.206.040.000,00
Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis	D A U	69.600.000,00	617.340.000,00	3.060.000,00	690.000.000,00
Rehab Sedang/Berat Gedung SD	Sumber Dana Lain	0,00	0,00	7.816.087.000,00	7.816.087.000,00
Olimpiade MIPA SD/MI	D A U	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
Penyediaan PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah)	D A U	0,00	157.280.000,00	0,00	157.280.000,00
Minat Bakat dan Kreativitas SD/MI	D A U	0,00	601.140.000,00	0,00	601.140.000,00
Minat Bakat dan Kreativitas PK	D A U	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Pendampingan Pendidikan Inklusif	D A U	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Lomba Manajemen Klub Olah Raga SD	D A U	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD	D A K	0,00	7.358.150.000,00	3.225.829.000,00	10.583.979.000,00
Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi Tingkat Nasional (Akademis)	D A U	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Lomba Dai Cilik dan Asmaul Husna	D A U	0,00	193.000.000,00	0,00	193.000.000,00
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD	D A U	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

PEMERINTAH KOTA MALANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
2		3	4	5	6=3+4+5
URUSAN WAJIB		79.610.985.450,00	337.819.071.440,00	424.196.589.050,00	841.626.645.940,00
Pendidikan		10.752.460.000,00	112.102.116.680,00	33.150.590.420,00	156.005.167.100,00
Dinas Pendidikan		9.989.690.000,00	111.928.883.980,00	32.745.993.820,00	154.664.567.800,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		121.600.000,00	2.263.229.000,00	27.510.000,00	2.412.339.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat	DAU	0,00	914.974.000,00	0,00	914.974.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PAD	0,00	459.365.000,00	0,00	459.365.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	DAU	114.600.000,00	57.890.000,00	27.510.000,00	200.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	DAU	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PAD	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DAU	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman	DAU	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DAU	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	DAU	7.000.000,00	43.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0,00	80.000.000,00	650.000.000,00	730.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana Kantor	DAU	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Pemeliharaan Sarana Kantor	DAU	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.582.084.675.797,09
1.1	Pendapatan Asli Daerah	336.245.803.914,39
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	250.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	39.980.209.448,90
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.513.172.612,82
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.752.421.852,67
1.2	Dana Perimbangan	940.797.590.170,51
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	101.045.705.170,51
1.2.2	Dana Alokasi Umum	808.447.825.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	31.304.060.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	305.041.281.712,20
1.3.1	Pendapatan Hibah	29.600.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	113.524.879.712,20
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157.101.257.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	4.815.145.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.582.084.675.797,09
2	BELANJA DAERAH	1.683.670.042.842,82
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	825.928.369.502,82
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	775.722.474.602,82

2.1.2	BELANJA BUNGA	0,00
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4	BELANJA HIBAH	39.390.432.200,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.010.695.000,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	663.728.700,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.041.039.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	857.741.673.340,00
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	81.871.421.950,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.090.570.240,00
2.2.3	BELANJA MODAL	425.779.681.150,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.683.670.042.842,82
Surplus / (Defisit)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	133.685.367.045,73
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		133.685.367.045,73

**DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI
UJIAN SKRIPSI / SIDANG KOMPREHENSIF
JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK**



Nama Mahasiswa : ADI FITRA FIRMANSYAH
NIM : 06-24-046

NO.	NAMA MAHASISWA & NIM	JUDUL SKRIPSI	TTD PENGUJIAN
1.	Burhanuddin (06-24-042)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di obyek Wisata Pantai Papa	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>
2.	Ridwan Parindungan (06-24-045)	Mengukur kepariwisataan Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan Tipologinya	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>
3.	Maria Antonius D. 06-24-23	Studi Tam Letak Dan Perancangan Halte di kota Malang	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>
4.	Azwarro (03-24-019)	Arahan Pola Ruang Bagian utara Pulau ternate berbasis mitigasi pada kawasan Rawan bencana letusan gunung Gamalama	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>
5.	Martina Tri Wahyuni 02-24-105	Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Penggunaan Lahan di sekitar lokasi Industri Kel-Bandilan kec. Sekur Kota MALANG	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>

Mengetahui
Sekretaris Jurusan

Arief Setiyawan, ST, MTP



Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jl. Bendungan Sigura – gura No. 02 Kota Malang

BERITA ACARA
SEMINAR HASIL

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Februari 2015
Nama : Adi Fitra Firmansyah
NIM : 06.24.046
Judul : Studi Kesesuaian RPJP-RTRW dan Implementasi Program
Pembangunan Kota Malang

No.	Dosen Pembimbing	Pertanyaan / Masukan	Paraf
1.	Endratno Budi Santosa, ST. MT	<ul style="list-style-type: none">- Fokus dari analisis isi : Data yang akan dikaji, cara menginferensi (alasan ilmiah). Kenapa keluar simbol K dan L, dst. (kualifikasi cara)- Cara mengisi / menyandingkan, bedakan data dengan cara menganalisis	
No.	Dosen Penguji	Pertanyaan / Masukan	Paraf
1.	Arief Setiawan, ST. MT	<ul style="list-style-type: none">- Operasional <i>content analysis</i> dalam menjawab tema- RTRW semestinya punya porsi yang lebih dibandingkan RPJP- Abstraksi jangan lebih dari 200 kata- Daftar pustaka harus sesuai dengan literatur yang digunakan	
2.	Maria C. Endarwati, ST. MIUEM	<ul style="list-style-type: none">- Kupas terlebih dahulu produk yang akan dikaji exp : RPJP – RTRW : isinya apa, <i>content analysis</i> isinya apa?- Hasil kesesuaian lebih mudah disandingkan dalam bentuk tabel- Analisis keterkaitan (kuat&lemah) dicek kembali ke variabel- Redaksional : abstraksi, referensi, penggunaan huruf besar/kecil- Judul : 2 tema atau analisis kesesuaian ke implementasi	

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT

Endratno Budi Santosa, ST, MT



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Malang

NAMA : Adi Fitra Firmansyah
NIM : 06.24.046
JURUSAN : T. Planologi
PEMBIMBINGI : Dr. Ir. Ibnu SASONGKO, MT

LEMBAR ASISTENSI
STUDI KESESUAIAN RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG (RPJP)
DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA MALANG

Tanggal	Catatan / Keterangan	Tanda Tangan
11/2/15	1. Cek kesesuaian dan bentuk tabel 2. masukkan dan disipikan setelah tabel vis-mir → klasifikasikan mapot ke 1/2 3. utng "h	
20/2/15	Gali kelayakan Tata tulis & tabelan Ace balay kumpe	



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : J. RAYA Karangle, Km2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERSETUJUAN
JILID BUKU SKRIPSI

Sesuai hasil kesepakatan kami, mahasiswa sebagai berikut :

Nama : ADI FITRA FIRMANSYAH
NIM : 0624046
Judul Skripsi : *Studi Kesesuaian RPJP dengan RTRW dan Implementasi Program Pembangunan Kota Malang*

Tanggal Seminar Hasil Skripsi : 6 Februari 2015

dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK untuk diijilid menjadi BUKU HITAM dengan catatan sebagai berikut:

Colek kelengkapan

Pembimbing I

DR. Ir. IBNU SASONGKO, MT.

Pembimbing II

ENDRATHO BUDI SANTOSA, ST., MT.

Keterangan: (*) coret yang tidak perlu

Tanggal : 23/02/2015

Pengirim

Penerima No. 035.01.00843.00.4
Atas nama : INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2
MALANG

Setoran Tunai Debet Rekening kami Setoran Cek/BG B. Niaga

Nama : ADDI YANUSIA IREKSIAN
No. Mhs / Pendaf. : 0620001

Jurusan : Teknik Informatika
Semester : 1

Jumlah Setoran : _____ Rp.

Terbilang :

Perincian	1. Uang pendaftaran ulang _____	Rp. _____
	2. Uang sumbangan _____	Rp. _____
	3. Uang kuliah _____	Rp. _____
	4. Uang praktikum/kredit <u>Uang Kambing</u> _____	Rp. <u>200.000</u>
	5. _____	Rp. _____
	6. _____	Rp. _____

CUSTOMER COPY

Bukti Transaksi : 230215001 1104 050 CASH Cash Deposit 1000000
03-01-000-1-00-4 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL IDR *200.000.00 CF

Tanda Tangan Penyetor,

(_____)